

DR. H. MUHAMMAD RAKHMAT, SH., MH.



PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN

Dr. H. Muhammad Rakhmat, SH., MH.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Copyright © Juli 2015.

All right reserved

Editor : Adang, SH., MH., MM.
Desain Sampul : Hendra Kurniawan., S.Si
Perwajahan dan tataletak : Aep Gunarsa., SH.

Diterbitkan atas kerja sama:

STIE Pasundan Press

Jl. Turangga No. 37-41 Bandung 40263

dan

CV. Warta Bagja

Office Residence:

Komplek Grand Sharon Rosellia No. 28

Bandung Telepon/Faksimil +62 22 85874472

e-mail: warta.bagja@gmail.com

Cetakan Kesatu, Juli, 2015.

ISBN: 978-602-71258-6-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
----------------------	-----

BAB SATU

PENDIDIKAN PANCASILA UNTUK PERGURUAN TINGGI	1
---	---

A. Sejarah Pancasila	1
----------------------------	---

1. Aspek Hukum Pendidikan Pancasila	1
---	---

2. Tujuan Pendidikan Pancasila	3
--------------------------------------	---

3. Makna Hari Lahir Pancasila	6
-------------------------------------	---

4. Makna Lambang Garuda Pancasila	8
---	---

B. Pancasila Sebagai Ideologi Negara Indonesia	12
--	----

1. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara	12
---	----

2. Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila	14
--	----

C. Hubungan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar	16
---	----

D. Pancasila di Era Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi	19
--	----

1. Pancasila Masa Orde Lama.	19
-----------------------------------	----

2. Pancasila Masa Orde Baru.	21
-----------------------------------	----

3. Pancasila Masa Reformasi	23
------------------------------------	----

E. Pancasila Sebagai Sistem Etika	25
---	----

F. Fungsi Pancasila Dalam Kehidupan	28
---	----

G. Pancasila Sebagai Dasar dan Sumber dari Segala Sumber Hukum	30
---	----

BAB DUA

LANDASAN; SEJARAH DAN FILSAFAT PANCASILA	35
A. Landasan Pendidikan Pancasila	35
1. Landasan Historis	35
2. Landasan Kultural.	37
3. Landasan Yuridis.	38
4. Landasan Filosofis	39
B. Sejarah Kelahiran Pancasila.	40
C. Filsafat Pancasila	55
1. Sistem Filsafat Pancasila	55
2. Ajaran Sistem Filsafat Pancasila dan Sistem Kenegaraan RI	59
D. Filsafat Pancasila Sebagai Sistem Ideologi Nasional	60

BAB TIGA

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

UNTUK PERGURUAN TINGGI	71
A. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi	71
1. Pengantar Kewarganegaraan	71
2. Materi Pokok Pendidikan Kewarganegaraan	72
3. Landasan Ilmiah Pendidikan Kewarganegaraan	75
4. Landasan Ideal Pendidikan Kewarganegaraan	77
B. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan	79
C. Kompetensi yang Diharapkan.	82

BAB EMPAT

IDENTITAS NASIONAL	89
A. Pengantar Identitas Nasional	89
1. Pengertian Identitas Nasional	89
2. Unsur-Unsur Identitas Nasional	92
B. Keterkaitan Globalisasi dengan Identitas Nasional	93
C. Paham Nasionalisme Kebangsaan	94
1. Paham Nasionalisme Kebangsaan sebagai Paham yang Mengantarkan pada Konsep Identitas Nasional	95
2. Pemberdayaan Identitas Nasional	96
D. Identitas Nasional Indonesia	97
E. Identitas Nasional dan Integrasi Nasional	103

BAB LIMA

KONSEP DASAR BANGSA DAN NEGARA	107
A. Konsepsi Negara	107
1. Pengertian Negara	107
2. Sifat Hakekat Negara	109
3. Tujuan Negara	109
4. Fungsi Negara	110
5. Unsur Negara	113
B. Proses Tumbuhnya Negara	118
1. Teori Ketuhanan	120
2. Teori Kekuatan	121
3. Teori Perjanjian Masyarakat	123
4. Teori Integralistik	127
C. Penamaan Bangsa Indonesia	130

BAB ENAM

KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA	133
A. Mengenal Konstitusi	133
1. Pengertian Konstitusi	133
2. Sistem Konstitusional	140
3. Subtansi Konstitusi	142
4. Klasifikasi Konstitusi	145
5. Perubahan Konstitusi	150
B. Hubungan Konstitusi Hukum dan HAM	153
C. Dinamika Pengaturan HAM dalam Konstitusi	158
D. Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi	163

BAB TUJUH

CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA

MENURUT UU No. 12	171
A. Pengantar	171
B. Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan RI	175
1. Bagi Anak-anak (untuk memperoleh Kewarganegaraan RI)	175
2. Tata Cara Pendaftaran	177

BAB DELAPAN

DEMOKRASI DI INDONESIA	191
A. Uraian, Teori, Konsepsi	191
1. Arti dan Makna Demokrasi	191
2. Jenis-jenis Demokrasi	195
3. Nilai Demokras	197
B. Demokrasi dan Pelaksanaannya di Indonesia	203
1. Demokrasi Parlementer (Liberal)	204

2. Demokrasi Pancasila Terpimpin	206
3. Demokrasi Pancasila Pada Orde Baru	208
C. Latar Belakang dan Makna Demokrasi Pancasila	212
D. Ciri dan Aspek Demokrasi Pancasila	
E. Pelaksanaan Demokrasi pada Orde Reformasi	
DAFTAR PUSTAKA	217

Bagian Satu

PENDIDIKAN PANCASILA UNTUK PERGURUAN TINGGI

A. Sejarah Pancasila

1. Aspek Hukum Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), terutama meliputi PKn bagi pendidikan dasar dan menengah; dan Pendidikan Pancasila bagi PT. *Semuanya bertujuan membina kesadaran dan kebanggaan nasional SDM warga negara, sebagai subyek penegak budaya dan moral politik NKRI sekaligus sebagai bhayangkari integritas NKRI sebagai sistem kenegaraan Pancasila.* Tema ini diklarifikasi dalam pendekatan *filosofis-ideologis* dan *konstitusional*, berdasarkan *asas imperatif*. Artinya, setiap bangsa dan negara secara niscaya (*a priori*) mutlak melaksanakan visi-misi nilai filsafat negara (dasar negara, dan atau ideologi negara) sebagai fungsi bangsa dan negaranya. Maknanya, demi integritas bangsa dan Negeranya maka mendidik kader bangsa semua warga negaranya untuk menegakkan sistem nilai kebangsaan dan kenegaraannya; seperti: sistem *kapitalisme-liberalisme, zionisme, marxisme-*

PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN

komunisme, theokratisme, sosialisme. Tujuan ini hanya terwujud, berkat pendidikan yang dimaksud.

Berdasarkan *asas normatif filosofis-ideologis* dan *konstitusional* sebagai diamanatkan dalam UUD Proklamasi seutuhnya, dan demi integritas wawasan nasional dan SDM Indonesia yang adil dan beradab (bermartabat) maka ditetapkanlah program Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Sebagai amanat nilai dasar Negara dan UUD Negara, maka sistem pendidikan nasional berkewajiban (*imperatif*) melaksanakan visi-misi pembudayaan nilai dasar negara Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai ideologi negara (ideologi nasional). Visi-misi demikian tersurat dan tersirat dalam UUD Proklamasi seutuhnya.

Untuk pelaksanaannya secara melembaga, sebagai kurikulum dasar (*core curriculum*, kurikulum inti) semua jenjang dan jenis pendidikan melaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Inilah visi-misi Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi khususnya, dan pendidikan kewarganegaraan (PKn) untuk semua tingkat dan jenis pendidikan umumnya.

Dengan berpedoman kepada pasal-pasal UUD, Proklamasi ini, dapat dikembangkan tujuan, isi dan program pembinaan SDM unggul-kompetitif-terpercaya sebagai subyek dalam NKRI. Mereka wajib dikembangkan sesuai kaidah fundamental Pancasila dan UUD Proklamasi; terutama, dalam hal:

1. Pembudayaan dasar negara Pancasila, khususnya sila I (Pasal 29) sebagai landasan moral watak dan kepribadian SDM Indonesia;
2. Dalam bidang HAM mulai nilai sila I – II – IV dan V, dan jabarannya dalam UUD (Pasal 28, 34) perlu pembudayaan dan pengamalan yang nyata.

3. Khusus kondisi sosial ekonomi, karena cukup menyimpang dari nilai dasar Pancasila dan UUD (terutama sila V dan Pasal 33, 34) maka realitas aktual berupa ekonomi liberal dan penguasaan berbagai sumber daya alam yang vital dan potensial oleh investor, maka pendidikan kita kepada generasi penerus menjadi sekedar propaganda dan kebohongan publik (yang mungkin ditertawakan mereka).

Materi pokok program Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, terutama meliputi:

1. Mantapnya rumusan tujuan pendidikan; secara mendasar dan komprehensif, dan dijabarkan dalam komponen-komponen kepribadian SDM sebagai penegak dan bhayangkari sistem kenegaraan Pancasila.
2. Mantapnya thema dan sub-thema pembahasan (sebagai diusulkan berikut), sesuai dengan *scope* kebangsaan dan kenegaraan dalam sistem kenegaraan Pancasila sebagai bangsa negara modern, berbudaya dan beradab; dan
3. Mantapnya thema dan sub-tema pembahasan tentang kehidupan nasional dalam antar hubungan internasional (*global*): mulai politik bebas aktif; organisasi internasional: PBB dan semua komponennya: IMF, World Bank; termasuk GNB dan APEC; serta organisasi regional (ASEAN, SEAMEO).

2. Tujuan Pendidikan Pancasila

Tujuan pendidikan dapat diartikan sebagai *"Seperangkat tindakan intelektual penuh tanggung jawab yang harus di miliki seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang profesi tertentu"*. Sedangkan Pendidikan

itu sendiri adalah "*Upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintahan suatu negara*". Tujuannya adalah untuk melangsungkan hidup dan kehidupan generasi penerus selaku warga masyarakat Bangsa dan Negara agar berguna dan bermakna, serta mampu untuk mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu berkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa negara, dan hubungan internasionalnya

Berbekal tujuan pendidikan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk menjamin berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Sedangkan yang fungsinya adalah, untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan Surat Keputusan Ditjen Dikti Nomor 265 Tahun 2000 dijelaskan bahwa *untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional, wajib diberikan Pendidikan Pancasila kepada peserta didik*. Pendidikan Pancasila dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang Pancasila sebagai filsafat/tata nilai bangsa, sebagai dasar Negara dan Ideologi dengan segala implikasinya. Sedangkan yang menjadi tujuannya adalah, untuk menghasilkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia yang adil dan beradab, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu/golongan, mendukung upaya mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat.

Sebagai bagian dari Pendidikan Nasional, Pendidikan Pancasila mempunyai tujuan mempersiapkan Mahasiswa sebagai calon Sarjana

Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi

yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar:

1. Menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Sehat jasmani dan rohani, berahlak mulia, dan berbudi pekerti luru;
3. Memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung-jawab sesuai dengan hati nurani;
4. Mampu mengikuti perkembangan IPTEK dan seni;
5. Mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya.

Tujuan Pendidikan pancasila, berdasarkan Pasal 3 ayat (2), Keputusan Dirjen Dikti No. 38 / Dikti / Kep / 2002, tentang Kompetensi Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa:

1. Agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggungjawab sesuai dengan hati nurani;
2. Agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya;
3. Agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni;
4. Agar mampu memakanai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

Pendidikan Pancasila sebagai salah satu komponen mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian mahasiswa di Perguruan Tinggi. Dengan bekal Pendidikan Pancasila, setelah menyelesaikan studi

di Perguruan Tinggi, para mahasiswa diharapkan agar tidak sekedar berkembang daya intelektualitasnya namun juga sikap dan perilakunya. Maka dengan demikian, Pendidikan Pancasila bertujuan sebagai berikut;¹

1. Dapat memahami, menghayati dan melaksanakan Pancasila dan UUD-1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila;
2. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak di atasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan UUD-1945;
3. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila dan UUD-1945

3. Makna Hari Lahir Pancasila

Sejarah pembuatan Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, **Kuniaki Koiso** pada tanggal 7 September 1944. Lalu, pemerintah Jepang membentuk BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) pada tanggal 29 April 1945 (2605) atau tahun Showa 20, yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia Merdeka. BPUPK semula beranggotakan 70 orang (62 orang Indonesia, 8 orang anggota istimewa bangsa Jepang), kemudian ditambah dengan 8 orang Indonesia pada sidang kedua. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 - 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Selama empat hari bersidang ada tiga puluh tiga pembicara. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa **Soekarno**

1 Dirjen Dikti, 1995, hlm; 3.

adalah "Penggali/Perumus Pancasila". Tokoh lain yang yang menyumbangkan pikirannya tentang Dasar Negara antara lain adalah **Mohamad Hatta, Muhammad Yamin dan Soepomo.**

Muhammad Yamin, pada tanggal 29 Mei 1945 dia mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia Merdeka, yaitu *kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.* oleh "Panitia Lima" (**Bung Hatta**)diragukan kebenarannya. Arsip **A.G Pringgodigdo** dan Arsip **A.K. Pringgodigdo** yang telah ditemukan kembali menunjukkan bahwa Klaim **Yamin** tidak dapat diterima. Pada hari keempat, **Soekarno** mengusulkan 5 asas yaitu *kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri-kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa,* yang oleh **Soekarno** dinamakan *Pancasila*, Pidato **Soekarno** diterima dengan gegap gempita oleh peserta sidang. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni 1945 diketahui sebagai hari lahirnya pancasila.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah upacara proklamasi kemerdekaan, datang berberapa utusan dari wilayah Indonesia Bagian Timur. Berberapa utusan tersebut adalah; Sam Ratulangi, wakil dari Sulawesi; Hamidhan, wakil dari Kalimantan; I Ketut Pudja, wakil dari Nusa Tenggara; Latuharhary, wakil dari Maluku.

Mereka semua berkeberatan dan mengemukakan pendapat tentang bagian kalimat dalam rancangan Pembukaan UUD yang juga merupakan sila pertama Pancasila sebelumnya, yang berbunyi, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Pada Sidang PPKI I, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, **Hatta** lalu mengusulkan mengubah tujuh kata tersebut menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pengubahan kalimat ini telah dikonsultasikan sebelumnya oleh **Hatta** dengan 4 orang tokoh Islam, yaitu **Kasman Singodimejo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teuku M. Hasan.** Mereka menyetujui perubahan kalimat

tersebut demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan akhirnya bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 pada Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia.

4. Makna Lambang Garuda Pancasila

Lambang Garuda Pancasila disahkan dalam sidang Dewan Menteri Republik Indonesia (RI) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1951. Lambang ini diciptakan oleh Panitia Lambang Negara RI dengan susunan, Ketua: **Prof. Mr. Muhammad Yamin**, dengan anggota: **Ki Hadjar Dewantara, M.A. Pellaupessy, Muhammad Natsir, dan Prof. Dr. R.M.Ng. Purbotjaroko.**² Lambang Garuda Pancasila merupakan lambang negara yang begitu lengkap. Lambang ini terdiri atas kumpulan lambang-lambang yang masing-masing memiliki arti dan maksud baik tersurat maupun yang tersirat. Namun demikian masing-masing bagian lambang itu tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan sebuah lambang Garuda Pancasila yang utuh. Berikut ini akan dijelaskan makna dari lambang Garuda Pancasila.

Kerangka dasar lambang Garuda Pancasila berwujud Burung Garuda. Burung Garuda adalah raja dari segala burung. Burung Garuda juga dikenal sebagai Burung Sakti Elang Rajawali. Terkait dengan ini, Burung Garuda melambangkan kekuatan dan gerak yang dinamis yang terlihat dari sayapnya yang mengembang, siap terbang ke angkasa. Burung Garuda dengan sayap mengembang siap terbang ke angkasa, melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara.

2 Pariata Westra, *Ensiklopedi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa)*, Pusat Penerbitan Balai Pembinaan Administrasi dan Manajemen: Yogyakarta, 1975, Hlm: 175.

Kedua kaki Burung Garuda yang kokoh mencengkeram pita putih yang bertuliskan seloka yang berbunyi: *Bhinneka Tunggal Ika*. Seloka ini diambil dari buku Sutasoma, karangan **Empu Tantular**. *Bhinneka Tunggal Ika*, berarti "*berbeda-beda tetapi satu jua*". Dalam konteks keindonesiaan, kata-kata itu memiliki makna yang sangat mendalam. Negara Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan adat istiadat dan bahasanya sendiri-sendiri. Bangsa Indonesia juga menganut berbagai Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan realitas itu menunjukkan bahwa kehidupan di Indonesia begitu beragam, terdapat berbagai perbedaan di antara yang satu dengan yang lain. Namun kenyataannya, Indonesia merupakan negara kesatuan, satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung satu bahasa persatuan, Indonesia. Bangsa Indonesia itu juga satu jiwa dan satu pandangan hidup. Keadaan yang berbeda-beda tetapi dapat bersatu ini, berarti masing-masing pihak ada toleransi, ada kegotongroyongan, ada nilai saling harga menghargai dan hormat menghormati, sehingga tercipta persatuan dan kesatuan.

Semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*" yang ada pada pita yang dicengkram oleh burung garuda, berasal dari Kitab Negara kertagama yang dikarang oleh **Empu Prapanca** pada zaman kekuasaan kerajaan Majapahit. Pada satu kalimat yang termuat mengandung istilah "*Bhinneka Tunggal Ika*", yang kalimatnya seperti begini: "*Bhinneka tunggal Ika, tanhana dharma mangrwa*." Lambang negara Garuda diatur penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 43/1958.

Warna pokok dari Burung Garuda, adalah kuning emas. Warna kuning emas melambangkan keagungan. Bangsa Indonesia senantiasa menjunjung tinggi martabat bangsa yang bersifat agung dan luhur. Bangsa Indonesia diharapkan menjadi bangsa yang bermartabat, besar (disegani dan dihormati bangsa lain), dan semua warganya

berbudi pekerti luhur. Warna merah putih pada perisai seperti halnya warna bendera Sang Saka Merah Putih, merah melambangkan keberanian dan putih berarti kesucian. Merah putih juga melambangkan kebenaran dan kejujuran. Merah juga melambangkan semangat juang yang tak kunjung padam. Warna hijau pada pohon beringin dan kelopak/tangkai padi dan kapas bermakna kesuburan dan harapan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera.

Jumlah bulu yang berada pada Garuda Pancasila terkait dengan kelahiran NKRI. Bulu pada sayap kanan dan kiri, masing-masing berjumlah 17 helai (menunjukkan tanggal 17); bulu ekor berjumlah delapan helai (menunjukkan bulan 8/Agustus. Kemudian di bawah kalung perisai yang menghubungkan dengan ekor terdapat bulu berjumlah 19 dan bulu pada leher berjumlah 45 (menunjukkan angka tahun 1945). Angka-angka yang menunjuk tanggal 17 Agustus 1945 ini bermakna historis untuk membangun proses penyadaran bagi setiap warga negara Indonesia agar menghargai waktu dan selalu mengingat sejarahnya. Orang yang melupakan sejarahnya selamanya tidak akan pernah dewasa.

Perisai merupakan lambang perjuangan dan perlindungan, karena perisai sering dibawa ke medan perang oleh para prajurit untuk melindungi diri dari serangan musuh. Garis melintang yang membagi perisai menjadi ruang atas dan bawah melambangkan garis Katulistiwa yang memang membelah Kepulauan Indonesia. Perisai yang merupakan lambang perjuangan dan perlindungan ini terbagi atas lima bagian, yang masing-masing melambangkan sila-sila dalam Pancasila.

1. Perisai kecil yang terletak di tengah-tengah perisai besar. Di tengah-tengah perisai kecil terdapat gambar bintang untuk melambangkan sila pertama: "Ketuhanan Yang Maha Esa". Ini

mengandung maksud agar warga negara Indonesia terus meningkatkan keimanan dan ketakwaannya atas dasar agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini sesuai dengan pandangan hidup dan perpektif kehidupan berbangsa yang bersifat religius. Nilai-nilai yang dikembangkan untuk membangun warga bangsa Indonesia yang bermartabat, yakni nilai keimanan dan ketakwaan, toleransi dan kerukunan antar umat beragama, saling hormat menghormati.

2. Gambar rantai yang berwarna kuning emas, menunjukkan sila kedua: "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Rantai ini terdiri atas dua macam yakni yang berbentuk persegi empat dan berbentuk cincin. Hal ini melambangkan makhluk yang terdiri pria dan wanita yang saling sambung menyambung. Bangsa Indonesia menyadari bahwa manusia di dunia ini sama antara yang satu dengan yang lain, tidak bangsa yang lebih tinggi kedudukannya dibanding bangsa lain. Oleh karena itu, antar-manusia dan antarbangsa harus saling kasih sayang, saling mencintai tidak semena-mena, tenggang rasa, saling harga menghargai, dan saling tolong menolong, membela kebenaran dan keadilan (Bahan Penataran UUD-45, P-4 dan GBHN, 1988).
3. Pohon Beringin, melambangkan sila ketiga: "Persatuan Indonesia". Pohon Beringin yang lebat daunnya, hijau, rimbun sehingga bisa digunakan untuk berteduh dan berlindung siapa saja. Nilai-nilai yang termaktub di dalam lambang ini misalnya persatuan dan kesatuan, saling melindungi, rela berkorban, rasa cinta pada tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia sekaligus bangga dengan budaya bangsanya.
4. Kepala Banteng, melambangkan sila keempat: "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan." Rakyat dalam hal ini merupakan komunitas yang

masing-masing individu memiliki kedudukan yang sama, memiliki kewajiban dan hak yang sama. Inilah inti dari kehidupan demokrasi, yang di Indonesia memiliki ciri yang khas, yakni musyawarah untuk mufakat, yang dijalankan secara jujur dan tanggung jawab. Nilai-nilai yang terkandung pada sila keempat ini, antara lain: demokrasi, persamaan, mengutamakan kepentingan negara, tidak memaksakan kehendak, musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan semangat kekeluargaan, kesantunan dalam menyampaikan pendapat, jujur dan tanggung jawab.

5. Padi dan kapas, melambangkan sila kelima: "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Sila ini memberikan semangat dan motivasi bagi pimpinan dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan yang merata (adil) bagi bangsa Indonesia. Padi melambangkan pangan dan kapas melambangkan sandang. Dengan lambang ini diharapkan semua rakyat Indonesia dapat menikmati kemakmuran, kesejahteraan, cukup pangan, cukup sandang. Oleh karena itu, sila kelima ini sekaligus memberikan semangat dan motivasi para pimpinan dan semua unsur masyarakat untuk mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah prinsip keadilan sosial yang perlu diwujudkan sesuai dengan amanat sila kelima Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya antara lain: keadilan, gotong-royong dan saling tolong menolong, tanggung jawab, kerja keras dan kemandirian.

B. Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia

1. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara

Ideologi adalah gabungan dari dua kata majemuk *idea* dan *logos*, yang berasal dari bahasa Yunani *eidos* dan *logos*. Secara sederhana artinya suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran yang mendalam-

dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat. Dalam arti kata luas adalah keseluruhan cita-cita, nilai-nilai dasar dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam arti ini ideologi disebut terbuka. Dalam arti sempit ideologi adalah gagasan dan teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, hukum dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan.

Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasarnya dari konsensus (kesepakatan) masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat, masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Ideologi terbuka bukan hanya dapat dibenarkan melainkan dibutuhkan. Nilai-nilai dasar menurut pandangan negara modern bahwa negara modern hidup dari nilai-nilai dan sikap-sikap dasarnya.

Suatu ideologi yang wajar ialah bersumber atau berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah hidup bangsa. Dengan demikian, ideologi tersebut akan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Hal ini adalah suatu prasyarat bagi suatu ideologi. Berbeda halnya dengan ideologi yang diimpor (dari luar negara), yang akan bersifat tidak wajar dan sedikit banyak memerlukan pemaksaan oleh kelompok

kecil manusia yang mengimpor ideologi tersebut. Dengan demikian, ideologi tersebut bersifat tertutup. Kenyataan ini telah terjadi dalam ideologi komunis yang diimpor ke berbagai negara, sehingga ideologi ini tidak dapat bertahan lama, terbukti bubaranya negara Uni Soviet yang paling ekstrim melaksanakan komunisme.

Pancasila berkar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi prasyarat suatu ideologi terbuka. Sekalipun ideologi ini bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya adalah sebegitu rupa sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan ideologi itu sendiri, hal mana merupakan suatu yang tidak logis atau nalar. Suatu ideologi sebagai rangkuman gagasan-gagasan dasar yang terpadu dan bulat tanpa kontradiksi atau saling bertentangan dalam aspek-aspeknya, pada hakikatnya berupa suatu tata nilai, di mana nilai dapat kita rumuskan sebagai hal ihwal buruk baiknya sesuatu, yang dalam hal ini ialah apa yang dicita-citakan.

2. Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila

Faktor yang mendorong keterbukaan ideologi Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat.
- b. Kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya, seperti bagaimana komunisme ditinggalkan oleh sebagian besar negara-negara Eropa Timur dan Rusia.
- c. Pengalaman sejarah politik masa lampau, seperti dominasi pemerintah Orde Baru untuk melaksanakan penataran Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila (P4), yang mana materi penataran P4 itu sesuatu yang dirumuskan oleh kemauan

pemerintah, bukan atas keinginan dari segenap komponen masyarakat Indonesia, sehingga hasilnya jauh dari harapan yang diinginkan.

- d. Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Keterbukaan ideologi Pancasila ditujukan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia modern. Kita mengenal ada tiga tingkat nilai, yaitu nilai dasar yang tidak berubah, nilai instrumental sebagai sarana mewujudkan nilai dasar yang dapat berubah sesuai dengan keadaan, dan nilai praksis berupa pelaksanaan secara nyata yang sesungguhnya.

Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam norma-norma dasar Pancasila yang terkandung dan tercermin dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai atau norma dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ini tidak boleh berubah atau diubah, karena itu adalah pilihan dan hasil kesepakatan (*consensus*) bangsa. Perwujudan dan pelaksanaan nilai-nilai instrumental adalah pasal-pasal dari UUD 1945 yang dapat mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan jaman, seperti yang telah dilaksanakan oleh MPR dengan melakukan amandemen UUD 1945 di era reformasi ini. Contoh dari perubahan instrumental itu adalah pemilihan Presiden yang berubah dari MPR kepada rakyat yang langsung memilih. Sedangkan nilai-nilai praksis tercermin dan undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya yang berhubungan dengan kenyataan kehidupan dalam masyarakat. Baik nilai-nilai instrumental maupun nilai praksis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai dasarnya, yaitu Pancasila atau Pembukaan UUD 1945.

Bagian Dua

LANDASAN; SEJARAH DAN FILSAFAT PANCASILA

A. Landasan Pendidikan Pancasila

1. Landasan Historis

Setiap bangsa memiliki ideologi dan pandangan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya, diambil dari nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang di dalam kehidupan bangsa yang bersangkutan. Demikianlah halnya dengan Pancasila yang merupakan ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia digali dari tradisi dan budaya yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sendiri sejak kelahirannya dan berkembang menjadi bangsa yang besar seperti yang dialami oleh dua kerajaan besar tempo dulu yaitu Kedatuan Sriwijaya dan Keprabuan Majapahit.

Setelah berproses dalam rentang perjalanan sejarah yang panjang sampai kepada tahap pematangannya oleh para pendiri negara pada saat akan mendirikan negara Indonesia merdeka telah berhasil merancang dasar negara yang justru bersumber pada nilai-nilai yang

telah tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang kemudian diformulasikan dan disistematiskan dalam rancangan dasar negara yang diberi nama Pancasila.

Nama tersebut untuk pertama kalinya diberikan oleh salah seorang penggagasnya yaitu Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 dalam persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atas saran dan petunjuk seorang temannya yang ahli bahasa. Dengan demikian kiranya jelas pada kita bahwa secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaspisahkan dari dan dengan nilai-nilai Pancasila serta telah melahirkan keyakinan demikian tinggi dari bangsa Indonesia terhadap kebenaran dan ketepatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia, sejak resmi disahkan menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sampai saat ini.

Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang mulai jaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya penjajah. Bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup, di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Oleh para pendiri bangsa kita (*the founding father*) dirumuskan secara sederhana namun mendalam yang meliputi lima prinsip (sila) dan diberi nama Pancasila.

Dalam era reformasi bangsa Indonesia harus memiliki visi dan pandangan hidup yang kuat (nasionalisme) agar tidak terombang-ambing di tengah masyarakat internasional. Hal ini dapat terlaksana dengan kesadaran berbangsa yang berakar pada sejarah bangsa. Secara historis nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila

sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara obyektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau bangsa Indonesia sebagai *kausa materialis* Pancasila.

2. Landasan Kultural

Pandangan hidup suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepaspisahkan dari kehidupan bangsa yang bersangkutan. Bangsa yang tidak memiliki pandangan hidup adalah bangsa yang tidak memiliki jati diri (identitas) dan kepribadian, sehingga akan dengan mudah terombang-ambing dalam menjalani kehidupannya, terutama pada saat-saat menghadapi berbagai tantangan dan pengaruh baik yang datang dari luar maupun yang muncul dari dalam, lebih-lebih di era globalisasi dewasa ini.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah jati diri dan kepribadian bangsa yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam budaya masyarakat Indonesia sendiri dengan memiliki sifat keterbukaan sehingga dapat mengadaptasikan dirinya dengan dan terhadap perkembangan zaman di samping memiliki dinamika internal secara selektif dalam proses adaptasi yang dilakukannya. Dengan demikian generasi penerus bangsa dapat memperkaya nilai-nilai Pancasila sesuai dengan tingkat perkembangan dan tantangan zaman yang dihadapinya.

Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah merupakan hasil konseptual seseorang saja

melainkan merupakan suatu hasil karya bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Oleh karena itu generasi penerus terutama kalangan intelektual kampus sudah seharusnya untuk mendalami serta mengkaji karya besar tersebut dalam upaya untuk melestarikan secara dinamis dalam arti mengembangkan sesuai dengan tuntutan jaman.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis (hukum) perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi diatur dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 39 menyatakan: Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan. Demikian juga berdasarkan SK Mendiknas RI, No.232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa kelompok Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi, yang terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Sebagai pelaksanaan dari SK tersebut, Dirjen Pendidikan Tinggi mengeluarkan Surat Keputusan No.38/DIKTI/Kep/2002, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa kompetensi kelompok mata kuliah MPK bertujuan menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Adapun rambu-rambu mata kuliah MPK Pancasila adalah terdiri atas segi historis, filosofis, ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara serta etika politik. Pengembangan tersebut dengan

harapan agar mahasiswa mampu mengambil sikap sesuai dengan hati nuraninya, mengenali masalah hidup terutama kehidupan rakyat, mengenali perubahan serta mampu memaknai peristiwa sejarah, nilai-nilai budaya demi persatuan bangsa.

4. Landasan Filosofis

Secara filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan kenyataan obyektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan YME. Setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu dalam realisasi kenegaraan termasuk dalam proses reformasi dewasa ini merupakan suatu keharusan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan, baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

Hal tersebut berdasarkan pada suatu kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara. Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan yang terwujudkan sebagai rakyat (merupakan unsur pokok negara), sehingga secara filosofis negara berpersatuan dan berkerakyatan konsekuensinya rakyat adalah merupakan dasar ontologism demokrasi, karena rakyat merupakan asal mula kekuasaan Negara. Atas dasar pengertian

filosofis tersebut maka dalam hidup bernegara nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara.

Konsekuensinya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk system peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu dalam realisasi kenegaraan termasuk dalam proses reformasi dewasa ini merupakan suatu keharusan bahwa pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, social budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

Nilai-nilai yang tertuang dalam rumusan sila-sila Pancasila secara filosofis dan obyektif merupakan filosofi bangsa Indonesia yang telah tumbuh, hidup dan berkembang jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logisnya menjadi kewajiban moral segenap bangsa Indonesia untuk dapat merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari baik kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar filsafat negara, maka Pancasila harus menjadi sumber bagi setiap tindakan para penyelenggara negara dan menjiwai setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Sejarah Kelahiran Pancasila

Mari kita telusuri fakta-fakta sejarah tentang kelahiran pancasila. Dalam rapat BPUPKI pada tanggal 1 juni 1945, **Bung Karno (Soekarno)** menyatakan antara lain:

"Saya mengakui, pada waktu saya berumur 16 tahun, duduk di bangku sekolah H.B.S. di Surabaya, saya dipengaruhi seorang sosialis yang bernama A. Baars, yang memberi

pelajaran kepada saya". katanya: "Jangan berpaham kebangsaan, tetapi berpahamlah rasa kemanusiaan seluruh dunia, jangan mempunyai rasa kebangsaan sedikitpun".

Hal tersebut terjadi pada tahun 1917, akan tetapi pada tahun 1918. **Soekarno** membaca sebuah karya dari **Dr. Sun Yat Sen**, dalam tulisannya, "*San Min Cu I*" atau "*The Three people's Principles*", dari buku tersebut akhirnya **Soekarno** mendapatkan pelajaran yang membongkar *kosmopolitanisme* yang diajarkan oleh **A. Baars**. Dalam hati **Soekarno** sejak itu tertanamlah rasa kebangsaan, oleh pengaruh "*The THREE people's Principles*" itu. Maka oleh karena itu, jikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap **Dr. Sun Yat Sen** sebagai penganjurnya, yakinlah bahwasanya **Bung Karno** juga seorang Indonesia yang dengan perasaan hormat dengan se hormat-hormatnya merasa berterima kasih kepada **Dr. Sun Yat Sen**.

Lebih lanjut ketika membicarakan prinsip keadilan sosial, **Bung Karno**, sekali lagi menyebutkan pengaruh *San Min Cu I* karya **Dr. Sun Yat Sen**, prinsip tersebut tertuang dalam prinsip nomor 4 sekarang, yang diusulkan oleh **Soekarno**, dengan prinsip tersebut kesejahteraan, prinsip tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Pada bagian lain dari pidato **Bung Karno** tersebut, dia menyatakan: "*Maka demikian pula jikalau kita mendirikan negara Indonesia merdeka, Paduka tuan ketua, timbullah pertanyaan: Apakah Weltanschauung*" kita, untuk mendirikan negara Indonesia merdeka di atasnya? Apakah nasional sosialisme? ataukah *historisch-materialisme*? Apakah **San Min Cu I**, sebagai dikatakan oleh **Dr. Sun Yat Sen**? Di dalam tahun 1912 **Sun Yat Sen** mendirikan negara Tiongkok merdeka, tapi "*Weltanschauung*" telah dalam tahun 1885, kalau saya tidak salah, dipikirkan, dirancang.

Di dalam buku *The THREE people's Principles*, **San Min Cu I, Mintsu, Min Chuan, Min Sheng** mengungkapkan bahwa *nasionalisme, demokrasi, sosialisme*, telah digunakan oleh **Dr. Sun Yat Sen, Weltanschaung** itu, tapi batu tahun 1912 beliau mendirikan negara baru di atas "*Weltanschaung*" **San Min Cu I** itu, yang telah disediakan terlebih dahulu berpuluh-puluh tahun.

Pengaruh *Posmopolitanisme (internasionalisme)* kaya **A. Baars** dan **San Min Cu I** kaya **Dr. Sun Yat Sen** yang diterima **Bung Karno** pada tahun 1917 dan 1918 disaat ia menduduki bangku sekolah H.B.S. benar-benar mendalam. Ha ini dapat dibuktikan pada saat Konprensi Partai Indonesia (Partindo) di Mataram pada tahun 1933, **Bung Karno** menyampaikan gagasan tentang *marhaennisme*, yang pengertiannya ialah: *Sosio –nasionalisme, yang terdiri dari: Internasionalisme, Nasionalisme, Sosio – demokrasi, yang tersiri dari: Demokrasi, Keadilan sosial.*

Jadi marhaenisme menurut Bung Karno yang dicetuskan pada tahun 1933 di Mataram yaitu: *Internasionalisme; Nasionalisme; Demokrasi; Keadilan sosial (Endang Saifuddin Anshari. Piagam Jakarta, 22 Juni 1945, 1981: 17-19.)* Dan jika kita perhatikan dengan seksama, akan jelas sekali bahwa 4 unsur *marhainisme* seluruhnya diambil dari *Internasionalisme* milik **A. Baars** dan **Nasionalisme, Demokrasi** serta keadilan sosial (*sosialisme*) seluruhnya diambil dari **San Min Cu I** milik **Dr. Sun Yat Sen**.

Sekarang marilah kita membuktikan bahwa pancasila yang dicetuskan **Bung Karno** pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI adalah sama dengan *Marheanisme* yang disampaikan dalam Konprensi Partindo di Mataram pada tahun 1933, yang itu seluruhnya diambil dari *kosmopolitanisme* milik **A. Baars** dan **San Min Cu I** milik **Dr. Sun Yat Sen**. Di dalam pidato **Bung Karno** pada tanggal 1

juni 1945 itu antara lain berbunyi:

"Saudara-saudara! Dasar negara telah saya sebutkan, lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar..... Namanya bukan Panca Dharma, tetapi.... saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa..... namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Kelima sila tadi berurutan sebagai berikut; Kebangsaan Indonesia Internasionalisme atau peri-kemanusiaan; Mufakat atau demokrasi; Kesejahteraan sosial; Ke-Tuhanan. (Pidato Bung Karno pada tanggal 1 juni 1945 dimuat dalam "20 tahun Indonesia Merdeka" Dep. Penerangan RI. 1965.)

Kelima sila dari Pancasila **Bung Karno** ini, kita cocokkan dengan *marhaenisme* **Bung Karno** adalah persis sama, Cuma ditambah dengan Ke Tuhanan. Untuk lebih jelasnya baiklah kita susun sebagai berikut:

1. *Kebangsaan Indonesia* berarti sama dengan *nasionalisme* dalam *marhaenisme*, juga sama dengan *nasionalisme* milik **San Min Cu I** milik **Dr. Sun yat Sen**, Cuma ditambah dengan kata-kata Indonesia.
2. *Internasionalisme atau peri-kemanusiaan* berarti sama dengan internasionalisme dalam *marhaenisme*, juga sama dengan internasionalisme (*kosmopolitanisme*) milik **A. Baars**.
3. *Mufakat atau demokrasi* berarti sama dengan demokrasi dalam *marhaenisme*, juga sama dengan demokrasi dalam **San Min Cu I** milik **Dr. Sun Yat Sen**;
4. *Kesejahteraan sosial* berarti sama dengan keadilan sosial dalam

marhaenisme, juga berarti sama dengan *sosialisme* dalam **San Min Cu I** milik **Dr. Sun Yat Sen**.

5. *Ke-Tuhanan* yang diambil dari pendapat-pendapat para pemimpin Islam, yang berbicara lebih dahulu dari Bung Karno, di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 juni 1945.

Dengan cara mencocokkan seperti ini, berarti nampak dengan jelas bahwa Pancasila yang dicetuskan oleh **Bung Karno** pada tanggal 1 juni 1945, yang merupakan "Rumus Pancasila I", sehingga dijadikan Hari Lahirnya Pancasila, berasal dari 3 sumber yaitu: Dari *San Min Cu I* **Dr. Sun Yat Sen** (Cina); Dari *internasionalisme (kosmopolitanisme A. Baars* (Belanda); Dari umat Islam. Jadi Pancasila 1 juni 1945, adalah bersumber dari: *Cina; Belanda; dan Islam*. Dengan begitu bahwa pendapat yang menyatakan Pancasila itu digali dari bumi Indonesia sendiri atau dari peninggalan nenek moyang adalah sangat keliru dan salah! Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sebelum sidang pertama BPUPKI itu berakhir, dibentuklah satu panitia kecil untuk: Merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945; Menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamkan Indonesia merdeka.

Dari dalam panitia kecil itu dipilih lagi 9 orang untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945, yang kemudian diberikan nama dengan "Piagam Jakarta".

Piagam Jakarta berbunyi:

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia

telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum Dasar Negara Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada : Ketuhanan, dengan menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk – kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia."

Jakarta, 22-6-1945.

Ir. SOEKARNO ;

Drs. Mohammad Hatta ;

Mr. A.A Maramis ;

Abikusno Tjokrosujoso ;

Abdul Kahar Muzakir ;

H.A. Salim ;

Mr. Achmad Subardjo ;

Wachid Hasjim ;

Mr. Muhammad Yamin

PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN

Dengan begitu, maka Pancasila menurut Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan ini merupakan Rumus Pancasila II, berbeda dengan Rumus Pancasila I. Lebih jelasnya Rumus Pancasila II ini adalah sebagai berikut;

1. Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab ;
3. Persatuan Indonesia ;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumus Pancasila II ini atau lebih dikenal dengan Pancasila menurut Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, baik mengenai sistimatikanya maupun redaksinya sangat berbeda dengan Rumus Pancasila I atau lebih dikenal dengan Pancasila Bung Karno tanggal 1 juni 1945.

Pada rumus pancasila I, Ke-Tuhanan yang berada pada sila kelima, sedangkan pada Rumus Pancasila II, ke-Tuhanan ada pada sila pertama, ditambah dengan anak kalimat *"dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya"*. Kemudian pada Rumus Pancasila I, kebangsaan Indonesia yang berada pada sila pertama, redaksinya berubah sama sekali menjadi Persatuan Indonesia pada Rumus Pancasila II, dan tempatnyapun berubah yaitu pada sila ketiga.

Demikian juga pada Rumus Pancasila I *Internasionalisme atau peri kemanusiaan*, yang berada pada sila kedua, redaksinya berubah menjadi Kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya pada Rumus Pancasila I, *Mufakat atau Demokrasi*, yang berbeda pada sila ketiga, redaksinya berubah sama sekali pada Rumus Pancasila II, yaitu menjadi

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan menempati sila keempat.

Dan juga pada Rumus Pancasila I, *kesejahteraan sosial yang berada pada sila keempat*, baik redaksinya, maka Pancasila pada Rumus II ini, tentunya mempunyai pengertian yang jauh berbeda dengan Pancasila pada Rumus I.

Rumus Pancasila II ini atau yang lebih populer dengan nama **Pancasila menurut Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945**, yang dikerjakan oleh panitia 9, maka pada rapat terakhir BPUPKI pada tanggal 17 Juni 1945, secara bulat diterima rumus Pancasila II ini.

Sehari sesudah proklamasi, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, terjadilah rapat "Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia" (PPKI). Panitia ini dibentuk sebelum proklamasi dan mulai aktif bekerja mulai tanggal 9 Agustus 1945 dengan beranggotakan 29 orang. Dengan mempergunakan rancangan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI, maka PPKI dapat menyelesaikan acara hari itu, yaitu: *Menetapkan Undang-Undang Dasar; dan Memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu rapat selama 3 jam.*

Dengan demikian terpenuhilah keinginan **Bung Karno** yang diucapkan pada waktu membuka rapat itu sebagai ketua panitia dengan kata-kata sebagai berikut; *"Tuan-tuan sekalian tentu mengetahui dan mengakui, bahwa kita duduk di dalam suatu zaman yang beralih sebagai kilat cepatnya. Maka berhubungan dengan itu saya minta sekarang kepada tuan-tuan sekalian, supaya kitapun bertindak di dalam sidang ini dengan kecepatan kilat"*

Sedangkan mengenai sifat dari Undang-Undang Dasarnya sendiri **Bung Karno** berkata: *"Tuan-tuan tentu mengerti bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar sementara, Undang-Undang Dasar*

Kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah revolusi grodwet. Nanti kita akan membuat undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap. Harap diingat benar-benar oleh tuan-tuan, agar kita ini harus bisa selesai dengan Undang-Undang Dasar itu". Dalam beberapa menit saja, tanpa ada perdebatan yang substansil disahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, dengan beberapa perubahan, khususnya dalam rumus pancasila. **(Pranoto Mangkusasmito, Pancasila dan sejarahnya, 1972: 9-11).**

Adapun Pembukaan undang-Undang Dasar, yang didalamnya terdapat Rumus Pancasila II, yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, adalah sebagai berikut:

PEMBUKAAN

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat Rahmat Alloh Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan

umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dengan demikian disahkannya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, maka Rumus Pancasila mengalami perubahan lagi, yaitu:

1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab ;
3. Persatuan Indonesia ;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perubahan esensial dari Rumus Pancasila II atau Pancasila menurut Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dengan Rumus Pancasila III atau Pancasila menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus 1945, yaitu pada sila pertama "*Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,*" diganti dengan "*Ke-Tuhanan Yang Maha Esa*". perubahan ini ternyata dikemudian hari menumbuhkan benih

PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN

pertentangan sikap dan pemikiran yang tak kunjung berhenti sampai hari ini. Sebab umat Islam menganggap bahwa pencoretan anak kalimat pada sila pertama Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, oleh PPKI adalah suatu pengkhianatan oleh golongan nasionalis dan kristen. Karena Rumus Pancasila II telah diterima secara bulat oleh BBUPKI pada tanggal 17 Juli 1945.

Selanjutnya melalui aksi militer Belanda ke-I dan ke-II, dan dibentuknya Negara-Negara bagian oleh Belanda, pemberontakan PKI di Madiun, *statemen Roem Royen* yang mengembalikan **Bung Karno** dan kawan-kawannya dari Bangka ke Jogjakarta, sedangkan Presiden darurat RI pada waktu itu ialah **Mr. Syafruddin Prawiranegara**, sampailah sejarah negara kita kepada konfrensi meja bundar di Den Haag (Nederland). Konfrensi ini berlangsung dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai tanggal 2 November 1949. dengan ditandatanganinya "*Piagam Persetujuan*" antara delegasi Republik Indonesia dan delegasi pertemuan untuk permusyawaratan federal (B.F.O.)

Mengenai "Konstitusi Republik Indonesia Serikat" (RIS) di Seyeningen pada tanggal 29 Oktober 1949, maka ikut berubahlah Rumus Pancasila III menjadi Rumus Pancasila IV. Rumus Pancasila IV ini termuat dalam muqadimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS), yang bunyinya sebagai berikut:

Mukadimah

Kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu padu dalam perjuangan kemerdekaan, dengan senantiasa berhati teguh berniat menduduki hak hidup sebagai bangsa yang merdeka berdaulat.

Ini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampailah kepada ringkasan sejarah yang berbahagia dan luhur.

Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam satu piagam negara yang berbentuk Republik Federasi berdasarkan pengakuan "Ketuhanan Yang Maha Esa, Peri kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan keadilan sosial."

Untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.

Secara jelasnya Rumus Pancasila IV atau **Pancasila menurut mukadimah Undang-Undang Dasar RIS tanggal 29 Oktober 1949**, adalah sebagai berikut;

1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
2. Peri-Kemanusiaan.
3. Kebangsaan.
4. Kerakyatan dan
5. Keadilan sosia.

Perubahan yang terjadi antara Rumus Pancasila II dengan Rumus Pancasila IV adalah perubahan redaksional yang sangat banyak, yang sudah barang tentu akan membawa akibat pengertian Pancasila itu menjadi berubah pula. Republik Indonesia Serikat tidak berumur sampai 1 tahun. Pada tanggal 19 Mei 1950 ditanda tangani "*Piagam Persetujuan*" antara pemerintah RIS dan pemerintah RI. Dan pada tanggal 20 Juli 1950 dalam pernyataan bersama kedua pemerintah dinyatakan, antara lain menyetujui rencana Undang-Undang Dasar sementara negara kesatuan Republik Indonesia seperti yang dilampirkan pada pernyataan bersama.

PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar sementara negara kesatuan Republik Indonesia seperti yang dilampirkan pada pernyataan bersama. Pembukaan Undang-Undang Dasar sementara 1950, yang di dalamnya terdapat rumus Pancasila, adalah sebagai berikut;

Mukadimah

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dengan berkat dan rahmat Tuhan tercapailah tingkat sejarah yang berbahagia dan luhur.

Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Kesatuan, berdasarkan pengakuan ketuhanan yang maha esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan yang berdaulat sempurna".

Untuk jelasnya Rumus Pancasila di dalam mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara dapat disusun sebagai berikut;

1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
2. Peri-Kemanusiaan.
3. Kebangsaan.

4. Kerakyatan dan
5. Keadilan sosial.

Rumus Pancasila dalam mukadimah Undang-Undang Dasar sementara adalah merupakan rumus pancasila V. dan ternyata antara Rumus Pancasila IV dan Rumus Pancasila V tidak ada perubahan baik sistematikanya maupun redaksinya. Tetapi setelah dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang menyatakan "*Pembubaran konstituante dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1945*", Rumus Pancasila mengalami perubahan, baik redaksinya maupun pengertiannya secara esensial dan mendasar. Sebab setelah itu **Bung Karno** merumuskan Pancasila dengan menggunakan "*Teori Perasan*" yaitu pancasila itu diperasnya menjadi *tri sila* (tiga sila): *sosio-nasionalisme (yang mencakup kebangsaan Indonesia dan peri kemanusiaan); Sosio demokrasi (yang mencakup demokrasi dan kesejahteraan sosial dan ketuhanan. Trisila ini diperas lagi menjadi Ekasila (satu sila); Ekasila itu tidak lain ialah gotong-royong. Dan gotong royong diwujudkan oleh Bung Karno dalam bentuk nasakom (nasional, agama dan komunis).*

Lebih jelasnya teori perasan Bung Karno dapat disusun sebagai berikut:

1. Pancasila itu diperasnya menjadi *tri sila* (tiga sila), yang terdiri atas: Sosionasionalisme; Sosio; Ketuhanan.
2. Trisila diperas menjadi Ekasila
3. Ekasila yaitu gotong-royong.

Teori perasan **Bung Karno** ini bukan masalah baru, tetapi itulah hakekat Pancasila yang ia lahirkan pada tanggal 1 Juni 1945; dan hal ini dapat dilihat dari pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di depan

BPUPKI, yang antara lain berbunyi, "*Atau barang kali ada saudara-saudara yang tidak senang ada bilangan itu?* Saya boleh peras sehingga tinggal tiga saja. Saudara Tanya kepada saya apakah perasan tiga perasan itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia, *Weltanschauung* kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme; kebangsaan dan perikemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan *socio-nationalisme*. Dan demokrasi yang bukan demokrasi barat, tetapi *Politiek economische democratie*, yaitu *politieke democratie* dengan *sociale rechtvaardigheid*, demokrasinya dengan kesejahteraan saya peraskan pula menjadi satu. Inilah yang dulu saya namakan *socio democratie*.

Tinggal lagi ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: *socionationalisme*, *socio-democratie* dan ketuhanan. Kalau tuan senang dengan simbol tiga ambillah yang tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada *trisila* ini, dan minta satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu?, Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan *Indonesia yang tulen*, yaitu perkataan gotong-royong! alangkah hebatnya! negara gotong-royong. (begitulah ucap Soekarno).

Selain "teori perasan" Pancasila, **Bung Karno** menjabarkan dan melengkapi Pancasila itu dengan *Manifesto Politik* (Manipol) dan USDEK (Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribaan Indonesia). Hal ini bisa kita jumpai di dalam "Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi", yang antara lain menyatakan: "*Ada orang menanya : Kepada Manifesto Politik?* Kan kita sudah mempunyai Pancasila? Manifesto Politik adalah pancaran dari Pancasila; USDEK adalah pemancaran dari pada Pancasila.

Manifesto Politik, USDEK dan Pancasila adalah terjalin satu salam lain. Manifesto politik, USDEK dan pancasila tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika saya harus mengambil *qiyas* agama sekadar *qiyas* maka saya katakan: *Pancasila adalah semacam Qur'annya dan Manifesto Politik dan USDEK adalah semacam Hadits-haditsnya*. Awas saya tidak mengatakan bahwa Pancasila adalah Qur'an dan Manifesto Politik dan USDEK adalah hadits! Qur'an dan Hadits shahih merupakan satu kesatuan, maka Pancasila dan Manifesto politik dan USDEK adalah merupakan satu kesatuan.

Teori perasan Pancasila yang dilengkapi dengan manifesto Politik dan USDEK adalah merupakan Rumus Pancasila VI. Dengan Naskaom memberi peluang yang besar kepada golongan komunis seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk memasuki berbagai instansi sipil dan militer. Dominasi komunis di dalam pemerintahan dan berbagai sektor kehidupan, memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan kudeta dan perebutan kekuasaan; meletuslah Gerakan 30 September PKI. Meletusnya G 30 S / PKI dari kandungan Nasakom, yang membawa runtuhnya rezim Orde Lama, menurut regim Orde baru disebabkan oleh penyelewengan pancasila dari rel yang sebenarnya. Oleh karena itu rezim Orde Baru mencanangkan semboyan "Laksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekwen".

C. Filsafat Pancasila

1. Sistem Filsafat Pancasila

Setiap bangsa mewarisi nilai sosio-budaya (nasional) sebagai bagian dari budaya dan peradaban universal. Pemikiran awal dan fundamental umat manusia berwujud *nilai filsafat*. Makna istilah ini terbentuk dari bahasa Yunani: *filos* = *friend, love*; dan *sophia* = *learning, wisdom*. Jadi, filsafat bermakna orang yang *bersahabat*, dan

mencintai ilmu pengetahuan akan bersikap arif bijaksana. Filsafat bermakna juga sebagai pemikiran fundamental dan monumental manusia untuk mencari kebenaran hakiki (hikmat, kebijaksanaan); karenanya kebenaran ini diakui sebagai nilai kebenaran terbaik, yang dijadikan pandangan hidup (filsafat hidup, Weltanschauung). Berbagai tokoh filosof dari berbagai bangsa menemukan dan merumuskan sistem filsafat sebagai ajaran terbaik mereka; yang dapat berbeda antar ajaran filosof. Karena itulah berkembang berbagai aliran filsafat: materialisme, idealisme, spiritualisme; realisme.... dan berbagai aliran modern: rasionalisme, humanisme, individualisme, liberalisme-kapitalisme; marxisme-komunisme; sosialisme.

Bagi bangsa Indonesia filsafat Pancasila adalah bagian dari sistem filsafat Timur yang memancarkan nilai keunggulannya, sebagai sistem filsafat *theisme-religious*. Dapat dicermati uraian ringkas berikut;

1. *Secara material-substansial dan intrinsik*; Nilai Pancasila adalah filosofis; misal hakikat Kemanusiaan yang adil dan beradab, apalagi Ketuhanan Yang Maha Esa adalah metafisis/filosofis;
2. *Secara prktis-fungsional*; Dalam tata-budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang dipraktekkan;
3. *Secara formal-konstitusional*; Bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara (filsafat negara) RI;
4. *Secara psikologis dan kultural*; Bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya, wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain (Cina, India, Arab, Eropa) mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Jadi, Pancasila adalah filsafat yang diwarisi dalam budaya Indonesia.
5. *Secara potensial*; Filsafat Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya; filsafat Pancasila akan berkembang secara konsepsional, kaya konsepsional dan kepastiaan secara

kuantitas dan kualitas. Filsafat Pancasila merupakan bagian dari khasanah dan filsafat yang ada dalam kepustakaan dan peradaban modern.

Sistem filsafat Pancasila adalah bagian dari sistem filsafat Timur yang memiliki identitas dan integritas keunggulan universal sebagai sistem filsafat theisme-religious. Sistem filsafat demikian memancarkan keunggulan karena sesuai dengan potensi kodrati martabat kepribadian manusia yang dianugerahi integritas-kerokhanian yang memancarkan akal dan budinurani; yang potensial mengembangkan budaya dan peradaban: sebagai subyek budaya (termasuk subyek hukum dan subyek dalam negara) dan subyek moral.

Sebagai integritas kepribadian manusia sebagai pribadi berkembang secara *kualitatif* dalam makna integritas martabat kepribadiannya dengan khidmat *mengabdikan* dan *menuju* (asas teleologis) Maha Pencipta, Maha Pengayom demi tanggungjawab moral manusia sebagai penunaian amanat kewajiban asasi manusia. Pribadi dengan harkat martabat kepribadiannya memelihara antarmubungan harmonis dengan semua *eksistensi horizontal* berdasarkan *wawasan vertikal (theisme religious)*. Artinya, antarmubungan pribadi manusia dengan alam, sesama, budaya dan dengan kenegaraan dijiwai kesadaran tanggung jawab dan kewajiban moral Ketuhanan-keagamaan. Asas demikian mengandung makna bahwa filsafat Pancasila memancarkan *identitas* dan *integritas moral theisme-religious* (sila I).

Ajaran filsafat Pancasila memancarkan keunggulan sistem filsafat dan kultural NKRI; melengkapi keunggulan natural dan (potensial) SDM Indonesia. Integritas keunggulan ini ditegakkan dalam *sistem kenegaraan Pancasila* secara *konstitusional* berdasarkan UUD

Proklamasi (yang juga memancarkan *keunggulan konstitusional*); sebagai terpancar dari nilai fundamental:

1. NKRI sebagai negara kesatuan berbentuk republik;
2. NKRI menegakkan *sistem kedaulatan rakyat* (demokrasi);
3. NKRI menegakkan *sistem negara hukum* (Rechtsstaat);
4. NKRI adalah *negara bangsa* (nation state: sebagai jabaran wawasan nasional dan wawasan nusantara); dan
5. NKRI menegakkan *asas kekeluargaan* (yang menjiwai dan melandasi: wawasan nasional, dan wawasan nusantara) yang ditegakkan dalam *N-sistem nasional*.

Sistem kenegaraan NKRI demikian mengalami *degradasi* filosofis-ideologis dan konstitusional mulai era reformasi; karena visi-misi reformasi cenderung mempraktekkan: demokrasi liberal, ekonomi liberal; bermuara kepada praktek negara federal, bahkan *anarchism* yang mengancam integritas NKRI dan wawasan nasional Indonesia. Keprihatinan demikian terus mengupayakan pelurusan reformasi, supaya bangsa dan NKRI tidak terjerumus ke dalam kebangkrutan dan cengkeraman *neo-imperialisme* yang terus meningkat dalam *era postmodernisme*.

Terjabar dalam sistem kenegaraan Pancasila yang melembaga dalam NKRI berdasarkan Pancasila - UUD 45, dengan berbagai fungsi *sistem nasional*, sebagai jabaran dan *fungsionalisasi* sistem filsafat dan atau sistem ideologi nasional (Pancasila), yang secara konsepsional mendesak untuk dikembangkan dalam rangka *ketahanan ideologi* dan *ketahanan nasional* untuk menghadapi tantangan neo-liberalisme, neo-ultraimperialisme yang makin dinamis dalam era globalisasi-liberalisasi, dan postmodernisme. Dinamika demikian digerakkan sebagai rekayasa politik global dari negara adidaya yang berjuang merebut *supremasi politik* melalui issue: atas nama HAM

Bagian Tiga

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI

A. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi

1. Dasar Hukum Pendidikan Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 2 menyatakan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: Pendidikan Agama; Pendidikan Kewarganegaraan; dan Bahasa. Hal ini, sebelumnya di ataur dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 Ayat (2) menyatakan bahwa setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan di Indonesia wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya dalam Keputusan Mendikbud No. 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Belajar Mahasiswa, ketiganya dimasukkan dalam kelompok Mata Kuliah Umum (MKU) dan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi.

Di tingkat Pendidikan Dasar hingga Menengah substansi pendidikan kewarganegaraan digabungkan dengan pendidikan Pancasila sehingga menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Untuk tingkat Perguruan Tinggi, di masa Orde Baru substansi pendidikan kewarganegaraan diberikan melalui mata kuliah Kewiraan yang lebih menekankan pada PPBN (Pendidikan Pendahuluan Bela Negara).

Dengan keluarnya Keputusan Dirjen Dikti No. 267/DIKTI/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum, sebutan MKU diganti dengan MKPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian) dan substansi mata kuliah Ke-wira-an direvisi dan selanjutnya namanya diganti menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Substansi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan makin disempurnakan dengan keluarnya Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/2002 dan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

2. Materi Pokok Pendidikan Kewarganegaraan

Seperti diketahui, materi pokok kuliah Kewiraan ialah Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Politik dan Strategi Nasional (Polstranas), Politik dan Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional (Polstrahan-kamnas) dan Sistim Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang lebih dititik beratkan pada PPBN. Setelah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan, materi kajian beberapa kali mengalami perubahan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 obyek pembahasan Pendidikan kewarganegaraan ialah:

1. Filsafat Pancasila
2. Identitas Nasional

Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi

3. Negara dan Konstitusi
4. Demokrasi Indonesia
5. HAM dan *Rule of Law*
6. Hak dan Kewajiban Warga Negara
7. Geopolitik Indonesia
8. Geostrategi Indonesia

Sebelumnya objek pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No.267/Dikti/Kep/2000 pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, mencakup:
 - a. Hak dan kewajiban warga Negara.
 - b. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.
 - c. Demokrasi Indonesia.
 - d. Hak asasi manusia.
2. Wawasan nusantara.
3. Ketahanan nasional.
4. Politik dan strategi nasional.

Di dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 151 / DIKTI / Kep / 2000, objek pembahasan dari Pendidikan Kewarganegaraan, meliputi pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup:
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara
3. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
4. Demokrasi Pancasila
5. Hak Asasi manusia
6. Wawasan Nusantara

7. Ketahanan Nasional
8. Politik Strategi Nasional

Berbeda halnya dengan **Zamrozi (2003)**, ia menyodorkan materi utama PKn, adalah sebagai berikut:

1. Kajian berbagai konsep yang bersifat universal, seperti HAM, Demokrasi, *Open Society*, Order Politik;
2. Sistem dan sejarah politik Indonesia, seperti Pancasila dan UUD-1945 berikut sejarah dan situasi kelahirannya;
3. Bentuk pemerintahan dan sistem politik Indonesia;
4. Warga negara sebagai aktor utama dan hak-hak politiknya;
5. *Civic education*, politik, pemerintahan, demokrasi yang ditinjau dari persepektif hukum islam

Materi pokok yang disampaikan oleh **Zamrozi** tersebut, didasarkan kepada *Civic education* di era globalisasi, yang mempunyai model *Campus Based Civic Education* (CBCE), yakni *civic education* yang tidak hanya terbatas pada perkuliahan semata, akan tetapi sudah bersinergi dengan pengabdian masyarakat. Dalam pandangan **Zamrozi**, materi PKn yang baik adalah apa yang ada dalam aspek kehidupan warga negara itu sendiri. Hal tersebut berarti bahwa, PKn harus dapat menyajikan realitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakupi kehidupan masyarakat, politik dan pemerintahan.

Pengharapan kepada model CBCE, adalah menumbuhkan karakter warga negara yang baik, yang merupakan tujuan universal yang ingin dicapai dari pendidikan kewarganegaraan di negara-negara manapun di dunia. Meskipun terdapat ragam *nomenklatur* pendidikan kewarganegaraan di sejumlah negara (**Kerr, 1999; Cholisin, 2004; Samsuri, 2004, 2009**) menunjukkan bahwa pembentukan

karakter warga negara yang baik tidak bisa dilepaskan dari kajian pendidikan kewarganegaraan itu sendiri.

Sebagai contoh, di Kanada pembentukan karakter warga negara yang baik melalui pendidikan kewarganegaraan diserahkan kepada pemerintah negara-negara bagian. Di negara bagian Alberta (Kanada) kementerian pendidikannya telah memberlakukan kebijakan pendidikan karakter bersama-sama pendidikan karakter melalui implementasi dokumen *The Heart of the Matter: Character and Citizenship Education in Alberta Schools* (2005).

Dalam konteks Indonesia, di era Orde Baru pembentukan karakter warga negara nampak ditekankan kepada mata pelajaran seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP) maupun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bahkan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Di era pasca-Orde Baru, kebijakan pendidikan karakter pun ada upaya untuk "menitipkannya" melalui Pendidikan Kewarganegaraan di samping Pendidikan Agama.

2. Landasan Ilmiah Pendidikan Kewarganegaraan

Pokok bahasan Pendidikan Kewarganegaraan meliputi hubungan antara warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara, yang semua itu berpijak pada budaya bangsa. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara serta membentuk sikap dan perilaku yang cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa yang calon sarjana/ilmuan warga negara kesatuan republik indonesia yang sedang mengkaji dan akan menguasai IPTEK dan seni. Sebab kualitas warga negara yang baik adalah sangat ditentukan terutama oleh keyakinan dan

sikap hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disamping derajat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajarinya.

Setiap ilmu harus memenuhi syarat-syarat ilmiah, yaitu berobjek, mempunyai metode, sistematis dan bersifat universal. Objek pengetahuan ilmu yang ilmiah itu harus jelas baik material maupun formalnya. Objek material adalah bidang sasaran yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu. Sedang objek formal sudut pandang tertentu yang dipilih atau yang dijadikan ciri untuk membahas objek material tersebut.

Objek material dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan warga negara baik yang empirik maupun yang non empirik, yang berupa wawasan, sikap dan perilaku warga negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedang *objek formalnya* adalah mencakup dua segi, yaitu: Segi hubungan antara warga negara dengan negara (termasuk hubungan antara warga negara); Segi pembelaan negara;

Pendidikan Kewarganegaraan (Kewiraan) disejajarkan *Civics Education* yang dikenal di berbagai Negara. Sebagai bidang studi ilmiah Pendidikan Kewarganegaraan bersifat interdisipliner bukan monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu Kewarganegaraan ini diambil dari berbagai disiplin ilmu. Maka dalam upaya pembahasan dan pengembangannyapun perlu dibantu oleh disiplin ilmu-ilmu yang lain seperti: ilmu hukum, ilmu politik, sosiologi, administrasi negara, ilmu ekonomi pembangunan, sejarah perjuangan bangsa dan ilmu filsafat.

3. Landasan Ideal Pendidikan Kewarganegaraan

Landasan ideal Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) yang sekaligus menjadi jiwa dikembangkannya Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat menjiwai semua konsep ajaran Kewarganegaraan, yang dalam sistematikanya dibedakan atas tiga hal, yaitu: Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai ideologi negara. Ketiga hal ini hanya dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan sebagai kesatuan. Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar pemikiran tindakan negara dan menjadi sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara pola pelaksanaannya terpancar dalam empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, dan selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai strategi pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara.

Pokok pikiran pertama (dalam kesatuan organis) merupakan landasan dirumuskannya wawasan nusantara, dan pokok pikiran kedua, yaitu pokok pikiran keadilan sosial yang berfungsi sebagai tujuan negara (dalam kesatuan organis) merupakan tujuan wawasan nusantara.

Tujuan negara dijabarkan langsung dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV, yaitu tujuan berhubungan dengan segi keamanan dan segi kesejahteraan dan tujuan berhubungan dengan segi ketertiban dunia. Berdasarkan landasan itu maka wawasan nusantara pada dasarnya adalah sebagai perwujudan nilai sila-sila Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya. Perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila terkandung juga dalam wawasan nusantara, demi terwujud-

PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN

nya ketahanan nasional. Dengan demikian ketahanan nasional itu disusun dan dikembangkan juga tidak boleh lepas dari wawasan nusantara. Perwujudan nilai-nilai Pancasila mencakup lima bidang kehidupan nasional, yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan landasan, yang disingkat dengan (Poleksosbud Hankam), yang menjadi dasar pemerintahan ketahanan nasional. Dari lima bidang kehidupan nasional itu bidang ideologilah yang menjadi landasan dasar, berupa Pancasila sebagai pandangan hidup yang menjiwai empat bidang yang lainnya.

Dasar pemikiran ketahanan nasional di samping lima bidang kehidupan nasional tersebut yang merupakan aspek sosial pancagatra didukung pula adanya dasar pemikiran aspek alamiah triagatra. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kesatuan konsep-konsep dasar yang memberikan arah dan tujuan menuju pencapaian cita-cita bangsa dan negara. Cita-cita bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila itu terpancar melalui alinea ke dua Pembukaan UUD 1945, merupakan cita-cita untuk mengisi kemerdekaan, yaitu: bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bersatu merupakan bekal untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur, dengan sistem berdaulat.

Sebagai perbandingan, di beberapa negara juga dikembangkan materi Pendidikan Umum / *General Education* / *Humanities*) sebagai pembekalan nilai yang mendasari sikap dan perilaku warga negaranya. Amerika Serikat: *History, Humanity, dan Philosophy*. Jepang: *Japanese History, Ethics, dan Philosophy*; Filipina: *Philipino, Family Planning, Taxation and Land Reform, the Philippine New Constitution, dan studi of Human Rights*.

B. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No. 267 / Dikti / 2000, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah:

- 1) *Tujuan umum*; Memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar dapat menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara;
- 2) *Tujuan khusus*
 - a) Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara Republik Indonesia yang terdidik dan bertanggungjawab.
 - b) Agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggungjawab yang berlandaskan Pancasila, wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
 - c) Agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Tujuan *civic education* secara praktis di atur di dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 151 / DIKTI / Kep / 2000, dalam Pasal 3 dari keputusan tersebut, dinyatakan bahwa:

Pendidikan Kewarganegaraan dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan

PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN

antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh negara dan bangsa.

Kemudian dalam Pasal 4 dari keputusan tersebut, dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi secara prinsipil bertujuan untuk:

1. Dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhs sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggungjawab terhadap diri, lingkungan, bangsa dan negaranya;
2. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak di atas dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional secara kritis dan bertanggung jawab;
3. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban, bagi nusa dan bangsa

Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No. 43 / Dikti / Kep / 2006, Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi, misi dan kompetensi sebagai berikut:

1. Visi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya dan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur;

2. Misi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi membantu mahasiswa memantapkan kepribadian agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni yang dimiliki dan rasa tanggungjawab serta memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;

Maka dengan demikian, kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadilan. Selain itu kompetensi yang diharapkan adalah agar mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. (Kaelan, 2007, *op cit*: 1-2).

Dari visi dan misi tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa tujuan dari *civic education* adalah memupuk kesadaran bela negara dan berpikir komprehensif integral di kalangan mahasiswa dalam rangka Ketahanan Nasional sebagai Geostrategi Indonesia, dengan didasari: kecintaan kepada tanah air; kesadaran bergangsa dan bernegara; memupuk rasa persatuan dan kesatuan; keyakinan akan ketangguhan pancasila; rela berkorban demi bangsa dan negara. Maka dengan demikian, melalui pendidikan kewarganegaraan mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara berkesinambungan dan konsisten cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan UUD-1945.

C. Kompetensi yang Diharapkan

Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur yang berlangsung sejak tahun 1945 secara tak terduga berakhir pada tahun 1991. Hal ini ditandai dengan beberapa momentum yang terjadi di negara-negara eks-komunis seperti digulingkannya diktator-diktator di Rumania, Hungaria, dan Bulgaria, dirobohnya Tembok Berlin, dan yang paling menentukan adalah runtuhnya Uni Soviet, negara sentral komunisme, pada tahun 1991.

Perang Dingin yang berlangsung selama beberapa dekade telah memanaskan suhu dunia dan menciptakan sebuah medan pertempuran politis, ideologis, kultural, dan militeristik. Namun setelah perang tersebut berakhir, dunia seolah mengalami kevakuman. Kemunculan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adikuasa yang selama Perang Dingin yang mempromosikan liberalisme dan kapitalisme secara psikologis menempatkannya sebagai satu-satunya yang dapat mengatur dunia tanpa perlawanan dari negara manapun. Pasca Perang Dingin, Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya dengan gencar mengampanyekan demokrasi, penegakan HAM, dan sistem pasar bebas ke negara-negara eks-komunis dan Dunia Ketiga, sebagai 'pengisi kevakuman' pasca Perang Dingin.

Namun pada praktiknya, kampanye tersebut menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat internasional manakala Amerika Serikat memaksakan kehendaknya sendiri dan menerapkan standar ganda. Hal ini dapat dengan mudah kita lihat pada perlakuannya terhadap Israel, Irak, Iran, dan Korea Utara. Isu-isu globalisasi yang mencakup HAM, demokrasi, liberalisasi, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup kerap kali digunakan untuk menyudutkan dan mendiskreditkan bangsa dan negara lain.

Bagian Empat

IDENTITAS NASIONAL

A. Pengantar Identitas Nasional

1. Pengertian Identitas Nasional

Situasi dan kondisi masyarakat kita dewasa ini menghadapkan kita pada suatu keprihatinan dan sekaligus juga mengundang kita untuk ikut bertanggung jawab atas mosaik Indonesia yang retak bukan sebagai ukiran melainkan membelah dan meretas jahitan busana tanah air, tercabik-cabik dalam kerusakan yang menghilangkan keindahannya. Untaian kata-kata dalam pengantar sebagaimana tersebut merupakan tamsilan bahwasannya Bangsa Indonesia yang dahulu dikenal sebagai "*het zachste volk ter aarde*" dalam pergaulan antar bangsa, kini sedang mengalami tidak saja krisis identitas melainkan juga krisis dalam berbagai dimensi kehidupan yang melahirkan instabilitas yang berkepanjangan semenjak reformasi digulirkan pada tahun 1998. (Koento W, 2005).

Kata identitas berasal dari bahasa Inggris *Identity* yang memiliki pengertian harafiah ciri-ciri, *tanda-tanda atau jati diri yang melekat*

pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dalam term antropologi identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Mengacu pada pengertian ini identitas tidak terbatas pada individu semata tetapi berlaku pula pada suatu kelompok. Sedangkan kata 'nasional' merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok (*colective action*) yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Kata nasional sendiri tidak bisa dipisahkan dari kemunculan konsep nasionalisme.

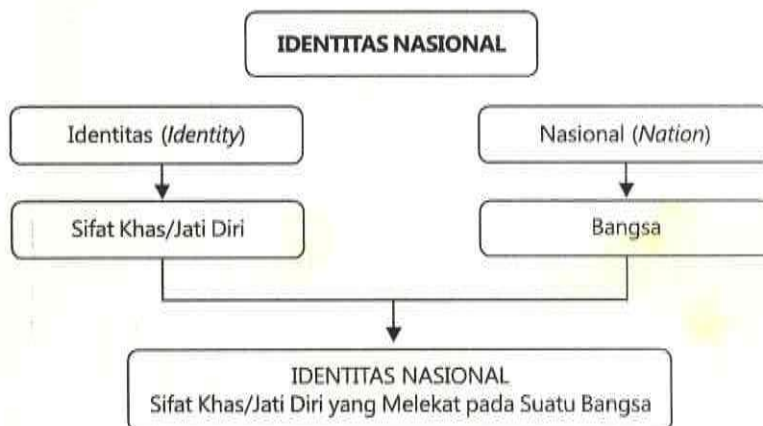
Menurut **Soemarno Soedarsono**, identitas nasional (karakter bangsa) tersebut tampil dalam tiga fungsi, yaitu:

1. sebagai penanda keberadaan atau eksistensinya. Bangsa yang tidak mempunyai jati diri tidak akan eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa ini. Hal ini tercermin dalam kondisi bangsa pada umumnya dan kondisi ketahanan bangsa pada khususnya; dan
3. sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia.

Karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi dibentuk dan dibangun secara sadar dan sengaja, berdasarkan jati diri masing-masing. Telah menjadi suatu kemahfuman bahwa suatu bangsa yang

terdiri atas manusia-manusia yang dalam peradabannya senantiasa bergerak dan berinteraksi dengan bangsa lain melalui segala identitasnya masing-masing, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi jika suatu bangsa hendak terus berkarakter maka bangsa tersebut harus dapat mempertahankan identitas nasionalnya sebagai penyanggah untuk kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menghadapi kekuatan-kekuatan luar. Sebab kalau tidak, negara itu akan mati.

Tanda-tanda suatu negara akan mati, menurut **Mahatma Gandhi** (*founding fathers* bangsa India) dalam teori *seven deadly seans*-nya (tujuh dosa yang dapat mematikan suatu negara), yakni apabila telah bertumbuhkembangnya budaya, nilai-nilai dan perilaku "kekayaan tanpa bekerja" (*wealth without work*), "kesenangan tanpa hati nurani" (*pleasure without conscience*), "pengetahuan tanpa karakter" (*knowledge without character*), "bisnis tanpa moralitas" (*business without morality*), "ilmu tanpa kemanusiaan" (*science without humanity*), agama tanpa pengorbanan (*religion without sacrifice*), dan "politik tanpa prinsip" (*politics without principle*).



2. Unsur-Unsur Identitas Nasional

Identitas Nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan dan bahasa.

- a. **Suku Bangsa:** adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa.
- b. **Agama:** bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Agama Kong Hu Cu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara namun sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan.
- c. **Kebudayaan,** adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.
- d. **Bahasa:** merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbitrer dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia.

Dari unsur-unsur Identitas Nasional tersebut di atas dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian sebagai berikut:

- a. **Identitas Fundamental**; yaitu Pancasila yang merupakan Falsafah Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Negara.
- b. **Identitas Instrumental** yang berisi UUD 1945 dan Tata Perundangannya, Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan "Indonesia Raya".
- c. **Identitas Alamiah** yang meliputi Negara Kepulauan (archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya dan agama serta kepercayaan (agama).

B. Keterkaitan Globalisasi dengan Identitas Nasional

Adanya Era Globalisasi dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Era Globalisasi tersebut mau tidak mau, suka atau tidak suka telah datang dan menggeser nilai-nilai yang telah ada. Nilai-nilai tersebut baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Ini semua merupakan ancaman, tantangan dan sekaligus sebagai peluang bagi bangsa Indonesia untuk berkreasi, dan berinovasi di segala aspek kehidupan.

Di Era Globalisasi pergaulan antar bangsa semakin ketat. Batas antar negara hampir tidak ada artinya, batas wilayah tidak lagi menjadi penghalang. Di dalam pergaulan antar bangsa yang semakin kental itu akan terjadi proses akulturasi, saling meniru dan saling mempengaruhi antara budaya masing-masing. Yang perlu kita cermati dari proses akulturasi tersebut apakah dapat melunturkan tata nilai yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Lunturnya tata nilai tersebut biasanya ditandai oleh dua faktor yaitu:

- a. Semakin menonjolnya sikap individualistis yaitu mengutamakan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum, hal ini bertentangan dengan azas gotong-royong.
- b. Semakin menonjolnya sikap materialistis yang berarti harkat dan martabat kemanusiaan hanya diukur dari hasil atau keberhasilan seseorang dalam memperoleh kekayaan. Hal ini bisa berakibat bagaimana cara memperolehnya menjadi tidak dipersoalkan lagi. Bila hal ini terjadi berarti etika dan moral telah dikesampingkan.

Dengan adanya globalisasi, intensitas hubungan masyarakat antara satu negara dengan negara yang lain menjadi semakin tinggi. Dengan demikian kecenderungan munculnya kejahatan yang bersifat transnasional menjadi semakin sering terjadi. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain terkait dengan masalah narkoba, pencucian uang (*money laundering*), peredaran dokumen keimigrasian palsu dan terorisme. Masalah-masalah tersebut berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa yang selama ini dijunjung tinggi mulai memudar. Hal ini ditunjukkan dengan semakin merajalelanya peredaran narkoba dan psikotropika sehingga sangat merusak kepribadian dan moral bangsa khususnya bagi generasi penerus bangsa. Jika hal tersebut tidak dapat dibendung maka akan mengganggu terhadap ketahanan nasional di segala aspek kehidupan bahkan akan menyebabkan lunturnya nilai-nilai identitas nasional.

C. Paham Nasionalisme Kebangsaan

Dalam perkembangan peradaban manusia, interaksi sesama manusia berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks dan rumit. Dimulai dari tumbuhnya kesadaran untuk menentukan nasib sendiri. Di kalangan bangsa-bangsa yang tertindas kolonialisme dunia, seperti

Indonesia salah satunya, hingga melahirkan semangat untuk mandiri dan bebas untuk menentukan masa depannya sendiri. Dalam situasi perjuangan perebutan kemerdekaan, dibutuhkan suatu konsep sebagai dasar pembenaran rasional dari tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri yang dapat mengikat keikutsertaan semua orang atas nama sebuah bangsa. Dasar pembenaran tersebut, selanjutnya mengkristal dalam konsep paham ideologi kebangsaan yang biasa disebut dengan nasionalisme. Dari sanalah kemudian lahir konsep-konsep turunannya seperti bangsa (*nation*), negara (*state*), dan gabungan keduanya yang menjadi konsep negara-bangsa (*nation-state*) sebagai komponen-komponen yang membentuk *Identitas Nasional atau Kebangsaan*. Sehingga dapat dikatakan bahwa *Paham Nasionalisme atau Paham Kebangsaan* adalah sebuah situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkeraman kolonial. Semangat nasionalisme diharapkan secara efektif oleh para penganutnya dan dipakai sebagai metode perlawanan dan alat identifikasi untuk mengetahui siapa lawan dan kawan.

1. Paham Nasionalisme Kebangsaan sebagai Paham yang Mengantarkan pada Konsep Identitas Nasional

Paham Nasionalisme atau paham Kebangsaan terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkeraman kolonial. Semangat nasionalisme dihadapkan secara efektif oleh para penganutnya dan dipakai sebagai metode perlawanan, seperti yang disampaikan oleh *Larry Diamond* dan *Marc F Plattner*, para penganut nasionalisme dunia ketiga secara khas menggunakan retorika anti kolonialisme dan anti imperialisme. Para

pengikut nasionalisme tersebut berkeyakinan bahwa persamaan cita-cita yang mereka miliki dapat diwujudkan dalam sebuah identitas politik atau kepentingan bersama dalam bentuk sebuah wadah yang disebut bangsa (*nation*). Dengan demikian bangsa atau nation merupakan suatu badan wadah yang di dalamnya terhimpun orang-orang yang mempunyai persamaan keyakinan dan persamaan lain yang mereka miliki seperti ras, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Unsur persamaan tersebut dapat dijadikan sebagai identitas politik bersama atau untuk menentukan tujuan organisasi politik yang dibangun berdasarkan geopolitik yang terdiri atas populasi, geografis dan pemerintahan yang permanen yang disebut negara atau state.

2. Pemberdayaan Identitas Nasional

Dalam rangka pemberdayaan Identitas Nasional kita, perlu ditempuh melalui revitalisasi Pancasila. Revitalisasi sebagai manifesatsi Identitas Nasional mengandung makna bahwa Pancasila harus kita letakkan dalam keutuhannya dengan Pembukaan, dieksplorasikan dimensi-dimensi yang melekat padanya, yang meliputi:

- a. *Realitas*: dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikonsentrasikan sebagai cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kampus utamanya, suatu rangkaian nilai-nilai yang bersifat *sein im sollen* dan *das sollen im sein*.
- b. *Idealitas*: dalam arti bahwa idealisme yang terkandung di dalamnya bukanlah sekedar utopi tanpa makna, melainkan di objektivasikan sebagai "kata kerja" untuk membangkitkan gairah dan optimisme para warga masyarakat guna melihat hari depan secara prospektif, menuju hari esok yang lebih baik, melalui seminar atau gerakan dengan tema "Revitalisasi Pancasila".

- c. *Fleksibilitas*: dalam arti bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan "tertutup" menjadi sesuatu yang sakral, melainkan terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan jaman yang terus-menerus berkembang. Dengan demikian tanpa kehilangan nilai hakikinya Pancasila menjadi tetap aktual, relevan serta fungsional sebagai tiang-tiang penyangga bagi kehidupan bangsa dan negara dengan jiwa dan semangat "Bhinneka Tunggal Ika", sebagaimana dikembangkan di Pusat Studi Pancasila (di UGM), Laboratorium Pancasila (di Universitas Negeri Malang).

D. Identitas Nasional Indonesia

Presiden **Soekarno**, kerap menegaskan wasiatnya bahwa tugas berat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan adalah mengutamakan pelaksanaan *nation and character building*. Bahkan Bung Karno mewanti-wanti, jika pembangunan karakter ini tidak berhasil, bangsa Indonesia hanya akan menjadi bangsa kuli. Identitas/kepribadian bangsa Indonesia yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang halus budinya, sopan dalam sikapnya, santun dalam tindaknya, begitu bertoleransi, memiliki solidaritas sosial yang peka, dan nasionalisme yang tinggi, lambat laun saat ini telah begitu pudar dikikis oleh derasnya arus globalisasi dan kapitalisme yang memberikan ajaran untuk individualis, materialis, bebas sebebas-bebasnya, konsumtif, pragmatis dan praktis/*instant*.

Saat ini manusia Indonesia cenderung kurang tulus dan suka menggunakan kedok, berbeda antara perkataan dan perbuatan, tidak bisa memegang janji, dan menghindari tanggung jawab. Nilai-nilai budaya, dan perilakunya munafik dan berorientasi pada keduniaan serta materialisme semata. Sementara itu, korupsi yang terus meraja-

Iela juga telah menggerus kesanggupan kita untuk tumbuh, berkembang, dan berdaya saing. Kalau untuk korupsi ini sampai-sampai ada guyonan di tengah masyarakat bahwa “setan tidak perlu lagi menggoda dan mengajari bangsa Indonesia untuk melakukan korupsi, sebab justru setan yang harus belajar mengenai jurus-jurus (modus operandi) korupsi dari bangsa Indonesia dan kemudian digunakan untuk menggoda bangsa atau negara lain”.

Sikap dan perilaku kurang tulus juga telah menghinggapi negeri ini yang dapat terlihat pada kondisi saat ini, dimana setiap jasa ataupun jabatan selalu diukur dengan materi dan fasilitas. Kalau anggota legislatif gaji dan fasilitasnya harus segini, untuk pejabat eksekutif pendapatan dan fasilitasnya harus sebesar ini, untuk aparatur penegak hukum (yudkatif), penghasilan dan fasilitasnya harus senilai ini. Alasannya , menjadi pejabat negara adalah pekerjaan yang sangat berat. Coba mana berat dengan pekerjaan para *founding fathers* dulu!.

Sikap kurang tulus itu kemudian meluas menjadi hipokrasi umum yang berupa rendahnya disiplin dan kepatuhan terhadap hukum, dan sikap masa bodoh terhadap kepentingan bersama. Dalam kondisi yang lebih buruk lagi, kepentingan kedaerahan, kelompok, dan golongan telah melunturkan cita-cita bersama sebagai bangsa. Salah satu contoh konkritnya, sebagian besar anggota legislatif yang terpilih pada Pemilu 2009 sudah mangkir dari sidang sehingga membuat rapat tidak bisa dilaksanakan lantaran tidak tecapainya kuorum.

Sang guru bangsa **Ki Hajar Dewantara** telah menggariskan bahwa “*Ing Ngarso Sung Tulodho*” (di depan memberi suri tauladan). Kalau yang di depan negeri ini memberi suri tauladan seperti itu tadi, maka jangan heran kalau yang di tingkat akar rumput banyak *psikopat*. Terlebih kalau kita memandang bagaimana peredaran

narkoba di negeri ini yang jelas selain telah merusak kepribadian dan moral bangsa juga telah membuat suram masa depan generasi penerus bangsa. Di dalam kehidupan pendidikan pun banyak bertebaran "sekolah praktis" yang dengan begitu instan mencetak gelar akademis, mulai dari gelar sarjana (S-1), master (S-2) hingga doktor (S-3) sehingga karakter yang bertumbuh kembang adalah instan dan pragmatis pula.

Dengan adanya globalisasi, intensitas hubungan masyarakat antar negara yang sangat longgar sehingga rentan sekali mempengaruhi nilai-nilai budaya bangsa sehingga krisis akhlak dan moral bertambah akut dan meluas.

Memang di satu sisi, kita tidak patut untuk menutup diri dari globalisasi dengan segala keuntungannya seperti dalam putaran ilmu, teknologi dan informasi dunia, namun di sisi lain kita harus mempertahankan karakter kita sebagaimana yang telah dirumuskan dalam '*philosophie grondslag*' bangsa kita. Dalam menghadapi ancaman negatif globalisasi itu sudah semestinya bangsa Indonesia mulai dari elit sampai ke rakyatnya untuk kembali memposisikan dirinya kepada sifat aslinya, agar tidak gampang untuk diintervensi oleh negara lain dan tidak dikatakan sebagai bangsa yang tidak memiliki prinsip dan tersesat dalam arus lautan globalisasi.

Sifat asli itu terletak pada hati bukan pada tampilan luar. Namun apabila kita memandang arah pembangunan negara kita begitu terlihat yang dikedepankan adalah pembangunan fisik dan ekonomi bukan pembangunan jiwa, padahal lagu Indonesia Raya telah mengamanatkan untuk membangun jiwa terlebih dulu baru kemudian badan ("*...Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya...*"). Padahal tolok ukur kemajuan suatu bangsa tidak hanya dilihat dari kecanggihan teknologi ataupun pembangunan

PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN

fisiknya semata. Akan tetapi yang terpenting ada pada semangatnya, semangatnya untuk bekerja bagi bangsa dengan bekerja secara keras, secara cerdas, dan secara ikhlas, sebagaimana yang pernah dikumandangkan oleh Bung Karno: *"Beri aku seribu orang, dan aku akan menggerakkan Gunung Semeru! Beri aku sepuluh pemuda yang membara cintanya kepada Tanah Air dan aku akan mengguncang dunia!"* (Orasi Bung Karno, 1920).

Identitas nasional Indonesia dapat dirumuskan pembidangnya dalam tiga bidang sebagai berikut:

1. Identitas fundamental, yakni Pancasila sebagai filsafat bangsa, hukum dasar, pandangan hidup, etika politik, paradigma pembangunan.
2. Identitas instrumental, yang meliputi UUD 1945 sebagai konstitusi negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, Sang Saka Merah Putih sebagai bendera negara, *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan negara, dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan.
3. Identitas alamiah yang meliputi Indonesia sebagai negara kepulauan dan kemajemukan terhadap sukunya, budayanya, agamanya.

Pancasila sebagai situasi kejiwaan dan karakter bangsa Indonesia yang mengandung kesadaran, cita-cita, hukum dasar, pandangan hidup telah menjadi nilai, asas, norma bagi sikap tindak bagi penguasa dan rakyat Indonesia. Satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila ini hendaknya dibudayakan dalam kehidupan anak bangsa di seluruh penjuru Nusantara Indonesia mulai dari diri sendiri dan mulai hari ini yang kemudian diteruskan ke lingkungan keluarga, lalu dapat meluas ke lingkungan masyarakat

(tetangga, lingkungan kerja) yang selanjutnya dapat tercermin ke lingkungan bangsa dan negara. Dengan begitu, kita akan berkarakter dan berjati diri sebagai bangsa dan negara yang beradab dan bermaslahat di muka bumi, menjadi bangsa dan negara yang bermartabat, yang menjadi rahmat serta penuh kasih bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi lingkungan alamnya, maupun bagi dunia internasional sebagaimana yang telah diletakan dasarnya oleh para pendiri negara kita.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional bagi bangsa Indonesia dalam bersikap tindak. UUD 1945 dalam eksistensinya telah mengadakan pembagian tugas bagi pihak-pihak yang terkait dalam sistem politik di Indonesia dan sekaligus pula telah memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan itu serta juga telah menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36 UUD 1945) Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan berasal dari bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu yang akhirnya menjadi bahasa persatuan, hal ini karena memang bahasa Melayu jauh dari sebelum Indonesia merdeka telah digunakan sebagai bahasa dalam interaksi antar suku yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara dan telah pula menjadi bahasa niaga yang menghubungkan antar pedagang yang berniaga di sepanjang gugusan kepulauan Nusantara. Keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ini bukan berarti menenggelamkan bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang jumlahnya tidak kurang dari 300-an dialek bahasa daerah. Bahasa-bahasa daerah tetap dipelihara sebagai kearifan lokal dan bahasa Indonesia berperan sebagai pemersatunya.

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A Amandemen Kedua UUD 1945).

Garuda Pancasila sebagai lambang negara bangsa Indonesia melambangkan kemegahan negara Indonesia. Adapun bentuk gambar lambang Garuda Pancasila ini adalah buah karya anak bangsa yang **Sultan Hamid II** dari Kesultanan Pontianak. Seekor burung Garuda yang berdiri tegak, yang kepalanya menghadap ke kanan dengan mengembangkan sayapnya ke kanan dan ke kiri. Pada sayap kanan dan sayap kirinya berelar 17 helai, dengan ekor berelar 8 helai dan leher yang berelar 45 helai yang menunjuk kepada waktu kemerdekaan bangsa Indonesia 17-8-1945. Pada dadanya digantung sebuah perisai yang dibagi menjadi lima ruang di tengah dan empat di tepi. Bintang cemerlang atas dasar hitam merupakan sinar cemerlang abadi dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Rantai yang terdiri dari pada gelang-gelang persegi dan bundar yang bersambung satu sama lain dalam sambungan yang tiada putusnya adalah lambang perikemanusiaan. Pohon Beringin adalah lambang kebangsaan. Banteng merupakan lambang kedaulatan rakyat. Padi dan kapas adalah lambang kecukupan. Kaki burung mencengkram sebuah pita yang sedikit melengkung ke atas. Pada pita itu tertulis "*Bhinneka Tunggal Ika*" yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua sebagai semboyan negara kita.

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal 35 UUD 1945). Bendera Sang Merah Putih bukan hanya sebagai simbol keindahan belaka, akan tetapi lebih jauh dari situ Merah Putih adalah cerminan jiwa bangsa Indonesia dengan semangatnya yang memerah dan dilandasi dengan hati yang putih.

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B Amandemen Kedua UUD 1945). Lagu kebangsaan "*Indonesia Raya*" buah karya **Wage Rudolf Supratman** ini begitu menggambarkan semangat cinta tanah air dan kegagahan serta kebenaran. Lagu ini pertama kali

diperdengarkan dalam forum resmi yakni pada saat sebelum Kongres Pemuda II (yang merumuskan Sumpah Pemuda) ditutup pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada peristiwa itu lagu *Indonesia Raya* dimainkan dengan biola tanpa syair. Lagu tersebut disambut dengan tetesan air mata dan semangat menggelora demi Indonesia Merdeka.

D. Identitas Nasional dan Integrasi Nasional

Integrasi nasional merupakan interaksi utuh segenap suku-suku bangsa di seluruh penjuru Nusantara. Penyatupaduan secara utuh ini pertama kali telah diikrarkan bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda, yang kemudian mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945. Indonesia sejak 1945 telah membuktikan kepada dunia, walaupun terdiri dari berbagai suku dan wilayah kepulauan yang terpisah-pisah oleh lautan, tapi Indonesia tetaplah Indonesia dalam satu kesatuan yang utuh sebagai negara.

Adapun yang menjadi perekat bangsa Indonesia sehingga tetap bertahan sampai dengan saat ini tidak lain besar pengaruhnya karena ditunjang oleh identitas nasional yang memang memiliki karakter yang dalam. Pancasila telah terbukti berperan sebagai pandangan hidup yang satu bagi bangsa Indonesia dalam bentuk kesadaran, cita-cita moral, cita-cita hukum dengan satu kejiwaan nasionalisme Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat) juga telah memberikan pedoman/patokan yang satu bagi sikap tindak segenap bangsa Indonesia. Begitupun juga dengan apa yang dialami oleh bahasa Indonesia, bahasa Indonesia telah menjadi sarana interaksi yang satu bagi segenap bangsa Indonesia. Demikian juga terhadap Garuda Pancasila sebagai lambang negara, sang saka Merah Putih sebagai bendera negara dan Indone-

sia Raya sebagai lagu kebangsaan telah menjadi simbol kejiwaan yang satu bagi bangsa Indonesia.

Sebaliknya identitas nasional juga sangat mengharapkan bentuk integrasi nasional yang kokoh. Dalam menopang kekokohan integrasi nasional membutuhkan kekuatan dari integrasi sosial dan integrasi kebudayaan. Integrasi sosial merupakan upaya untuk menyatupadukan masyarakat yang beranekaragam, berlainan latarbelakangnya dan masing-masing memiliki jati diri dari sukunya menjadi suatu masyarakat baru dan besar yang saling berasimilasi. Sementara integrasi kebudayaan merupakan sarana asimilasi budaya atau penyesuaian antar budaya sehingga dapat menjadi suatu sistem budaya yang selaras.

Dari cerminan kedua bentuk integrasi penyokong keberadaan integrasi nasional itu, maka dapat dirumuskan bahwasanya integrasi nasional merupakan penyatupaduan bagian-bagian yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan yang utuh dengan tetap memelihara keanekaragaman dan kearifan-kearifan budaya lokal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa eksistensi identitas nasional sangat ditentukan oleh kekuatan integrasi nasional sementara integrasi nasional memerlukan identitas nasional sebagai sarana rekayasa sosial dan politik dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang diinginkan.

Selain itu identitas nasional tidak akan memberikan kekuatan kepada integrasi nasional apabila kesadaran masyarakatnya sangat rendah. **Driyarkara** telah merumuskan bahwa kesadaran itu adalah seperti *ein ruf aus mir und doch uber mich*, seperti panggilan yang timbul dari aku, tetapi mengatasi diriku.

Kesadaran terhadap identitas nasional pada hakikatnya merupakan kesadaran tentang diri kita sendiri, di dalam mana kita melihat diri

kita sendiri berhadapan dengan bangsa kita sendiri. Orang yang memiliki kesadaran berarti orang tersebut yakin akan cita-cita kebaikan yang setinggi-tingginya. Keyakinan itulah yang menjadi tempat bagi jalinan nilai-nilai bergumul dalam benak dan sanubari manusia. Orang yang mengalami dan merasakan keyakinan bahwa suatu perbuatan yang konkrit harus dilakukan atau sama sekali tidak boleh dilakukan. Maka, kesadaran terhadap identitas nasional pada hakikatnya merupakan keyakinan akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang identitas bangsanya yang pernah ada, yang ada dan yang akan ada. Selain itu, jalinan nilai-nilai dalam diri manusia itu merupakan refleksi terhadap akibat dari proses interaksi sosial yang kontinyu dan dinamis, dalam rangka memilih arah dalam kehidupan sosial.

Dalam situasi yang konkrit kesadaran terhadap identitas nasional akan menjelma dalam bentuk kepatuhan atau ketaatan terhadap identitas bangsa sendiri. Kepatuhan terhadap identitas bangsa sendiri begitu bergantung pada pertumbuhan akal, kemauan dan rasa seseorang. Ada orang yang sadar terhadap identitas nasionalnya karena takut, ada yang sadar terhadap identitas nasionalnya demi kesedapan hidup bersama, ada yang karena sesuai dengan cita-citanya, ada pula yang karena kepentingan. Namun pada akhirnya konsekuensi psikologis dari adanya kesadaran moral atas identitas nasional ini, bahwa kesadaran itu menggugah timbulnya rasa kebangsaan.

Dengan kesadaran seperti itu, maka secara konkrit dapat dilakukan upaya-upaya kreatifitas bangsa dalam tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Dengan berupaya mengimplementasikan rasa kebangsaan kita yang berwujud nasionalisme atau pengabdian secara total kepada

Indonesia, misalnya dengan membudayakan penggunaan bahasa Indonesia, mempublikasikan pertunjukan-pertunjukan seni budaya bangsa melalui media-media ataupun dengan menggunakan produk hasil karya anak bangsa;

2. dengan memodifikasi kebudayaan Indonesia menjadi sesuatu yang menarik;
3. dengan bersikap selektif dalam menerima pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia.



Bagian Lima

KONSEP DASAR BANGSA DAN NEGARA

A. Konsepsi Negara

1. Pengertian Negara

Negara bersifat abstrak, tidak mempunyai wujud nyata, namun dalam aktivitasnya dapat dirasakan keberadaan dan fungsi negara karena memang pada prinsipnya dalam berbagai bidang kehidupan kita selalu berurusan dengan negara. Istilah negara berasal dari bahasa latin *Status/Stanum* yang berarti menenpatkan dalam keadaan berdiri/ membuat berdiri. Banyak sarjana yang mengemukakan pengertian dan batasan tentang negara, antara lain:

a. **Prof. Mr. R. Kranenburg**

Negara pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang kemudian disebut bangsa.

b. **Logemann**

Negara pada hakekatnya suatu organisasi kekuasaan yang menyatakan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa

- c. **Prof. R. Djoko Soetono,SH**
Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia berada dibawah suatu pemerintahan yang sama
- d. **G. Pringgodigdo,SH**
Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu
- e. **Prof. Farid S.**
Negara adalah Suatu wilayah merdeka yang mendapat pengakuan negara lain serta memiliki kedaulatan.
- f. **Georg Jellinek**
Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
- g. **Georg Wilhelm Friedrich Hegel**
Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal
- h. **Roelof Krannenburg**
Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.
- i. **Roger H. Soltau**
Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
- j. **Prof. R. Djokosoetono**
Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
- k. **Prof. Mr. Soenarko**
Negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.

1. Aristoteles

Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.

2. Sifat Hakekat Negara

Negara sebagai organisasi mempunyai sifat-sifat khusus yang tidak terdapat pada organisasi lainnya. Sifat negara antara lain:

a. Sifat Memaksa

Negara memiliki sifat memaksa, artinya negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal untuk memaksa warga negaranya guna mengikuti apa yang diinginkan negara. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya ketertiban dalam masyarakat.

b. Sifat Monopoli

Negara mempunyai sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat, artinya untuk kepentingan umum dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak kegiatannya akan di monopoli oleh negara. Sifat monopoli negara ini untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat banyak sesuai bunyi pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

c. Sifat Mencakup Semua

Sifat mencakup semua mengandung arti setiap peraturan perundangan yang dibuat negara berlaku untuk semua warga negara tanpa kecuali.

3. Tujuan Negara

Tujuan negara adalah harapan atau gambaran cita-cita yang ingin dicapai oleh negara. Pendapat para ahli mengenai tujuan negara,

adalah sebagai berikut;

- a. **Dante Alighieri** (1263-1321 M)
Tujuan negara adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia.
- b. **Niccolo Machiavelli**(1429-1527 M)
Tujuan negara adalah untuk membentuk kekuasaan sebesar-besarnya.
- c. **Immanuel Kant** (1724-1804)
Tujuan negara adalah untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan warganya.
- d. **Shang Yang** (428-523 M)
Tujuan negara adalah membentuk kekuasaan sebesar-besarnya.

Hampir semua negara yang ada didunia bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warganegaranya. Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV dan dapat disimpulkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia ada dua macam yaitu:

- a. Tujuan Nasional
 - Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
 - Memajukan kesejahteraan umum
 - Mencerdaskan kehidupan bangsa
- b. Tujuan Internasional
Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

4. Fungsi Negara

Fungsi negara merupakan upaya atau kegiatan negara untuk mencapai harapan atau cita-cita negara sehingga menjadi kenyataan.

Fungsi negara merupakan pelaksanaan dari tujuan negara. Fungsi negara selalu mengalami perubahan, beberapa fungsi minimal yang harus dimiliki oleh negara antara lain:

a. Menjaga keamanan dan ketertiban

Untuk mencapai tujuan negara perlu melakukan pembangunan, pembangunan dapat dijalankan dengan baik jika negara berada dalam keadaan yang aman dan tertib. Oleh karena itu negara harus menjaga keamanan dan ketertiban di negaranya. Keamanan dan ketertiban itu diperlukan untuk mencegah terjadinya pertikaian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa negara harus bertindak sebagai stabilisator guna mendukung pelaksanaan program pembangunan. Untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan maka negara berkewajiban untuk membentuk sistem hukum sehingga akan tercipta suatu pola kehidupan yang tertib dan damai. Jika dalam masyarakat tidak terdapat sistem hukum maka akan terjadi kekacauan.

b. Pertahanan

Pertahanan sangat diperlukan dalam suatu negara untuk menjaga wilayahnya dari serangan musuh baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pertahanan negara merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Pertahanan akan menentukan bertahan atau tidaknya suatu negara. Untuk itulah negara berkewajiban mengadakan sistem pertahanan yang kokoh melalui pengadaan peralatan pertahanan, lengkap dengan personil militer yang berkualitas.

c. Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat

Negara juga harus memperhatikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk

menciptakan sistem perekonomian yang dapat menjamin kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya maka negara harus berperan serta aktif dalam bidang perekonomian.

d. **Menegakkan Keadilan**

Setiap warga negara memiliki harkat, martabat dan kedudukan yang sama. Ini berarti prinsip keadilan harus ditegakkan dalam suatu negara. Negara harus menegakkan sistem hukum untuk mengatur kwhiddupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian akan tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan bermasyarakat yang berkeadilan sosial. Salah satu cara yang harus ditempuh adalah dengan membentuk badan peradilan.

Di Indonesia terdapat 8 fungsi negara, sesuai yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu:

- a. Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Melaksanakan program reformasi dan demokratisasi yang berdasarkan Pancasila
- c. Normalisasi kehidupan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan
- d. Mewujudkan rasa aman dan tentram
- e. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif
- f. Melaksanakan pemilihan umum yang aman, tertib, dan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, sebagai sarana pelaksanaan demokrasi
- g. Menegakkan supremasi hukum dan menjamin terlaksananya peradilan yang bebas

- h. Jaminan hak asasi manusia dalam segala bidang bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Unsur Negara

Negara memiliki unsur yang tidak dimiliki oleh organisasi apapun, secara garis besar unsur negara dikelompokkan menjadi dua bagian:

- a. Unsur yang bersifat konstitutif: Unsur konstitutif merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya suatu negara yaitu *rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat*. Apabila salah satu unsur tersebut tidak ada maka belum dapat dikatakan sebagai suatu negara. Rakyat adalah semua orang yang berada di wilayah suatu negara atau menjadi penghuni negara. Rakyat dapat dibedakan dalam dua kelompok yaitu:
 - 1. Penduduk: Adalah setiap orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah suatu negara dalam waktu cukup lama. Penduduk dibedakan menjadi:
 - a) Warganegara: mereka yang berdasarkan hukum merupakan warga dari suatu negara
 - b) Bukan Warganegara (Orang Asing): mereka yang tidak termasuk sebagai warganegara karena belum memenuhi syarat secara hukum sebagai warga negara untuk menentukan kewarganegaraan seseorang dikenal dua asas:
 - Asas Ius Sanguinis (Asas Keturunan)
Asas ini menetapkan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan. Contoh seseorang dilahirkan di negara X, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan Y, maka anak tersebut merupakan warganegara Y. Jadi kewarganegaraan anak akan mengikuti kewarganegaraan

orangtuanya tanpa memperhatikan tempat dimana anak tersebut dilahirkan.

- Asas *Ius Soli* (asas tempat tinggal)

Kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya, contoh seseorang dilahirkan di negara X, orang tuanya berkewarganegaraan Y, maka anak tersebut berkewarganegaraan X. Jadi kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orangtuanya.

Adanya dua asas tersebut menimbulkan permasalahan yaitu seseorang bisa memperoleh kewarganegaraan rangkap (*bipatride*) atau seseorang seseorang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan (*apatride*). Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia diatur menurut UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006 mencantumkan: "yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara." Lalu siapakah orang-orang bangsa Indonesia asli? Dalam penjelasan atas UU tersebut dinyatakan: Yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia semenjak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri."

2. Bukan Penduduk: Orang yang berada dalam suatu wilayah negara tetapi tidak bermaksud untuk bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah negara yang bersangkutan. Contoh: kita semua adalah rakyat Indonesia karena keluarga kita telah lama bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia. Para

wisatawan asing yang sedang melakukan perjalanan wisata pada objek-objek wisata di Indonesia bukan dalam waktu yang singkat tidak dimaksudkan untuk menetap diwilayah Indonesia.

Unsur konstitutif yang ke dua adalah wilayah, keberadaan wilayah sangat menentukan bagi ada atau tidaknya suatu negara . Ada negara yang memiliki wilayah yang sangat luas seperti Rusia, Indonesia dll. Tetapi sebaliknya ada Negara yang memiliki wilayah yang sangat sempit seperti Singapura. Luas atau sempitnya suatu wilayah bukan suatu yang harus dipersoalkan, yang terpenting adalah suatu Negara harus memiliki wilayah kekuasaan. Wilayah yang dimiliki suatu Negara menunjukkan batas-batas di mana negara yang bersangkutan secara sungguh-sungguh dapat melaksanakan kedaulatan. Pada umumnya wilayah negara meliputi daratan, lautan dan udara.

1. Wilayah Daratan: Batas wilayah daratan harus tegas agar tidak terjadi persengketaan antara negara. Wilayah darat suatu negara dibatasi oleh wilayah daratan atau lautan dari negara lain. Perbatasan antar negara dapat berupa:
 - Perbatasan Alam: Berupa sungai, danau lembah atau pegunungan
 - Perbatasan Buatan: Berupa tiang pancung, pagar tembok, pagar kawat berduri
 - Perbatasan menurut ilmu pasti: Berdasarkan garis lintang dan garis bujur pada peta bumi
2. Wilayah Lautan: Bagian dari laut yang menjadi wilayah suatu negara disebut laut teritorial. Batas laut teritorial pada umumnya 12 mil laut, perairan diluar laut teritorial disebut laut bebas, tidak dikuasai oleh negara manapun.

3. Wilayah Udara: Wilayah udara merupakan bagian wilayah yang paling luas dari suatu negara karena wilayah meliputi udara diatas wilayah darat dan laut teritorial.
4. Wilayah Ekstra Teritorial: Wilayah yang letaknya diluar wilayah negara atau wilayah yang letaknya di negara lain. Contohnya kantor perwakilan diplomatik. Tentang wilayah ekstra teritorial diatur berdasarkan hukum Internasional dan hasil konggres Wina tahun 1815 dan konggres Aachen tahun 1818.

Pemerintah yang berdaulat, merupakan unsur konstitutif yang ketiga dari sebuah Negara. Pengertian pemerintah dapat dibedakan menjadi dua:

1. Pemerintah dalam arti luas

Pemerintah sebagai gabungan dari suatu lembaga kenegaraan atau gabungan seluruh alat perlengkapan negara yang meliputi badan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

2. Pemerintah dalam Arti sempit

Presiden dan para menteri yang merupakan lembaga eksekutif. Dari pengertian tersebut di atas, yang merupakan unsur negara adalah pengertian pemerintah dalam arti luas. Suatu pemerintah harus memiliki kedaulatan dinegaranya yang memiliki kekuasaan tertinggi baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun luar negeri.

- b. Unsur yang bersifat Deklaratif: Pengakuan dari negara lain bukanlah merupakan unsur utama bagi terbentuknya suatu Negara melainkan hanya bersifat menerangkan tentang adanya suatu Negara. Dengan kata lain pengakuan dari Negara lain hanya bersifat *deklaratif*. Unsur ini merupakan sebuah pertanda

bahwa suatu Negara telah diterima sebagai salah satu anggota dalam pergaulan internasional. Meskipun tanpa pengakuan Negara lain asalkan ketiga unsur pokok telah dipenuhi maka suatu negara tetap sah keberadaannya sebagai suatu Negara. Pengakuan atas suatu negara dari negara lain dibedakan menjadi 2 macam:

1. Pengakuan *De Facto*

Pengakuan *de facto* adalah pengakuan berdasarkan kenyataan akan adanya suatu negara. Pengakuan ini diberikan oleh suatu negara berdasarkan kenyataan akan adanya suatu negara. Pengakuan ini diberikan berdasarkan kenyataan bahwa suatu masyarakat telah memenuhi ketiga unsur pokok negara yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Pada dasarnya pengakuan *de facto* adalah hanya bersifat sementara karena pengakuan ini diberikan sambil menunggu perkembangan lebih lanjut, apabila dalam perkembangan ternyata negara menunjukkan kemampuan dan dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana anggota masyarakat Internasional maka akan segera disusul dengan pengakuan *de jure*.

2. Pengakuan *De Jure*

Adalah pengakuan terhadap adanya suatu negara berdasarkan pertimbangan hukum. Dengan memperoleh pengakuan *de jure* maka suatu negara mendapat beberapa hak dan kewajiban untuk diperlakukan dan sekaligus bertindak sebagai sebuah negara yang berdaulat penuh, sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Dengan diberikannya pengakuan *de jure* maka biasanya pengakuan itu dianggap berlaku bukan sejak diberikannya pengakuan *de jure* melainkan sejak berdirinya negara itu secara *de facto*.

Perbedaan pengakuan *de facto* dan *de jure* antara lain:

1. Hanya negara atau pemerintah yang diakui secara *de jure* yang dapat mengajukan klaim atas harta yang berada dalam wilayah negara yang mengakui.
2. Wakil-wakil dari negara yang diakui secara *de facto* secara hukum tidak berhak atas kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik penuh.
3. Pengakuan *de facto* karena sifatnya sementara pada prinsipnya ditarik kembali.
4. Apabila suatu negara berdaulat yang diakui secara *de jure* memberikan kemerdekaan kepada suatu wilayah jajahannya, maka negara yang baru merdeka harus diakui secara *de jure*.

B. Proses Tumbuhnya Negara

Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk sosial memiliki kemauan untuk hidup bersama dengan manusia-manusia lain, terutama dengan manusia-manusia yang sama alat-alat hidupnya, sehingga dapat memunculkan kolektivitas dengan kemauan-kemauan yang kolektif. Dari kemauan-kemauan yang kolektif tersebut maka mudah sekali mengadakan kelompok-kelompok ataupun suku-suku. Atas dasar persamaan, apakah dalam bentuk persamaan asal, bahasa, sejarah, cita-cita maka suku bangsa ataupun beberapa suku bangsa pada akhirnya akan mengalami *resultante* (kesadaran) yakni dalam kesadaran merasa diri sebagai satu bangsa. Sebagaimana dinyatakan oleh **Ernest Renan** bahwa bangsa adalah sebagai kehendak untuk bersatu (*le desir d'être ensemble*).

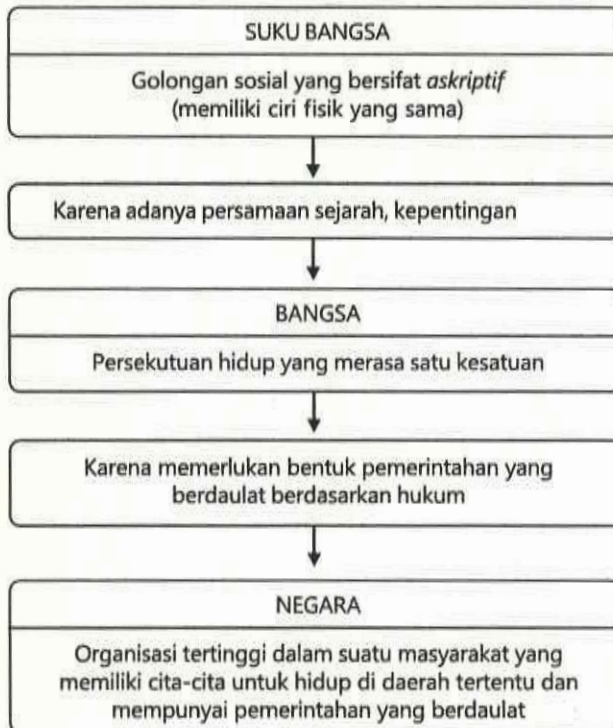
Menurut **Otto Bauer**, bangsa adalah satu persamaan, satu persatuan karakter atau watak yang tumbuh, lahir, terjadi karena

persatuan pengalaman.¹⁰ **Otto Bauer** membantah mutlak perlunya persatuan bahasa, kesamaan agama, kesamaan warna kulit, kesamaan keturunan. Meskipun agamanya, warna kulitnya ataupun bahasanya berbeda-beda, asalkan dalam bentuk persekutuan manusia yang mengalami nasib yang sama selama berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun lamanya maka persamaan nasib itu akan menjelma menjadi suatu watak yang sama. Dari persamaan watak inilah yang nantinya akan menjelma menjadi suatu bangsa.

Pada perkembangan peradaban berikutnya, maka suatu bangsa akan memerlukan suatu bentuk pemerintahan untuk menciptakan dan memelihara ketertiban masyarakat dalam suatu bangsa tersebut. Sebagaimana kita pahami bahwa apabila telah dipenuhinya unsur pemerintahan pada suatu bangsa, maka sudah dekatlah bangsa itu untuk menjelma menjadi suatu negara. Setelah dipenuhinya unsur-unsur negara secara '*de facto*' dan '*de jure*', bersamaan pula dengan pernyataan/proklamasi bangsa tersebut, maka jadilah bangsa itu sebagai bangsa yang menegara. Jadi pada hakikatnya negara merupakan organisasi tertinggi dalam suatu bangsa yang menjaga kedaulatan bangsa dan mengatur ketertiban umum.

10 Soekarno, *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 161.

PROSES BANGSA YANG BERNEGARA



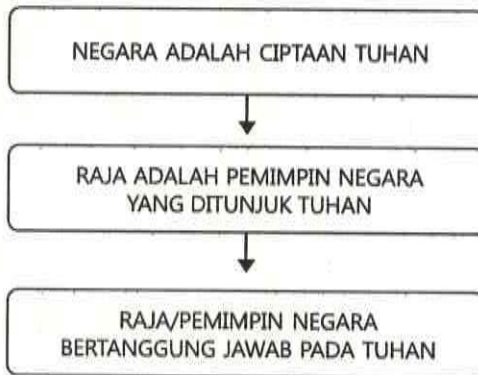
1. Teori Ketuhanan

Teori ini beranggapan bahwa negara diciptakan Tuhan. Penciptaan negara oleh Tuhan ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Untuk ciri negara yang diciptakan oleh Tuhan secara langsung yaitu penguasa berkuasa karena menerima wahyu dari Tuhan, sedangkan ciri Tuhan menciptakan negara tidak secara langsung yaitu penguasa berkuasa karena kodrat Tuhan.¹¹ Menurut

11 Azhary, *Ilmu Negara, Pembahasan Buku Kranenburg*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 15.

Thomas Aquinas, negara itu timbul dari pergaulan antar manusia yang ditentukan oleh hukum dan tata alam. Tetapi hukum tata alam inipun terjadi dari kehendak Tuhan dan menurut hukum Tuhan.¹² Secara umum dalam pandangan teori Ketuhanan, negara adalah ciptaan Tuhan, dan raja adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan, sehingga pertanggungjawaban pemimpin negara ditujukan secara langsung pada Tuhan.

TERBENTUKNYA NEGARA MENURUT TEORI KETUHANAN
(Frederich Julius Stahl, Thomas Aquinas)



2. Teori Kekuatan

Intisari dari teori dirumuskan bahwa siapa yang berkemampuan memiliki kekuatan maka mereka akan mendapat kekuasaan dan memegang tampuk pemerintahan. Kekuatan itu meliputi kekuatan jasmani (*physic*), kekuatan rohani (*psychis*), atau kekuatan materi (kebendaan), maupun kekuatan politik. Inti ajaran teori kekuatan mengenai terbentuknya negara adalah bahwa suatu negara akan

12 Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 32.

terbentuk sebagai akibat adanya dominasi atau penaklukan dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Menurut teori evolusi **Charles Darwin** bahwa kehidupan semesta alam ini diliputi oleh serba perjuangan untuk mempertahankan hidup masing-masing. Yang kuat akan menindas yang lemah, maka semuanya berusaha untuk menjadi kuat dan unggul dalam perjuangan. Setiap perjuangan harus senantiasa berusaha menambah kekuatan dan kemampuannya agar tetap berkuasa. Dalam keadaan itulah terjadi evolusi, terjadi proses dan pertumbuhan yang terus menerus yang dibawakan oleh penyesuaian diri pada kondisi perjuangan hidup.¹³

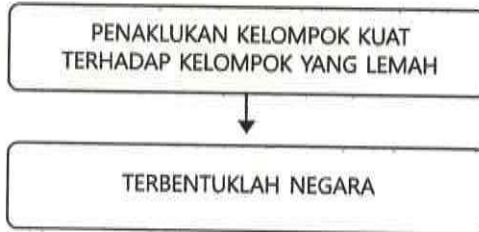
Semua imperium yang pernah berjaya dalam sejarah peradaban negara dapat dikatakan berdiri dengan dasar teori kekuatan ini, sebagaimana yang diterapkan oleh pemerintahan **Napoleon Bonaparte** (1769-1821), **Adolf Hitler** (1889-1945), **Bennito Mussolini** (1883-1945), **Lenin** (1870-1924).

Menurut **Franz Oppenheimer** seperti yang dikemukakannya dalam bukunya yang berjudul '*Der Staat*', bahwa negara adalah suatu susunan masyarakat yang oleh golongan yang menang dipaksakan kepada golongan yang ditaklukan, dengan maksud untuk mengatur kekuasaan golongan yang satu atas golongan yang lain dan melindungi terhadap ancaman pihak lain. Tujuan dari semua itu adalah dalam rangka pemerasan ekonomi dari golongan yang menang terhadap yang golongan yang kalah.¹⁴

13 *Ibid*, hlm. 33.

14 Ramdlon Naning, *Gatra Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1983, hlm. 9.

TERBENTUKNYA NEGARA MENURUT TEORI KEKUATAN



3. Teori Perjanjian Masyarakat

Dalam pandangan **Thomas Hobbes** pada teori perjanjian masyarakatnya, diungkap bahwa pada mulanya kehidupan antar manusia itu sama seperti kehidupan serigala yang dianalogikannya dengan sebutan '*homo homini lupus*', yang artinya bahwa manusia itu memangsa manusia yang lain atau manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Perkembangan berikutnya, manusia-manusia itu saling berinteraksi dan membuat kelompok-kelompok. Kemudian terjadilah situasi anarki lain dalam bentuk perang antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain atau yang disebut oleh Hobbes dengan sebutan '*bellum omnium contra omnes*', yang artinya perang semua melawan semua.

Selanjutnya lama kelamaan manusia-manusia dalam kelompok-kelompok itu tidak tahan juga dengan keadaan anarkhi tersebut. Situasi anarkhi itu telah sangat mengancam keadaan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Menurut **Hobbes**, pada tahapan ini manusia telah mengalami situasi kesadaran atau yang disebutnya dengan istilah '*resultante*'.

Setelah manusia mengalami situasi '*resultante*' atau kesadaran, maka manusia-manusia yang tergabung dalam kelompok-kelompok tersebut mengadakan perjanjian dengan kelompok yang paling kuat atau penguasa untuk mengadakan yang disebut oleh Hobbes sebagai

pactum subjectionees' untuk membentuk negara, namun sebelum *pactum subjectionees'* itu diadakan individu-individu dalam elompok-kelompok yang lemah itu telah menyerahkan hak-hak mereka sepenuhnya kepada para penguasa yang tergabung dalam elompok yang kuat tersebut. Karena hak-hak individu-individu dalam nasyarakat itu telah diserahkan sepenuhnya kepada para penguasa dalam negara tersebut, maka yang terbentuk adalah negara kekuasaan (*leviathan*). Dan pada akhirnya muncullah situasi dalam negara ersebut yang disebut oleh Hobbes sebagai "*non est' potestas super teram quae comparaturei*" atau tiada kekuasaan yang dapat menandingi kekuasaan negara.

**TERBENTUKNYA NEGARA MENURUT TEORI PERJANJIAN MASYARAKAT
(Thomas Hobbes)**



Berbeda dengan **Hobbes** yang mengawali teori perjanjian masyarakatnya dari situasi antar manusia yang anarkhi, Jhon Locke dalam teori perjanjian masyarakatnya mengawali teorinya berangkat dari keadaan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial (*homo socius*). Sebagai makhluk sosial, kehidupan antar manusia diatur melalui hukum akal (*law of reason*). Kemudian interaksi hukum akal antar manusia dalam lingkungan sosial tersebut pada akhirnya akan sampai pada titik yang disebut oleh **Locke** sebagai keadaan ideal atau '*goodwill*'. Selanjutnya jika interaksi antar individu-individu dalam suatu masyarakat sudah ideal (*goodwill*), maka muncullah suatu kesepakatan antara individu-individu dalam masyarakat tersebut dalam bentuk perjanjian masyarakat, yang disebut oleh **Locke** dengan sebutan '*pactum unionees*'.

Adapun isi dari '*pactum unionees*' tersebut adalah *pertama* tentang perjanjian pembentukan negara dan yang *kedua* perjanjian mengenai perlindungan hak-hak asasi manusia. Oleh karena kedua klausul dalam perjanjian masyarakat itu bersifat konstitusional, maka yang terbentuk adalah negara konstitusional.

**TERBENTUKNYA NEGARA MENURUT TEORI PERJANJIAN MASYARAKAT
(John Locke)**



Dalam teori perjanjian masyarakat yang dirumuskan oleh Rousseau, pada hakikatnya manusia itu dilahirkan bebas dan sederajat. Oleh karena kebebasan dan kesederajatan manusia, maka manusia sebagai individu-individu sangat berpeluang untuk mengadakan kesepakatan yang disebut sebagai perjanjian masyarakat (*contract social*). Menurut Rousseau, apabila individu-individu telah mengadakan perjanjian masyarakat (*contract social*), maka timbullah keadaan bernegara. Dan jika sudah ada keadaan bernegara maka terbentuklah negara sebagai badan kooperatif kolektif yang fungsinya untuk memberikan perlindungan terhadap '*general will*' (kehendak/kepentingan umum), dan sekaligus juga memberikan perlindungan terhadap '*particular will*' (kehendak/kepentingan khusus).

**TERBENTUKNYA NEGARA MENURUT TEORI PERJANJIAN MASYARAKAT
(J.J. Rousseau)**



Bagian Enam

KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

A. Mengenal Konstitusi

1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi menurut **Rukmana Amanwinata**,¹⁶ berpadanan dengan "*constitution*" (bahasa Inggris), "*constitutie*" (bahasa Belanda) "*constitutional*" (bahasa Perancis), "*Verfassung*" (bahasa Jerman), "*constitution*" (bahasa Latin). Dalam Ilmu Hukum sering digunakan beberapa istilah dengan arti yang sama. Sebaliknya tidak tertutup kemungkinan untuk arti berbeda digunakan istilah yang sama. Demikian juga halnya yang terjadi dengan istilah konstitusi. Selain konstitusi, dikenal istilah lain, yaitu Undang-Undang Dasar dan hukum dasar.¹⁷

16 Rukmana Amanwinata, "Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945", *Disertasi*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996, p. 48.

17 Budiman N.P.D, Sinaga, *Hukum Konstitusi*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2005), p. 6. Menurut Pandoyo, UUD mempunyai pengertian yang lebih sempit daripada pengertian hukum dasar, karena yang dimaksud dengan UUD adalah hukum dasar yang tertulis sedangkan pengertian hukum dasar mencakup

Mengenai istilah konstitusi dan UUD terbagi menjadi dua, yaitu *pertama*, pendapat yang membedakan konstitusi dengan UUD dan *kedua*, pendapat yang menyamakan konstitusi dengan UUD.¹⁸ Saat ini tampaknya pendapat kedua lebih diterima. Konstitusi juga dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu konstitusi politik dan konstitusi sosial. Konstitusi politik adalah semata-mata dokumen hukum yang berisi pasal-pasal yang mengandung norma-norma dasar dalam penyelenggaraan Negara, hubungan rakyat dengan Negara, antar lembaga Negara dan sebagainya. Sedangkan konstitusi sosial lebih luas dari itu, karena mengandung cita-cita sosial bangsa yang menciptkannya, rumusan filosofis tentang Negara, rumusan sistem sosial dan ekonomi, dan sistem politik yang dikembangkan.¹⁹

Dari catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam per-kataan Yunani Kuno *politeia* dan perkataan bahasa Latin *constitutio* yang juga berkaitan dengan kata *jus*. Dalam kedua perkataan *poli-teia* dan *constitutio* itulah awal mula gagasan konstitu-sio-nalisme diekspresikan oleh umat manusia. Kata *politeia* dari kebu-daya-an Yunani dapat disebut yang paling tua usianya. Pengertiannya secara luas mencakup

juga hukum dasar yang tidak tertulis. S. Toto Pandoyo, *Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945: Proklamasi dan Kekuasaan MPR*, (Yogyakarta, Liberty, 1985), p. 45.

- 18 Penggunaan istilah UUD mengandung kelemahan, karena ditujukan kepada naskah tertulis, padahal istilah konstitusi bagi kalangan politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan, baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis, yang mengatur cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1990), p. 95. Pendapat senada disampaikan K.C. Wheare, *Konstitusi-konstitusi Modern*, terj. Muhammad Hardani, (Yogyakarta: Pustaka Eureka, 2003), p. 1-2.

- 19 Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), p. 19

*All the innumerable characteristics which determine that state's peculiar nature, and these include its whole economic and social texture as well as matters govern-mental in our narrower modern sense. It is a purely descriptive term, and as inclusive in its meaning as our own use of the word 'constitution' when we speak generally of a man's constitution or of the constitu-tion of matter.*²⁰

Dalam bahasa Yunani Kuno tidak dikenal adanya istilah yang mencerminkan pengertian kata *jus* ataupun *constitutio* sebagaimana dalam tradisi Romawi yang datang kemudian.²¹ Dalam keseluruhan sistem berpikir para filosof Yunani Kuno, perkataan *constitution* adalah seperti apa yang kita maksudkan sekarang ini. Perkataan *consti-tution* di zaman Kekaisaran Romawi (*Roman Empire*), dalam bentuk bahasa latinnya, mula-mula digunakan sebagai istilah teknis untuk menyebut *the acts of legislation by the Emperor*.²² Bersamaan dengan banyak aspek dari hukum Romawi yang dipinjam ke dalam sistem pemikiran hukum di kalangan gereja, maka istilah teknis *constitution* juga dipinjam untuk menyebut peraturan-peraturan eklesiastik yang berlaku di seluruh gereja ataupun untuk beberapa peraturan eklesiastik yang berlaku di gereja-gereja tertentu (*ecclesiastical province*). Oleh karena itu, kitab-kitab Hukum Romawi dan Hukum Gereja (Kanonik) itulah yang sering dianggap sebagai sumber rujukan atau referensi

20 Charles Howard McIlwain, *Constitutionalism: Ancient and Modern*, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1966), p. 26. Seperti dikata-kan oleh Sir Paul Vinogradoff, "*The Greeks recognized a close analogy between the organization of the State and the organism of the individual human being. They thought that the two elements of body and mind, the former guided and governed by the later, had a parallel in two constitutive elements of the State, the rulers and the ruled*".

21 Analogi di antara organisasi negara (*state organization*) dan organisme manusia (*human organism*) ini, seperti dikatakan oleh M.L. Newman dalam *The Politics of Aristotle*, merupakan *the central inquiry of political science* di dalam sejarah Yunani Kuno.

22 *Ibid.*, hal. 23.

paling awal mengenai penggunaan perkataan *constitution* dalam sejarah.

Pengertian konstitusi di zaman Yunani Kuno masih bersifat materiil, dalam arti belum berbentuk seperti yang dimengerti di zaman modern sekarang. Namun, perbedaan antara konstitusi dengan hukum biasa sudah tergambar dalam pembedaan yang dilakukan oleh Aristoteles terhadap pengertian kata *politeia* dan *nomoi*. Pengertian *politeia* dapat disepadankan dengan pengertian konstitusi, sedangkan *nomoi* adalah undang-undang biasa.²³

Politeia mengandung kekuasaan yang lebih tinggi dari pada *nomoi*, karena *politeia* mempunyai kekuasaan membentuk sedangkan pada *nomoi* tidak ada, karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar supaya tidak bercerai-berai. Dalam kebudayaan Yunani istilah konstitusi berhubungan erat dengan ucapan *Respublica Constituere* yang melahirkan semboyan, *Prinsep Legibus Solutus Est, Salus Publica Suprema Lex*, yang artinya "Rajalah yang berhak menentukan struktur organisasi negara, karena dialah satu-satunya pembuat undang-undang".

Di Inggris, peraturan yang pertama kali dikaitkan dengan istilah konstitusi adalah "Constitutions of Clarendon 1164" yang disebut oleh Henry II sebagai *constitutions, avitae constitutiones or leges, a recordatio vel recognition*,²⁴ menyangkut hubungan antara gereja dan pemerintahan Negara di masa pemerintahan kakeknya, yaitu Henry I. Isi peraturan yang disebut sebagai konstitusi tersebut masih bersifat eklesiastik, meskipun pemuatannya dilakukan oleh

²³ *Ibid.*

²⁴ Dokumen *Constitutions of Clarendon* menyebut dirinya sendiri sebagai *recordatio* (record) atau *recognitio* (a finding). Pengarang buku "*Leges Henrici Primi*" pada awal abad ke-12, juga menyebut "*the well-known writ of Henry I for the holding of the hundred and county courts*" sebagai record.

pemerintahan sekuler. Namun, di masa-masa selanjutnya, istilah *constitutio* itu sering pula dipertukarkan satu sama lain dengan istilah *lex* atau *edictum* untuk menyebut berbagai *secular administrative enactments*. Glanvill sering menggunakan kata *constitution* untuk a *royal edict* (titah raja atau ratu). Glanvill juga mengaitkan *Henry II's writ creating the remedy by grand assize as 'legalis is a constitutio'*,²⁵ dan menyebut *the assize of novel disseisin* sebagai a *re-cog-nitio* sekaligus sebagai a *constitutio*.²⁶

Beberapa tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Merton pada tahun 1236, Bracton menulis arti-kel yang menyebut salah satu ketentuan dalam undang-undang itu sebagai a *new constitution*, dan mengaitkan satu bagian dari Magna Carta yang dikeluarkan kembali pada tahun 1225 sebagai *constitutio libertatis*. Dalam waktu yang hampir bersamaan (satu zaman), Beaumanoir di Perancis berpendapat bahwa "*speaks of the re-medey in novel disseisin as 'une nouvele constitution' made by the kings*". Ketika itu dan selama berabad-abad sesudahnya, perkataan *constitution* selalu diartikan sebagai a *particular administrative enactment much as it had meant to the Roman lawyers*. Perkataan *constitution* ini dipakai untuk membedakan antara *particular enactment* dari *consuetudo* atau *ancient custom* (kebiasaan).

Pierre Gregoire Tholosano (*of Toulouse*), dalam bukunya *De Republica* (1578) menggunakan kata *constitution* dalam arti yang hampir sama dengan pengertian sekarang.²⁷ Hanya saja kandungan maknanya lebih luas dan lebih umum, karena Gregoire memakai frase

25 George E. Woodbine (ed.), *Glanvill De Legibus et Consuetudinibus Angluæ*, (New Haven: 1932), p. 63.

26 McIlwain, *Op. Cit.*, hal. 24.

27 Authore D. Petro Gregorio Tholosano, *De Republica Libri Sex et Viginti*, lib.I, cap. I, 16, 19, Lugduni, 1609, p. 4-5.

yang lebih tua, yaitu *status reipublicae*. Dapat dikatakan bahwa di zaman ini, arti perkataan *constitution* tercermin dalam pernyataan Sir James Whitelocke pada se-kitar tahun yang sama, yaitu "*the natural frame and con-stitution of the policy of this Kingdom, which is jus pub-licum regni*". Bagi James White-locke, *jus publicum regni* itulah yang merupakan kerangka alami dan konstitusi po-li-tik bagi kerajaan.

Dari sini, kita dapat memahami pengertian konsti-tusi dalam dua konsepsi. Pertama, konsti-tusi sebagai *the natural frame of the state* yang dapat ditarik ke belakang dengan mengaitkannya dengan pengertian *politeia* da-lam tradisi Yunani Kuno. Kedua, konstitusi dalam arti *jus publicum regni*, yaitu *the public law of the realm*. Ci-cero²⁸ dapat disebut sebagai sarjana pertama yang meng-gunakan perkataan *constitutio* dalam pengertian kedua ini, seperti tergambar dalam bukunya "*De Re Pub-lica*". Di lingkungan Kerajaan Romawi (Roman Empire), per-kataan *constitutio* ini dalam bentuk Latinnya juga dipakai sebagai istilah teknis untuk menyebut *the acts of legislation by the Emperor*. Menurut Cicero, "*This con-s-ti-tution (haec constitution) has a great measure of equa-bi-lity without which men can hardly remain free for any length of time*". Selanjutnya dikatakan oleh Cice-ro, *Now that opinion of Cato becomes more certain, that the constitution of the republic (consitutionem rei pub-licae) is the work of no single time or of no single man*.

Pendapat Cato dapat dipahami bahwa konstitusi republik bukanlah hasil ker-ja satu wak-tu ataupun satu orang, melainkan

28 Nama lengkapnya adalah Marcus Tullius Cicero (106-43 BC). Menurut R.N. Berki, "*In the extant writings of the great Roman statesman and orator, Marcus Tullius Cicero (106-43 BC), we find the most interesting for-mu-lations of Roman Stoicism as regards political thought*". Lihat R.N. Berki, *The History of Political Thought: A Short Introduction*, (London: J.J.Dent and Sons, Everyman's University Library, 1988), hal. 74.

kerja kolektif dan aku-mu-latif. Oleh karena itu, dari sudut etimologi, konsep kla--sik mengenai konsti-tusi dan konstitusionalisme dapat ditelusuri lebih mendalam dalam perkembangan penger-tian dan penggunaan perkataan *politeia* dalam bahasa Yunani dan perkataan *constitutio* dalam bahasa Latin, serta hubungan di antara keduanya satu sama lain di se-panjang sejarah pemikiran maupun pengalaman praktik kehidupan kenegaraan dan hukum.

Perkembangan-perkembangan demikian itu-lah yang pada akhirnya mengantarkan umat ma-nu-sia pada pe-ngertian kata *constitution* itu dalam bahasa Inggris modern. Dalam *Oxford Dictionary*, perkataan *consti-tution* dikaitkan dengan beberapa arti, yaitu: "... the act of establishing or of ordai-ning, or the ordinance or re-gu-lation so establi-shed". Selain itu, kata *constitution* juga diartikan sebagai pembuatan atau penyusunan yang me-nentukan hakikat sesuatu (*the "make" or com-po-sition which determines the nature of any-thing*). Oleh karena itu, *constitution* dapat pula dipakai untuk menyebut "... the body or the mind of man as well as to external ob-jects".

Dalam pengertiannya yang demikian itu, kon-stitusi selalu dianggap "mendahului" dan "menga-tasi" pemerin-ta-han dan segala keputusan serta peraturan lainnya. *A Constitution*, kata Thomas Paine, "*is not the act of a go-vern-ment but of the people constituting a govern-ment*".²⁹ Kon-stitusi disebut mendahului, bukan karena urutan waktunya, melainkan dalam sifatnya yang *supe-rior* dan kewenangannya untuk mengikat.³⁰

Konstitusionalisme, merupakan pemikiran yang telah lama berkembang. Pemikiran ini menghendaki pembatasan kekuasaan.

29 McIlwain, *Op. Cit.*, p. 20.

30 *Ibid.*, hal. 12.

Pembatasan kekuasaan ini terutama dilakukan melalui hukum, lebih khusus lagi melalui konstitusi.³¹ *Constitutionalisme is belief in imposition of restraints on government by means of constitution.*³² Menurut Lev, pada intinya konstitusionalisme adalah proses hukum.³³

Asshiddiqie,³⁴ memaparkan gagasan konstitusionalisme sebagai seperangkat prinsip yang tercermin dalam kelembagaan suatu bangsa dan tidak ada yang mengatasinya dari luar serta tidak ada pula yang mendahuluinya. **Fredrich**, berpendapat konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat yang tunduk pada beberapa pembatasan untuk menjamin kekuasaan yang diperlukan pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang ditugasi memerintah.³⁵

Berdasarkan ide konstitusionalisme, semua pemegang kekuasaan harus dibatasi. Di satu sisi tidak ada satu pihak atau satu lembaga pun yang boleh memiliki kekuasaan tanpa batas. Di sisi lain, setiap pemberian kekuasaan senantiasa perlu disertai dengan pembatasan kekuasaan.³⁶

2. Sistem Konstitusional

Pada mulanya kehadiran paham *konstitusionalisme* (sistem konstitusional) adalah untuk membatasi pemerintahan jangan sampai bersifat absolut dan menuntut orang-orang yang berkuasa untuk

31 Budiman N.D.P. Sinaga, *Hukum Konstitusi*, p. 1.

32 Eric Barent, *An Introduction to Constitutional Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1998), p. 14.

33 Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1990), p. 513.

34 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), p. 1-6.

35 Pendapat Carl J. Friedrich dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, p. 57.

36 Budiman N.P. Sinaga, *Hukum Konstitusi*, p. 4-6.

mematuhi hukum dan peraturan. Kemudian pada perkembangannya paham konstitusionalisme/sistem konstitusional ini lebih memfokuskan pengertiannya sebagai pemerintahan yang menyelenggarakan kekuasaannya dengan berdasarkan pada konstitusi (undang-undang dasar). Adapun ajaran pokok dari paham konstitusionalisme tersebut ada pada:

- a. anatomi kekuasaan di negara tersebut semuanya tunduk pada hukum;
- b. adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. di negara tersebut peradilanannya diselenggarakan secara bebas dan mandiri; dan
- d. adanya pertanggungjawaban kepada rakyat.

Sementara bila melihat kepada substansi konstitusi Indonesia saat ini, UUD 1945 Amandemen Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat telah meratifikasi keempat prinsip konstitusionalisme tersebut. Mengenai anatomi kekuasaan di Indonesia dapat kita lihat pada Pasal 1 ayat (3), tentang jaminan HAM ada pada Pasal 26 sampai Pasal 34, untuk nuansa peradilan dapat dilihat pada Pasal 24 ayat (1), dan untuk prinsip akuntabilitas dapat terlihat pada Pasal 23 ayat (1). Akan tetapi, pada hakikatnya penganutan ajaran tersebut tidak hanya cukup di atas kertas atau dalam dokumen formal saja. Sebagaimana yang dinyatakan oleh **Adnan Buyung Nasution** dalam bukunya yang berjudul *"Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959"* bahwa meskipun suatu pemerintahan telah memiliki konstitusi atau undang-undang dasar yang telah mengatur prinsip-prinsip paham konstitusionalisme tersebut, akan tetapi tidak diimplementasikan dalam praktek penyelenggaraan bernegara, maka pemerintahan tersebut belum

dapat dikatakan sebagai pemerintahan konstitusional.³⁷

Atas pemahaman terhadap paham konstitusionalisme tersebut dapatlah digaris bawahi bahwa konstitusi atau undang-undang dasar mempunyai derajat supremasi dalam suatu negara, dalam artian telah menjadi roh bagi tertib hukum suatu negara.



3. Subtansi Konstitusi

Para sarjana ada yang membedakan arti konstitusi dengan Undang-Undang dasar dan ada juga yang menyamakan arti keduanya. **L.J. Van Apeldoorn** membedakannya Konstitusi (*constitution*) adalah memuat peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis, sedangkan Undang-Undang Dasar (*grondwet*) adalah bagian tertulis dari konstitusi. **Sri Sumantri**³⁸ menyamakan arti keduanya sesuai dengan praktek

37 Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995, hlm. 416.

38 Sri Soemantri Martosoewignyo, *Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 2.

ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara dunia termasuk Indonesia.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa konstitusi meliputi peraruran tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Dengan demikian konstitusi dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa.
- b. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus tugasnya dari suatu sistem poliotik.
- c. Suatu gamabaran dari lembaga-lembaga negara.
- d. Suatu gambaran yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia.

Pada hakikatnya konstitusi itu berisi tiga hal pokok, yaitu:

- a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya,
- b. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental,
- c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Sedangkan menurut **Miriam Budiardjo**,³⁹ setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai:

- a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif, pembagian kekuasaan antara

39 Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.177-178.

pemerintah pusat atau federal dengan pemerintahan daerah atau negara bagian, prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran hukum oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya. Konstitusi dianggap sebagai kesatuan yang nyata yang mencakup semua bangunan hukum dan semua organisasi-organisasi yang ada dalam negara. Dalam konstitusi terlihat bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan dari negara tersebut.

- b. Hak-hak asasi manusia. Jaminan akan Hak-hak asasi manusia harus terdapat dalam suatu konstitusi, karena kelahiran konstitusi itu sendiri tidak lepas dari usaha perubahan dari negara yang otoriter kepada negara yang menjamin hak-hak rakyat. Oleh itu konstitusi harus berisi jaminan terhadap hak-hak rakyat tidak akan dilanggar oleh pihak-pihak yang memegang kekuasaan.
- c. Prosedur mengubah undang-undang dasar. Konstitusi suatu negara dibuat berdasarkan pengalaman dan kondisi sosial politik masyarakatnya kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perubahan akibat dari pembangunan, modernisasi dan munculnya perkembangan-perkembangan baru dalam ketatanegaraan, maka oleh sebab itu suatu konstitusi harus terbuka dalam menerima perubahan zaman.
- d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, seperti dalam UUD 1945 dilarang merubah bentuk negara Kesatuan. Ketentuan ini diperluakan untuk menjamin kesinambungan sejarah kenegaraan suatu negara, sehingga ada hal yang prinsip tidak boleh diroboh sekalipun zaman telah mengalami suatu perubahan.

4. Klasifikasi Konstitusi

Membahas tentang klasifikasi konstitusi tentunya tidak dapat dilepaskan dari teorinya **K.C. Wheare**⁴⁰ yang telah mengklasifikasikannya atas:

- a. *Written constitution and no written constitution* (konstitusi tertulis dan konstitusi bukan tertulis);
- b. *Flexible constitution and rigid constitution* (konstitusi fleksibel dan konstitusi rjid);
- c. *Supreme constitution and not supreme constitution* (konstitusi derajat-tinggi dan konstitusi tidak derajat-tinggi);
- d. *Federal constitution and unitary constitution* (konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan);
- e. *Presidential executive and parlementary executive constitution* (konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer).

Untuk konstitusi tertulis dapat diterjemahkan sebagai suatu konstitusi (undang-undang dasar) yang diadakan dalam suatu bentuk dokumen formal (resmi) secara tertulis, sedangkan untuk konstitusi yang tidak tertulis adalah sebaliknya atau tidak diadakan dalam suatu dokumen formal dan tidak dibuat secara tertulis akan tetapi dipahami dan diakui oleh masyarakatnya, seperti konstitusi yang berlaku di Inggris.

Terhadap klasifikasi secara rjid atau fleksibel, umumnya dikaitkan dengan cara perubahan terhadap undang-undang dasar tersebut. Jikalau untuk merubah undang-undang dasar itu sulit, karena harus melalui dan mengikuti prosedur yang sulit dan membutuhkan cara-cara yang istimewa maka undang-undang dasar itu disebut sebagai

40 Sri Soemantri Martosoewignyo, *op.cit.*, hlm. 55.

konstitusi rijid, sebaliknya apabila untuk merubah undang-undang dasar suatu negara itu tidak sulit atau dalam artian tidak memerlukan cara-cara tertentu/istimewa, maka undang-undang dasar tersebut dinamai konstitusi fleksibel.

Selanjutnya untuk klasifikasi atas nama konstitusi derajat tinggi dan tidak berderajat tinggi begitu berkaitan dengan posisi undang-undang dasar suatu negara terhadap peraturan perundang-undangan lain di negara tersebut. Jikalau undang-undang dasar negara itu menduduki posisi tertinggi dalam aturan tata urutan peraturan perundang-undangan di negara tersebut, dan undang-undang dasarnya mendasari keberadaan dari peraturan perundang-undangan lainnya, demikian pula hal untuk mengubahnya lebih sulit dibandingkan dengan untuk mengubah peraturan perundang-undangan lainnya maka undang-undang dasar tersebut disebut sebagai konstitusi berderajat tinggi. Sedangkan konstitusi tidak berderajat tinggi adalah kebalikan dari konstitusi berderajat tinggi atau sebagai konstitusi yang tidak memiliki kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi dan cara untuk mengubah ataupun menggantinya sama saja dengan prosedur mengubah peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam kaitannya dengan konstitusi negara kesatuan dan konstitusi negara serikat jelas berhubungan dengan bentuk negaranya. Jika pada isi konstitusi suatu negara diatur mengenai pembagian kekuasaan antara pemerintah negara negara serikat dengan pemerintah negara bagian maka konstitusi (undang-undang dasar) negara itu disebut konstitusi negara serikat. Sementara apabila dinyatakan di dalam isi suatu konstitusi (undang-undang dasar) suatu negara bahwa bentuk negaranya adalah kesatuan apakah yang menggunakan sistem sentralistik ataupun desentralistik, maka konstitusi

(undang-undang dasar semacam itu disebut sebagai konstitusi negara kesatuan.

Lebih khusus lagi terhadap penamaan konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer, yang jelas klasifikasi atas nama ini berkaitan dengan sistem pemerintahan yang dipakai. Sebagaimana mengutip teori sistem pemerintahan dari **C.F. Strong**, apabila sistem pemerintahan yang diatur dalam konstitusi (undang-undang dasar) suatu negara memuat aturan-aturan sebagai berikut:

- a. Di samping mempunyai kekuasaan "nominal" sebagai kepala negara, presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan (yang belakang ini lebih dominan);
- b. Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih seperti Amerika Serikat;
- c. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif; dan
- d. Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan diadakan pemilihan,

Maka konstitusi (undang-undang dasar) yang seperti ini disebut sebagai konstitusi sistem pemerintahan presidensial. Sedangkan apabila pada isi konstitusi suatu negara yang memuat ciri-ciri pemerintahan yang sebagai berikut:

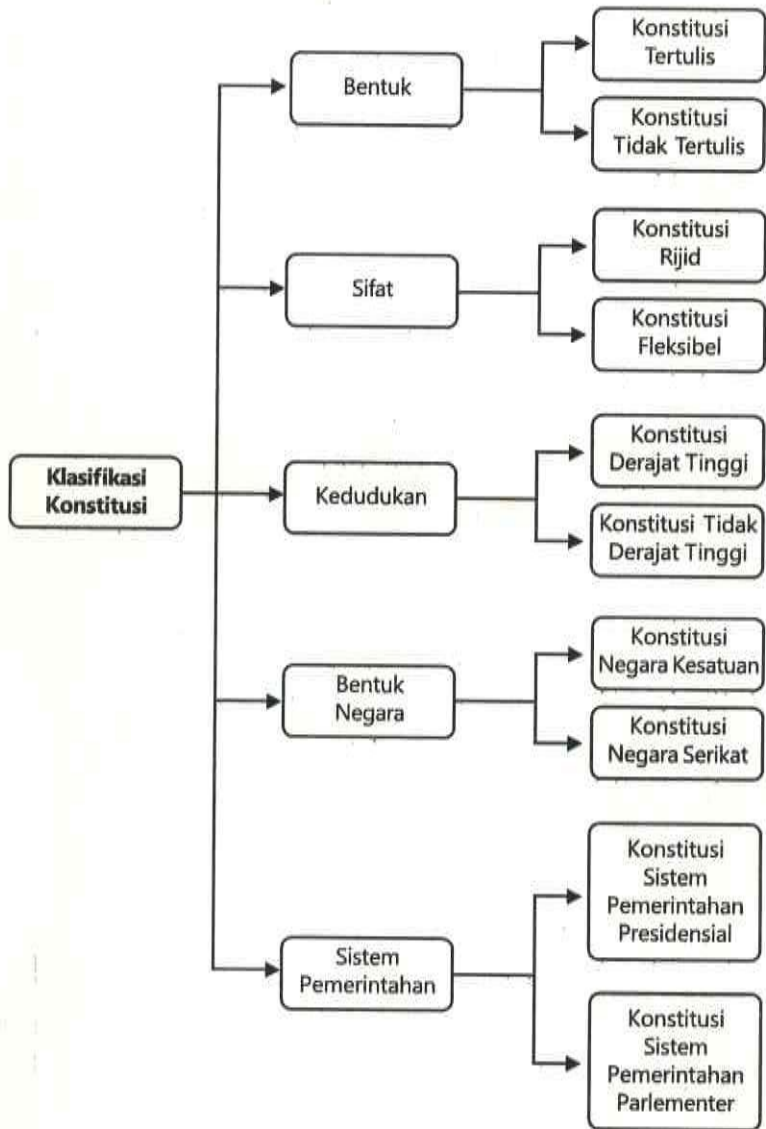
- a. Kabinet yang dipilih oleh perdana menteri dibentuk atau berdasarkan kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen;
- b. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya, mungkin sebagian adalah anggota parlemen;
- c. Perdana menteri bersama kabinet bertanggung jawab kepada parlemen; dan

- d. Kepala negara dengan saran atau nasihat perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakannya pemilihan umum.

Berkaca kepada teori klasifikasi konstitusi oleh K.C. Wheare tersebut, Konstitusi Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat) dari segi bentuk jelas merupakan konstitusi tertulis, dari sifat perubahannya yang mengacu pada Pasal 37 jelas merupakan konstitusi rijid, dari segi kedudukannya jelas merupakan konstitusi berderajat tinggi (lihat UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI), dari segi bentuk negara jelas merupakan konstitusi negara kesatuan (Pasal 1 ayat (1) UUD 1945), dan dari segi sistem pemerintahan, UUD 1945 setelah perubahan merupakan konstitusi sistem pemerintahan presidensiil (Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 7C UUD 1945).

Dalam kaitannya dengan sejarah suatu negara, **Howgood** membedakannya atas '*spontan staat*' (negara yang timbul karena suatu revolusi yang berhasil) maka konstitusinya disebut '*the revolutioner constitution*', sementara apabila bentuk negaranya '*derivative staat*' (negara yang timbul karena meniru negara yang menjajahnya), maka sifat konstitusinya adalah '*neo-national constitution*'.⁴¹

41 Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro, *op.cit.*, hlm. 106-107.



Bagian Tujuh

CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA MENURUT UU No. 12 TAHUN 2006

A. Pengantar

Pemerintah RI pada tanggal 1 Agustus 2006 telah mensahkan UU No. 12 tentang Kewarganegaraan RI. Dengan diundangkannya UU tersebut, UU kewarganegaraan yang lama, yaitu UU No. 62 tahun 1958 dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

UU No. 12 Tahun 2006 ini mengandung asas-asas kewarganegaraan umum dan asas-asas kewarganegaraan khusus. Asas-asas kewarganegaraan umum yang terkandung dalam UU ini adalah:

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*), yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* (*law of the soil*), yaitu asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.

3. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.

Asas-asas khusus yang dijadikan dasar penyusunan UU ini adalah:

1. Asas kepentingan nasional, yaitu asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum, yaitu asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap WNI dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap WNI mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantif, yaitu prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substantansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas nondiskriminatif, yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yaitu asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan

memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

7. Asas keterbukaan, yaitu asas yang menentukan bahwa dalam segala ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas, yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan RI diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Pada dasarnya UU ini tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipartide*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apartide*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam UU ini merupakan suatu pengecualian. Pokok materi yang diatur dalam UU ini meliputi:

1. Siapa yang menjadi WNI,
2. Syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia,
3. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia,
4. Syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia,
5. Ketentuan pidana.

Berdasarkan UU ini, yang dimaksud Warga Negara Indonesia adalah:

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI;

3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA);
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI;
5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI;
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI;
8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuannya itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum menikah;
9. Anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
11. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
12. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya

meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

14. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum menikah, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai WNI
15. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI.

Anak seperti yang tersebut dalam poin 3, 4, 8, 11, 14 dan 15 di atas, dapat memiliki kewarganegaraan ganda sampai anak mencapai usia 18 tahun atau telah menikah. Setelah mencapai usia 18 tahun atau telah menikah, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen-dokumen yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau telah menikah.

B. Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan RI

1. Bagi Anak-anak (untuk Memperoleh Kewarganegaraan RI)

Anak yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh kewarganegaraan RI adalah:

- a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA;

- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI;
- c. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin;
- d. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- e. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum menikah diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing;
- f. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 41 UU No. 12 tahun 2006 ini, anak-anak yang termasuk dalam kategori di atas yang lahir sebelum UU ini diundangkan (sebelum 1 Agustus 2006) dan belum berusia 18 tahun atau belum menikah dapat memperoleh kewarganegaraan RI dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau Perwakilan RI paling lambat 4 (empat) tahun setelah UU ini berlaku. Tata cara pendaftaran sebagaimana tercantum dibawah ini.

Sedangkan, anak-anak yang termasuk dalam kategori di atas *yang lahir setelah UU ini diundangkan (setelah 1 Agustus 2006)* dapat langsung mengajukan permohonan kewarganegaraan/ pembuatan paspor RI ke Perwakilan RI.

2. Tata cara pendaftaran

Berikut adalah tata cara untuk melakukan pendaftaran Kewarganegaraan di Republik Indonesia;

1. pendaftaran dilakukan oleh salah satu orang tua atau walinya dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup.
2. permohonan pendaftaran bagi anak yang bertempat tinggal di luar negeri diajukan kepada Menteri melalui Kepala Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
3. permohonan pendaftaran sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama lengkap, alamat tempat tinggal salah seorang dari orang tua atau wali anak;
 - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan kedua orang tua;
 - c. nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan anak serta hubungan hukum kekeluargaan anak dengan orang tua, dan
 - d. kewarganegaraan anak
4. permohonan pendaftaran dilampiri dengan:
 - a. fotokopi akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI,
 - b. surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum menikah;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI;
 - d. pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
 - e. bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah harus melampirkan fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah

atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau keterangan/kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI;

- f. bagi anak yang diakui atau yang diangkat harus melampirkan fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI;
 - g. bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara RI harus melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk WNA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - h. bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara RI melampirkan fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
- 5. permohonan pendaftaran menggunakan bentuk formulir sebagaimana terlampir (formulir pendaftaran anak untuk memperoleh kewarganegaraan RI).
 - 6. waktu pemrosesan kurang lebih 4 bulan terhitung sejak permohonan pendaftaran beserta lampirannya diajukan kepada Perwakilan RI
 - 7. biaya pendaftaran Rp 500.000 (sesuai PP No. 19 Tahun 2007)
 - 8. permohonan pendaftaran anak hanya dapat diproses apabila telah diajukan secara lengkap kepada Perwakilan RI *paling lambat tanggal 1 Agustus 2010.*

3. Kehilangan kewarganegaraan RI

Berdasarkan Pasal 42 UU No. 12 tahun 2006 ini, WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama 5 (lima) tahun atau lebih

tidak melaporkan diri kepada Perwakilan RI dianggap telah melepaskan kewarganegaraan RI. Kepada mereka dan WNI yang telah kehilangan kewarganegaraan RI sebelum UU No. 12 tahun 2006 berlaku dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan RI dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UU No. 12 tahun 2006 diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Tata cara pendaftaran adalah sebagai berikut;

1. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Perwakilan RI yang terdekat dengan tempat tinggal pemohon;
2. permohonan pendaftaran sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama lengkap, alamat tempat tinggal pemohon;
 - b. tempat dan tanggal lahir serta status kewarganegaraan pemohon;
 - c. pekerjaan pemohon;
 - d. jenis kelamin pemohon;
 - e. status perkawinan pemohon;
 - f. nama isteri/suami pemohon; dan
 - g. nama anak pemohon yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah.
3. permohonan pendaftaran harus dilampiri dengan:

Lampiran I

**Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006**

Tanggal 26 September 2006

Perihal: Permohonan

Pendaftaran Anak
untuk memperoleh
Kewarganegaraan RI

.....

Kepada Yth. Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia
RI melalui Kepala Perwakilan
Republik Indonesia Di P A R I S

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama lengkap :
2. Alamat tempat tinggal :
3. Adalah ayah/ibu/wali dari anak :
Nama lengkap :
Jenis kelamin :
Tempat tanggal lahir :
Status perkawinan anak : Belum kawin
Kewarganegaraan anak :

Yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari :

- Ayah
Nama lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat tempat tinggal :

Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Menurut UU No. 12 Tahun 2006

- Ibu
Nama lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat tempat tinggal :

Yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah/diakui/diangkat ¹⁾ oleh :

- Ayah
Nama lengkap
Tempat tanggal lahir
Kewarganegaraan
Alamat tempat tinggal

- Ibu
Nama lengkap
Tempat tanggal lahir
Kewarganegaraan
Alamat tempat tinggal

berdasarkan penetapan pengadilan ... nomor ... tanggal ... bulan ... tahun ...;

- a. fotokopi kutipan akte kelahiran, surat kenal lahir, ijasah, atau surat-surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Perwakilan RI;
- b. fotokopi paspor RI, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain yang disahkan oleh Perwakilan RI yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi WNI;
- c. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh

- Perwakilan RI bagi pemohon yang telah kawin atau cerai;
- d. fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah yang disahkan oleh Perwakilan RI;
 - e. pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai WNI dengan tulus dan ikhlas;
 - f. pernyataan tertulis dari pemohon bahwa pemohon bersedia menanggalkan kewarganegaraan asing yang dimilikinya apabila memperoleh kewarganegaraan RI;
 - g. daftar riwayat hidup pemohon; dan
 - h. pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.
- 4. permohonan pendaftaran menggunakan bentuk formulir sebagaimana terlampir (formulir permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan RI)
 - 5. pernyataan sebagaimana disebut dalam butir 3e dan 3f di atas menggunakan bentuk formulir sebagaimana terlampir.
 - 6. waktu pemrosesan kurang lebih 5 bulan terhitung sejak permohonan pendaftaran beserta lampirannya diajukan kepada Perwakilan RI.
 - 7. biaya pendaftaran 500.000 (sesuai PP No. 19 Tahun 2007)

Dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut di atas berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2006.

Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini kami lampirkan:

1. fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI;
2. surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin;
3. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI ;
4. pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar ;
5. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau keterangan /kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah;
6. fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI bagi anak yang diakui atau yang diangkat;
7. fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara RI; dan
8. fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara RI.

Demikian permohonan pendaftaran ini saya ajukan untuk dapat dikabulkan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,
materai dan tanda tangan
(Nama lengkap)

Catatan:

1. coret yang tidak perlu
2. bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara RI diisi nama pengadilan negeri tempat tinggal anak, bagi anak yang bertempat tinggal di luar wilayah negara RI diisi nama pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal anak.

Lampiran IV

**Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No. .01-HL.03.01 Tahun 2006 Tanggal 26 September
2006**

Perihal: Permohonan
memperoleh kembali	Kepada Yth.
Kewarganegaraan	Kepala Perwakilan Republik
Republik Indonesia	Indonesia
	Di P A R I S

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama lengkap :
2. Alamat tempat tinggal :
3. Tempat dan tanggal lahir :

Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Menurut UU No. 12 Tahun 2006

4. Pekerjaan :
5. Kewarganegaraan :
6. Jenis kelamin :
7. Status Perkawinan :
8. Nama isteri/suami :
9. Nama anak yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin :

Dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006.

Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini saya lampirkan:

1. fotokopi kutipan akte kelahiran, surat kenal lahir, ijasah, atau surat-surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
2. fotokopi paspor RI, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain yang disahkan oleh Perwakilan RI yang dapat membuktikan bahwa Pemohon pernah menjadi Warga Negara RI;
3. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau kutipan akte kematian isteri/suami Pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi Pemohon yang telah kawin atau cerai;
4. fotokopi kutipan akte kelahiran anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Perwakilan RI;
5. pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan RI, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas;
6. pernyataan tertulis dari Pemohon bersedia menanggalkan

PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN

kewarganegaraan asing yang dimilikinya apabila memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;

7. daftar riwayat hidup Pemohon; dan
8. pasfoto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

Demikian permohonan ini saya ajukan untuk dapat dikabulkan.
Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat saya,
Pemohon

(materai dan tanda tangan)

(Nama lengkap)

Lampiran V

**Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006**

Tanggal 26 September 2006

PERNYATAAN

**KESETIAAN TERHADAP NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat di luar negeri :

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN

Paris, ...tanggal pernyataan dibuat...

Yang menyatakan,

(materai dan tanda tangan)

(Nama lengkap)

Lampiran VI

**Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006**

Tanggal 26 September 2006

PERNYATAAN

KESEDIAAN MENANGGALKAN KEWARGANEGARAAN ASING

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat di luar negeri :

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya
bersedia menanggalkan kewarganegaraan asing yang saya miliki

Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Menurut UU No. 12 Tahun 2006

apabila permohonan saya untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 dikabulkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Paris, ...tanggal pernyataan dibuat...

Yang menyatakan,

(materai dan tanda tangan)

(Nama lengkap)

Bagian Delapan

DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Uraian, Teori, Konsepsi

1. Arti dan Makna Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata Yunani *demos* dan *kratos*. *Demos* artinya rakyat, *kratos* berarti pemerintahan. Jadi, *demokrasi*, artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Di dalam *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* (Hornby, dkk: 261) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan *democracy* adalah:

"(1) country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives; (2) country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities. (3) society in which there is treatment of each other by citizens as equals".

Dari kutipan pengertian tersebut tampak bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan *rule of law*, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warganegaranya saling memberi peluang yang sama.

Istilah demokrasi, pertama kali dipakai di Yunani kuno, khususnya di kota Athena, untuk menunjukkan sistem pemerintahan yang berlaku disana. Kota-kota di daerah Yunani pada waktu itu kecil-kecil. Penduduknya tidak begitu banyak sehingga mudah dikumpulkan oleh pemerintah dalam suatu rapat untuk bermusyawarah. Dalam rapat itu diambil keputusan bersama mengenai garis-garis besar kebijaksanaan pemerintah yang akan dilaksanakan dan segala permasalahan mengenai kemasyarakatan.

Karena rakyat itu serta secara langsung, pemerintah itu disebut pemerintahan *demokrasi langsung*. Pemerintahan demokrasi langsung di Indonesia dapat kita lihat di dalam pemerintahan desa. Kepala desa atau lurah dipilih langsung oleh rakyat desa itu sendiri. Pemilihan kepala desa itu dilakukan secara sederhana sekali. Para calon menggunakan tanda gambar hasil pertanian, seperti padi atau pisang. Rakyat memberikan suara kepada calon masing-masing, yang dipilih dengan memasukkan lidi ke dalam tabung bambu milik calon yang dipilihnya. Calon yang memiliki lidi terbanyaklah yang terpilih menjadi kepala desa. Di samping memilih kepala desa, pada hari-hari tertentu warga desa dikumpulkan oleh kepala desa di balai desa untuk membicarakan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Peristiwa semacam ini dikenal dengan nama musyawarah desa.

Dalam perjalanan sejarah, kota-kota terus berkembang dan penduduknya pun terus bertambah sehingga demokrasi langsung tidak lagi diterapkan karena:

- a. Tempat yang dapat menampung seluruh warga kota yang jumlahnya besar tidak mungkin disediakan.
- b. Musyawarah yang baik dengan jumlah peserta yang besar tidak mungkin dilaksanakan.
- c. Hasil persetujuan secara bulat atau mufakat tidak mungkin tercapai karena sulitnya memungut suara dari semua peserta yang hadir.

Bagi negara-negara besar yang penduduknya berjuta-juta, yang tempat tinggalnya bertebaran di beberapa daerah atau kepulauan, penerapan demokrasi langsung juga mengalami kesukaran. Untuk memudahkan pelaksanaannya setiap penduduk dalam jumlah tertentu memilih wakilnya untuk duduk dalam suatu badan perwakilan. Wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan perwakilan inilah yang kemudian menjalankan demokrasi. Rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.

Hal ini disebut demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Bagi negara-negara modern, demokrasi tidak langsung dilaksanakan karena hal-hal berikut.

- a. Penduduk yang selalu bertambah sehingga suatu musyawarah pada suatu tempat tidak mungkin dilakukan.
- b. Masalah yang dihadapi oleh suatu pemerintah makin rumit dan tidak sederhana lagi seperti yang dihadapi oleh pemerintah desa yang tradisional.
- c. Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri di dalam mendosens kehidupannya sehingga masalah peme-

rintahan cukup diserahkan kepada orang yang berminat dan mempunyai keahlian di bidang pemerintahan negara.

Istilah demokrasi yang berarti pemerintah rakyat itu, sesudah zaman Yunani Kuno, tidak disebut lagi. Baru setelah meletusnya Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis, istilah demokrasi muncul kembali sebagai lawan sistem pemerintahan yang absolut (monarki mutlak), yang menguasai pemerintahan di dunia Barat sebelumnya. Di dalam kenyataannya, demokrasi dalam arti sistem pemerintahan yang baru ini mempunyai arti yang luas sebagai berikut.

- a. Mula-mula demokrasi berarti politik yang mencakup pengertian tentang pengakuan hak-hak asasi manusia, seperti hak kemerdekaan pers, hak berapat, serta hak memilih dan dipilih untuk badan-badan perwakilan.
- b. Kemudian, digunakan istilah demokrasi dalam arti luas, yang selain meliputi sistem politik, juga mencakup sistem ekonomi dan sistem sosial.

Dengan demikian, demokrasi dalam arti luas, selain mencakup pengertian demokrasi pemerintahan, juga meliputi demokrasi ekonomi dan sosial. Namun pengertian demokrasi yang paling banyak dibahas dari dahulu sampai sekarang ialah demokrasi pemerintahan.

Landasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintah demokrasi ialah pengakuan hakikat manusia, yaitu bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungannya antara yang satu dan yang lain. Berdasarkan gagasan dasar itu, dapat ditarik dua buah asas pokok sebagai berikut.

- a. Pengakuan partisipasi di dalam pemerintahan. misalnya, pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara bebas dan rahasia.

- b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia. Misalnya, tindakan Pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS (1995:6) mengintisarikan demokrasi sebagai sistem yang memiliki 11 (sebelas) pilar atau soko guru, yakni "Kedaulatan Rakyat, Pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, Kekuasaan mayoritas, Hak-hak minoritas, Jaminan Hak Asasi Manusia, Pemilihan yang bebas dan jujur, Persamaan di depan hukum, Proses hukum yang wajar, Pembatasan pemerintahan secara konstitusional, Pluralisme Sosial, Ekonomi dan politik, dan Nilai-nilai toleransi, Pragmatisme, Kerjasama dan mufakat."

2. Jenis-jenis Demokrasi

1. Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat;
 - a. Demokrasi langsung; dalam demokrasi langsung rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan;
 - b. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan; Dalam demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui Pemilu. Rakyat memilih wakilnya untuk membuat keputusan politik Aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
 - c. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat; Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk didalam lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya

diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat. Demokrasi ini antara lain dijalankan di Swiss. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan referendum? Yah, Referendum adalah pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung.

2. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas terdiri dari:
 - a. Demokrasi formal: Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu diberi kebebasan yang luas, sehingga demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal.
 - b. Demokrasi Material; Demokrasi material memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial-ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi semacam ini dikembangkan di negara sosialis-komunis.
 - c. Demokrasi Campuran; Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua demokrasi tersebut di atas. Demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang.
3. Berdasarkan Prinsip Idiologi, demokrasi dibagi dalam:
 - a. Demokrasi liberal; Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemerintah diminimalkan bahkan ditolak. Tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warganya dihindari. Pemerintah bertindak atas dasar konstitusi (hukum dasar)
 - b. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar: Demokrasi ini bertujuan menyejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal perebedaan kelas. Semua warga negara

mempunyai persamaan dalam hukum, politik.

4. Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara
 - a. Demokrasi sistem parlementer. Ciri-ciri pemerintahan parlementer, antara lain;
 - ü DPR lebih kuat dari pemerintah.
 - ü Menteri bertanggung jawab pada DPR
 - ü Program kebijaksanaan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen.
 - ü Kedudukan kepala negara sebagai simbol Tidak dapat diganggu gugat.
 - b. Demokrasi sistem pemisahan/pembagian kekuasaan (presidensial). Ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial adalah sebagai berikut :
 - ü Negara dikepalai presiden
 - ü Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan.
 - ü Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri.
 - ü Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan kepada presiden.
 - ü Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara, dan tidak dapat saling membubarkan

3. Nilai Demokrasi

Sebenarnya, pengertian pokok demokrasi ialah adanya jaminan hak-hak asasi manusia dan partisipasi rakyat. Akan tetapi, dalam pertumbuhannya, pengertian pokok itu telah mengalami banyak perubahan,

terutama karena faktor politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Suatu negara dapat memberikan isi dan sifat kepada demokrasi yang berbeda dari isi dan sifat demokrasi di negara lain. Dengan demikian, bentuk demokrasi negara yang satu akan berbeda dengan bentuk demokrasi negara yang lain dan bentuk demokrasi itu pada suatu masa akan berbeda dari bentuk demokrasi pada satu masa yang lain. Misalnya, bentuk demokrasi pada masa sekarang berbeda dari bentuk demokrasi pada masa UUD RIS tahun 1949 dan masa UUD Sementara tahun 1950. Yang paling utama dalam menentukan berlakunya sistem demokrasi di suatu negara ialah ada atau tidaknya asas-asas demokrasi pada sistem itu, yaitu:

1. Pengakuan hak-hak asasi manusia sebagai penghargaan terhadap martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum.
2. Adanya partisipasi dan dukungan rakyat kepada pemerintah. Jika dukungan rakyat tidak ada, sulitlah dikatakan bahwa pemerintah itu adalah suatu pemerintahan demokrasi.

Di dunia barat, demokrasi berkembang di dalam suatu sistem masyarakat yang liberal (bebas, merdeka). Oleh karena itu, lahirlah suatu bentuk demokrasi yang dinamakan demokrasi liberal, yang menjunjung hak-hak asasi manusia setinggi-tingginya, bahkan kadang-kadang di atas kepentingan umum. Sebagai akibat demokrasi liberal ini, lahirlah sistem-sistem pemerintahan yang liberal. Di dalam sistem pemerintahan ini, peranan dan campur tangan pemerintah tidak terlalu banyak di dalam kehidupan masyarakat. karena sistem ini sesuai dengan aspirasi rakyat di dunia Barat, sistem pemerintahan yang liberal ini mendapat dukungan penuh dari rakyat.

Atas dasar itu, berikut akan kita bahas bahwa demokrasi didasari oleh beberapa *nilai (value)*. Henry B. Mayo telah mencoba untuk

memerinci nilai-nilai ini, dengan catatan tentu saja tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis semua nilai-nilai ini, melainkan tergantung kepada perkembangan sejarah, aspirasi dan budaya politik masing-masing. Berikut adalah nilai-nilai yang diutarakan **Henry B Mayo**, adalah;

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dan dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman
6. Menjamin tegaknya keadilan

Dengan demikian, bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum secara bebas dan rahasia. Dewan ini harus mempunyai fungsi pengawasan terhadap pemerintah tentu saja pengawasan yang konstruktif (kritik membangun) dan sesuai normatif (aturan yang berlaku).
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Parpol ini menjalin hubungan yang rutin dan berkesinambungan antara rakyat dengan pemerintah.
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
5. Sistem Peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak azasi dan mempertahankan keadilan.

Bergulirnya era reformasi di Indonesia, yang ingin mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai akibat kegagalan masa-masa sebelumnya, menciptakan banyak hal yang harus diperbaiki. Namun, dari sekian hal yang harus diubah atau diperbaiki, wakil-wakil rakyat kita tidak ada yang mengusulkan perubahan Pancasila sebagai dasar negara, mengapa?

Berdasarkan UUD 1945, negara Indonesia adalah negara demokrasi. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan demokrasi itu? Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. **Abraham Lincoln** menyebutkan, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*is a government of the people, by the people, and for the people*). Hampir semua negara di dunia sekarang ini mengatakan dirinya negara demokrasi, sungguhpun pelaksanaan demokrasi di masing-masing negara sudah beraneka ragam. ada demokrasi liberal, seperti di Amerika Serikat dan ada demokrasi Pancasila seperti di Indonesia. Dalam demokrasi liberal, pemerintah dipegang oleh partai yang menang dalam pemilihan umum dan partai yang kalah menjadi pihak oposisi.

Dengan adanya suatu kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketenteraman dan ketertiban akan lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi. Kegagalan demokrasi Pancasila zaman Orde Baru, bukan berasal dari konsep dasar demokrasi Pancasila, melainkan lebih kepada praktik atau pelaksanaannya yang mengingkari keberadaan demokrasi Pancasila itu.

Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Pelaksanaan demokrasi Pancasila harus disertai dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan karena pembangunan adalah proses perubahan ke arah kemajuan dan proses pendidikan bangsa untuk meningkatkan mutu kehidupan bangsa.

Kegagalan demokrasi Pancasila pada zaman Orde Baru membuat banyak penafsiran mengenai asas demokrasi. Belajar dari pengalaman itu, dalam era reformasi perlu penataan ulang dan penegasan kembali arah dan tujuan demokrasi Pancasila, menciptakan prasarana dan sarana yang diperlukan bagi pelaksanaan demokrasi Pancasila, membuat dan menata kembali program-program pembangunan di tengah-tengah berbagai persoalan yang dialami sekarang ini, dan bagaimana program-program itu dapat menggerakkan partisipasi seluruh rakyat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekaligus akan merupakan kontrol bagi pelaksanaan yang lebih efektif, khususnya bagi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, sehingga dapat mencegah hal-hal yang negatif dalam pembangunan, seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Dengan telah diletakkannya dasar-dasar pelaksanaan demokrasi Pancasila, persoalan berikutnya adalah bagaimana menggerakkan rakyat untuk berpartisipasi secara penuh dalam pelaksanaan pembangunan politik. Keberhasilan pelaksanaan suatu sistem demokrasi dapat ditunjukkan dengan tingkat partisipasi rakyat pendukungnya. Partisipasi yang dibutuhkan bukan hanya karena hasil pembangunan yang dapat dinikmati, tetapi partisipasi yang timbul karena adanya kesadaran dan pengertian terhadap hak-hak dan kewajibannya. Kunci

semua pelaksanaan demokrasi tersebut adalah bagaimana Pancasila dan UUD 1945 dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Usaha tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, namun dalam pelaksanaannya banyak yang mengingkarinya sehingga menimbulkan KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme).

Sebagaimana telah dijelaskan, meski orde Baru jatuh, demokrasi Pancasila tidak ikut jatuh. karena pemerintah orde reformasi tetap menjalankan pemerintahannya dengan demokrasi Pancasila. Penegakan kehidupan yang lebih demokratis pada orde reformasi ini telah banyak diupayakan, antara lain sebagai berikut.

1. Diselenggarakannya Pemilu tahun 1999 dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab.
2. Diberikannya kebebasan bagi warga negara untuk mendirikan partai politik. Pada Pemilu 1999 diikuti 48 partai politik.
3. Pers diberi kebebasan sehingga banyak sekali bermunculan media massa (cetak, elektronik) baru.
4. Kedudukan ketua MPR terpisah dari Ketua DPR.
5. Amandemen UUD 1945 yang banyak membatasi kekuasaan Presiden.
6. Refungsionalisasi lembaga-lembaga tinggi negara.
7. Diselenggarakannya Pemilu 2004, dengan pemilihan langsung anggota DPR, DPRD, DPD dan Presiden/Wakil Presiden.

Dengan demikian, dalam tahap awal reformasi ini, pemerintah baru menata bidang politik dan hukum (konstitusi), sementara bidang lainnya masih terus dalam tahap penataan. Dan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada orde reformasi ini tetap harus bersumberkan pada hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Demokrasi dan Pelaksanaannya di Indonesia

Dalam perjalanan sejarah bangsa, sejak kemerdekaan hingga sekarang, banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat kita ambil, terutama pelaksanaan demokrasi di bidang politik. Ada tiga macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita, yaitu *demokrasi liberal*, *demokrasi terpimpin*, dan *demokrasi Pancasila*. Ketiga demokrasi tersebut dalam realisasinya mengalami kegagalan, Mengapa demikian? Dan Bagaimana pelaksanaan demokrasi Pancasila pada era reformasi ini? Marilah kita simak uraian berikut.

Demokrasi liberal bermuara pada kegagalan Konstituante menetapkan UUD pengganti UUDS 1950. Demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Orde Lama, dan demokrasi Pancasila di bawah pemerintahan Orde Baru. Meskipun konsep awalnya dimaksudkan sebagai implementasi dari sila keempat Pancasila, tetapi pada akhirnya mengarah pada terpusatnya kekuasaan di tangan seorang Presiden. Semua ini diungkapkan dan dibahas sebagai bahan kajian, belajar dari pengalaman, terutama untuk melaksanakan demokrasi pada era reformasi sekarang ini agar demokrasi tidak salah arah. Jadi, bukan semata-mata untuk melupakan masa lalu dan jasa para pemimpin terdahulu. Bukankah pengalaman itu adalah guru yang terbaik?

Berdasarkan pengalaman yang telah dialami, kita diharapkan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oleh sebab itu, kita perlu mengembangkan nilai-nilai sikap cerdas, seperti analisis, kritis, teliti, penuh perhitungan, rasional, antisipatif, serta mengendalikan diri.

Kegagalan Orde lama dan Orde Baru untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi menyebabkan bergulirnya reformasi. Dalam era reformasi ini diharapkan nilai-nilai demokrasi dapat ditegakkan. Apapun nama demokrasi itu semuanya harus tetap dalam kerangka

supremasi hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk dapat mewujudkan keadaan seperti itu, tidak bisa tidak, kita harus memiliki nilai dan sikap disiplin yang tercermin pada sikap taat asas, tegas, lugas, demokratis, terbuka, ikhlas, kooperatif, tertib, menjaga keamanan dan kebersamaan. Siapkah kita menyongsong demokrasi masa depan sesuai harapan?

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia berbeda dengan demokrasi yang dipraktekkan di negara lain. Demokrasi yang berlaku di negara kita (misalnya demokrasi Pancasila) berlainan prosedur pelaksanaannya dengan demokrasi Barat yang liberalistik, itu bukanlah pengingkaran terhadap demokrasi, sepanjang hakikat demokrasi tercermin dalam konsep dan pelaksanaannya. Dalam perjalanan sejarah politik bangsa kita, negara kesatuan RI pernah melaksanakan demokrasi Parleментар, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Untuk lebih memahami perkembangan pemerintahan demokrasi yang pernah ada di Indonesia, di bawah ini akan diuraikan penjelasannya.

1. Demokrasi Parleментар (Liberal)

Demokrasi Parleментар di negara kita telah dipraktekkan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949) kemudian dilanjutkan pada masa berlakunya RIS 1949 dan UUDS 1950. Pelaksanaan Demokrasi Parleментар tersebut secara yuridis formal berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945.

Pada masa berlakunya demokrasi parleментар (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu kabinet tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan

berkesinambungan. Salah satu faktor penyebab ketidakstabilan tersebut adalah *sering bergantinya kabinet* yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan. Misalnya, selama tahun 1945-1949 dikenal beberapa kabinet antara lain Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, dan Kabinet Amir Syarifudin. Sedangkan pada tahun 1950-1959 umur kabinet kurang-lebih hanya satu tahun dan terjadi tujuh kali pergantian kabinet, yaitu Kabinet Natsir, Sukimin, Wilopo, Ali Sastro Amidjojo I, Burhanudin Harahap, Ali Sastro Amidjojo II, dan Kabinet Djuanda.

Mengapa dalam sistem pemerintahan parlementer, kabinet sering diganti? Hal ini terjadi karena dalam negara demokrasi dengan sistem kabinet parlementer, kedudukan kabinet berada di bawah DPR (Parlemen) dan keberadaannya sangat tergantung pada dukungan DPR. Apabila kebijakan kabinet tidak sesuai dengan aspirasi rakyat yang tercermin di DPR (parlemen), maka DPR dapat menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya.

Faktor lain yang menyebabkan tidak tercapainya stabilitas politik adalah timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik yang ada saat itu. Sebagai contoh dapat kita kaji peristiwa kegagalan konstituante memperoleh kesepakatan tentang dasar negara. Pada saat itu terdapat dua kubu yang bertentangan yaitu di satu pihak ingin tetap mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan di pihak lain menghendaki kembali kepada Piagam Jakarta yang berarti menghendaki Islam sebagai dasar negara. Pertentangan pendapat tersebut terus berlanjut dan tidak pernah mencapai kesepakatan. Merujuk pada kenyataan politik pada masa itu, jelaslah bahwa keadaan partai-partai politik pada saat itu lebih menonjolkan perbedaan-perbedaan pahamnya daripada mencari persamaan-persamaan yang dapat mempersatukan bangsa.

Beranjak dari berbagai kegagalan dan kelemahan itulah maka demokrasi parlementer di Indonesia ditinggalkan dan diganti dengan demokrasi Terpimpin sejak 5 Juli 1959.

2. Demokrasi Pancasila Terpimpin

Adanya kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD baru, yang diikuti suhu politik yang memanas dan membahayakan keselamatan bangsa dan negara, maka pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan suatu keputusan yang dikenal dengan Dekrit Presiden. Dekrit Presiden dipandang sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan *kepemimpinan* yang kuat untuk mencapai hal tersebut, di negara kita saat itu digunakan demokrasi terpimpin. Istilah Demokrasi Terpimpin untuk pertama kalinya dipakai secara resmi dalam pidato Presiden Soekarno pada 10 November 1956 ketika membuka sidang konstituante di Bandung.

Persoalan kita sekarang, mengapa lahir demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin timbul dari keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktek demokrasi parlementer (liberal) yang melahirkan terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi. Secara konsepsional, demokrasi terpimpin berarti pemerintahan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hal ini mengandung arti bahwa yang membimbing dan sekaligus landasan kehidupan demokrasi di negara kita adalah sila keempat Pancasila, dan bukan kepada perorangan atau pimpinan.

Apabila kita kaji dari hakikat dan ciri negara demokrasi, dapat dikatakan bahwa demokrasi terpimpin dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional. Demokrasi terpimpin menonjolkan "kepemimpinan" yang jauh lebih besar daripada

demokrasinya, sehingga ide dasar demokrasi kehilangan artinya. Akibat dominannya kekuasaan presiden dan kurang berfungsinya lembaga legislatif dalam mengontrol pemerintahan, maka kebijakan pemerintah seringkali menyimpang dari ketentuan UUD 1945. Misalnya pada 1960 presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 dan digantikan oleh DPR Gotong Royong melalui penetapan presiden, pimpinan DPR/MPR dijadikan menteri sehingga otomatis menjadi pembantu presiden; dan pengangkatan presiden seumur hidup melalui Tap. MPRS No. III/MPRS/1963.

Secara konsepsional pula, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat pada waktu itu. Hal itu dapat dilihat dari ungkapan Bung Karno ketika memberikan amanat kepada konstituan tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin antara lain:

- a. Demokrasi terpimpin bukanlah diktator, berlainan dengan demokrasi sentralisme, dan berbeda pula dengan demokrasi liberal yang dipraktekkan selama ini;
- b. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia;
- c. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial.
- d. Inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan oleh perdebatan dan penyiasatan yang diakhiri dengan pengaduan kekuatan dan penghitungan suara pro dan kontra;
- e. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam alam demokrasi terpimpin, yang penting ialah para permusyawaratan dalam perwakilan yang harus dipimpin dengan hikmat kebijaksanaan:

- tujuan melaksanakan demokrasi terpimpin ialah mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang penuh dengan kebahagiaan material dan spiritual;
- sebagai alat, demokrasi terpimpin mengenal juga kebebasan berpikir dan berbicara tetapi dalam batas-batas tertentu, yakni batas keselamatan negara, kepentingan rakyat banyak, kesusilaan, dan pertanggungjawaban kepada Tuhan;
- masyarakat adil makmur tidak bisa lain daripada suatu masyarakat teratur dan terpimpin.

Berdasarkan pokok pikiran di atas tampak bahwa demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta budaya bangsa Indonesia. Namun dalam prakteknya, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya sehingga seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa. Penyebab penyelewengan tersebut, selain terletak pada presiden, juga karena kelemahan legislatif sebagai partner dan pengontrol eksekutif, serta situasi sosial politik yang tidak menentu saat itu.

3. Demokrasi Pancasila pada Orde Baru

a. Latar Belakang dan Makna Demokrasi Pancasila

Sejak lahirnya orde baru, diberlakukan Demokrasi Pancasila, sampai saat ini. Secara konseptual, demokrasi Pancasila masih dianggap dan dirasakan paling cocok diterapkan di Indonesia. Demokrasi Pancasila bersumberkan pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia, dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial. Misalnya, "kebebasan" berpendapat merupakan hak setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi

oleh penguasa. Dalam demokrasi Pancasila hak tersebut tetap dihargai tetapi harus diimbangi dengan *kebebasan bertanggung jawab*.

Konsepsi tentang demokrasi pancasila adalah; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan rumusan tersebut mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan Agama masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Jadi Demokrasi Pancasila berpangkal tolak dari kekeluargaan dan gotong-royong. Semangat kekeluargaan itu sendiri sudah lama dianut dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan. Menurut **Soepomo** dalam masyarakat yang dilandasi semangat kekeluargaan, sumber filosofi yang paling tepat adalah aliran pikiran *Integralistik*. Dengan demikian dalam demokrasi Pancasila nilai-nilai perbedaan tetap dipelihara sebagai sebuah kekayaan dan anugerah Tuhan YME.

b. Ciri dan Aspek Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila memiliki ciri khas antara lain bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan yang bernafaskan Ketuhanan Yang Maha Esa; menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin adanya hak-hak minoritas; pengambilan keputusan sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat; dan bersendi atas hukum. Dalam demokrasi Pancasila kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan

atas kelembagaan. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan segala sesuatu melalui saluran-saluran tertentu sesuai dengan UUD 1945. Hal ini penting untuk menghindari adanya kegoncangan politik dalam negara. Selain mewarnai berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, demokrasi Pancasila pun mengandung berbagai aspek. Menurut **S. Pamudji**, beberapa aspek-aspek yang terkandung dalam demokrasi Pancasila itu adalah:

- a. *Aspek formal*, yakni aspek yang mempersoalkan proses dan caranya rakyat menunjuk wakilnya dalam badan perwakilan rakyat dan dalam pemerintahan serta bagaimana mengatur permusyawaratan wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur untuk mencapai konsensus bersama.
- b. *Aspek materiil*, yakni aspek yang mengemukakan gambaran manusia, dan mengakui harkat dan martabat manusia serta menjamin terwujudnya masyarakat manusia Indonesia sesuai dengan gambaran, harkat, dan martabat tersebut.
- c. *Aspek normatif* (kaidah), yakni aspek yang mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang menjadi pembimbing dan kriteria dalam mencapai tujuan kenegaraan. Norma penting yang harus diperhatikan, adalah persatuan dan solidaritas; keadilan; dan kebenaran.
- d. *Aspek optatif*, yakni aspek yang mengetengah tujuan atau keinginan yang hendak dicapai. Tujuan ini meliputi tiga hal, yaitu terciptanya negara Hukum; negara Kesejahteraan; dan negara Kebudayaan.
- e. *Aspek organisasi*, yakni aspek yang mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila. Wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai. Organisasi ini meliputi organisasi sistem pemerintahan atau lembaga negara; dan organisasi sosial-politik di masyarakat.

- f. *Aspek kejiwaan*, aspek kejiwaan demokrasi Pancasila ialah semangat, yakni semangat para penyelenggara negara, dan semangat para pemimpin pemerintahan. Dalam jiwa demokrasi Pancasila dikenal:
- o Jiwa demokrasi Pancasila pasif, yakni hak untuk mendapat perlakuan secara demokrasi Pancasila;
 - o Jiwa demokrasi Pancasila aktif, yakni jiwa yang mengandung kesediaan untuk memperlakukan pihak lain sesuai dengan hak-hak yang diberikan oleh demokrasi Pancasila;
 - o Jiwa demokrasi Pancasila rasional, yakni jiwa objektif dan masuk akal tanpa meninggalkan jiwa kekeluargaan dalam pergaulan masyarakat;
 - o Jiwa pengabdian, yakni kesediaan berkorban demi menunaikan tugas jabatan yang dipangkunya dan jiwa kesediaan berkorban untuk sesama manusia dan warga negara.

Apabila kita kaji ciri dan prinsip demokrasi Pancasila, dapat dikatakan bahwa demokrasi Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Namun demikian, praktek demokrasi yang dijalankan pada masa Orde Baru masih terdapat berbagai penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip demokrasi Pancasila. Penyimpangan tersebut secara transparan terungkap setelah munculnya gerakan "Reformasi" dan jatuhnya kekuasaan Orde Baru. Di antara penyimpangan yang dilakukan penguasa Orde Baru, khususnya yang berkaitan dengan demokrasi Pancasila yaitu:

- a. Penyelenggaraan pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil;
- b. Pengekangan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (mono-loyalitas) khususnya dalam pemilihan umum, PNS seolah-

olah digiring untuk mendukung OPP tertentu, sehingga pemilihan umum tidak kompetitif.

- c. Masih ada intervensi pemerintah terhadap lembaga peradilan;
- d. Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat, sehingga sering terjadi penculikan terhadap aktivis vokal;
- e. Sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah; serta format politik yang tidak demokratis;
- f. Maraknya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik dan hukum;
- g. Menteri-menteri dan gubernur diangkat menjadi anggota MPR;
- h. Menciutkan jumlah partai politik dan sekaligus mengatasi kesempatan partisipasi politik rakyat (misalnya, *kebijakan floating mass*);
- i. Adanya pembatasan kebebasan pers dan media massa melalui pencabutan/pembatalan SIUP.

C. Pelaksanaan Demokrasi pada Orde Reformasi

Di antara bidang kehidupan yang menjadi sorotan utama untuk direformasi adalah bidang politik, ekonomi, dan hukum. Reformasi ketiga bidang tersebut harus dilakukan sekaligus, karena reformasi politik yang berhasil mewujudkan demokratisasi politik, dengan sendirinya akan ikut mendorong proses demokrasi ekonomi. Tanpa ada demokratisasi politik, tidak akan terjadi demokratisasi ekonomi, yang berarti tidak ada kontrol terhadap praktek monopoli, oligopoli, korupsi, dan kolusi. Demikian pula tanpa demokratisasi politik, prinsip *rule of law* sulit diwujudkan. Sebab badan peradilan yang otonom, berwibawa, dan yang mampu menerapkan prinsip *rule of law* itu hanya dapat terwujud apabila ada demokratisasi politik.

Perubahan yang terjadi pada orde reformasi ini dilakukan secara bertahap, karena memang reformasi berbeda dengan revolusi yang berkonotasi perubahan mendasar pada semua komponen dalam suatu sistem politik yang cenderung menggunakan kekerasan. Menurut **Hutington (Chaedar, 1998)**, *reformasi* mengandung arti *'perubahan yang mengarah pada persamaan politik sosial, dan ekonomi yang lebih merata, termasuk perluasan basis partisipasi politik rakyat'*. Pada reformasi di negara kita sekarang ini, upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan salah satu sasaran agenda reformasi.

Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan dan praktek penyelenggaraan. Untuk mewujudkan praktek demokrasi yang sesuai dengan tuntutan reformasi harus dimulai dari pembentukan peraturan. Yang mendorong terjadinya demokratisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk itu, pada 10 s.d. 13 November 1998 MPR mengadakan Sidang Istimewa, dan berhasil mengubah, menambah, serta mencabut Ketetapan MPR sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Selain itu, ditetapkan pula beberapa Ketetapan MPR yang mengatur materi baru.

Lahirnya Ketetapan MPR diikuti oleh ditetapkannya undang-undang organik yang berkaitan dengan kehidupan demokratis. Misalnya undang-undang bidang politik, undang-undang tentang otonomi daerah, dan undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Oleh karena itu, untuk memahami demokrasi pada orde reformasi ini pertama harus mengkaji Ketetapan MPR hasil Sidang Istimewa MPR 1998 beserta peraturan perundang lainnya; kemudian melihat praktek pelaksanaan dari peraturan tersebut.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktek pelaksanaan demokrasi tersebut, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada orde reformasi sekarang ini, yaitu:

- a. Pemilihan Umum Lebih Demokratis.
- b. Partai Politik Lebih Mandiri
- c. Pengaturan HAM
- b. Lembaga Demokrasi Lebih Berfungsi

Perkembangan demokrasi dalam negara-kebangsaan Indonesia dapat dikembalikan pada dinamika kehidupan bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan sampai saat ini, dengan mengacu kepada konstitusi tertulis yang pernah dan sedang berlaku, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950, serta praksis kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang menjadi dampak langsung dan dampak pengiring dari berlakunya setiap konstitusi serta dampak perkembangan internasional pada setiap jamannya itu.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, yaitu mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan demokrasi juga diarahkan untuk membangun *civil society* (masyarakat madani) di mana di dalamnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara sangatlah besar, dalam masyarakat madani partisipasi dan kemandirian masyarakat sangat diperlukan untuk mensukseskan tujuan pembangunan nasional, khususnya dan umumnya tujuan negara.

Menurut pandangan **Welzer** (1999:1) masalah *civil society* yang Indonesia disebut "masyarakat madani", yang kini menjadi pusat perhatian dan perdebatan akademis di berbagai belahan bumi, merupakan pengulangan kembali perdebatan "*American Liberalism / communitarianism*" yang terpusat pada persoalan: *the state* atau

negara di satu pihak, dan *civil society* di lain pihak, yang sesungguhnya antara kedua persoalan tersebut satu sama lain saling berkaitan. Menurut **Welzer** (1999) seorang *civil republican* **Jacobin** yang memihak kepada pandangan pentingnya negara, berpendapat bahwa dalam kehidupan ini hanya ada satu komunitas yang dianggap penting, yakni "*the political community*" atau masyarakat politik yang anggotanya adalah warga negara yang kesemuanya dilihat sebagai ... *active participant in democratic decision making* atau partisipan yang aktif dalam pengambilan keputusan yang demokratis.

Di Indonesia, sebagaimana telah dibahas terdahulu, konsep masyarakat madani ini terhitung masih baru dan masih banyak diperdebatkan, baik istilah maupun karakteritiknya. Misalnya **Culla** (1999:3); **Raharjo**: (1999) memandang istilah masyarakat madani hanyalah salah satu dari berbagai istilah sebagai padanan kata *civil society*, karena masih ada beberapa padanan istilah lainnya, seperti masyarakat warga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab, dan masyarakat berbudaya. Sementara itu Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani (1999:32) menyarankan untuk menggunakan istilah masyarakat madani sebagai terjemahan dari *civil society*.

SENARAI KEPUSTAKAAN

- Adam Schwarz**, 1994, *Social Rights, Individual Responsibility, in A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*, Westview, Boulder.
- Agus Wahyudi**, *Ideologi Pancasila, Doktrin Komprehensif atau Konsepsi Politis? Typescript* [bisa diakses dalam <http://filsafat.ugm.ac.id/aw>]
- A.M. W. Pranarka**, 1985, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta.
- Anderson, Benedict**, 1999, *Pendahuluan*, dalam *Komunitas-Komunitas Imajiner: Renungan tentang asal-usul dan Penyebaran Nasionalisme*, judul asli: *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, edisi 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Andi Trinanda**, *Mendefinisikan Kembali Paradigma Demokrasi Masa Transisi di Indonesia : Memaknai Nilai Reformasi Secara Obyektif*, Majalah Cakrawala BSI, Vol 2 No. 1 September 2002.
- Ary Ginanjar Agustian**, 2003: *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ*, Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam, (edisi XIII), Jakarta, Penerbit Arga Wijaya Persada.
- _____ 2003: *ESQ Power Sebuah Inner Journey Melalui Al Ihsan*, (Jilid II), Jakarta, Penerbit ArgaWijaya Persada.
- Avey, Albert E.** 1961: *Handbook in the History of Philosophy*, New York, Barnas & Noble, Inc.

- Brian Barry**, 1997, *Humanity and Justice in Global Perspective*, in **Goodin, Robert E. and Philip Pettit (eds)**, *Contemporary Political Philosophy: An Anthology*, Blackwell, Cambridge.
- Brian Thompson**, 1997, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, London: Blackstone Press Ltd.
- Bourchier, David**, 1996, *Lineages of Organicist Political Thought in Indonesia*, A Thesis, Department of Politics, Monash University, June.
- Budiardjo, Miriam**. 2002. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budi Winarno**, 2004, *Globalisasi ujud Imperialisme Baru Peran Negara Dalam Pembangunan*, Tajidu Press: Yogyakarta.
- Camilleri J.A., and Jim Falk**, 1992, *The End of Sovereignty? The Politics of a Shrinking and Fragmenting World*, Aldershot, Edward Elgar.
- Center for Civic Education (CCE)** 1994: *Civitas National Standards For Civics and Government*, Calabasas, California, U.S Departement of Education.
- Chris Brown**, 1998, *Human Rights*”, in *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, **John Baylis and Steve Smith**, Oxford University Press, Oxford.
- Darji Darmodihardjo & Shidarta**, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila: Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Denham, Marx E., and Mark Owen Lombardi (eds.)**, 1996, *Perspectives on Third World Sovereignty*, MacMillan, London.
- Djohar**, 1999, *Reformasi dan Masa Depan Pendidikan di Indonesia Sebuah Rekonstruksi Pemikiran*, Ikip Negeri: Yogyakarta.
- Dillon, Michael**, 1995, *Sovereignty and Governmentality: From the Problematics of the 'New World Order' to the Ethical Problematic of the World Order*, Alternatives.

- Dworkin, Ronald**, 1997, *Taking Rights Seriously, in Contemporary Political Philosophy; An Anthology*, **Robert E. Goodin and Philip Pettit (eds.)**, Blackwell, Oxford.
- Endang Saifuddin Anshar**, 1981, *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945*, Pustaka Bandung.
- Franz Magnis-Suseno**, 1992, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius: Jakarta.
- Ganeswara, Ganjar M, dkk.** 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: UPI Press.
- Hardono Hadi**, 1994, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hazairin**, 1990, *Demokrasi Pancasila*, PT.Rineka Cipta: Jakarta.
- Israil, Idris**. 2005. *Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan*. Malang : Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.
- J. Bryce**, 1901, *Studies in History and Jurisprudence*, vol.1, (Oxford: Clarendon Press.
- John B. Thompson**, 1984, *Introduction*”, in *Studies in the Theory of Ideology*, University of California Press, Berkeley.
- Kartohadiprodjo, Soediman**, 1983: *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, cetakan ke-4, Bandung, Penerbit Alumni.
- Kaelan**. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Primagama.
- 2008. *“Pancasila sebagai suatu Sistem Filsafat”* dalam Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Jakarta: Direktorat Ketenagaan Dirjen DIKTI Depdiknas.
- Kayam, Umar**, tt, *Keselarasn dan Kebersamaan: Suatu Penjelajahan Awal*”, dalam *Kebudayaan dan Pembangunan*, Nat J. Colletta dan Umar Kayam (eds.), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

- Kalidjernih, Freddy K**, 2007, *Cakrawala Baru Kewarganegaraan Indonesia*, Regina: Jakarta,
- Kelsen, Hans** 1973: *General Theory of Law and State*, New York, Russell & Russell
- Langenberg, Michael Van**, 1996, *Negara Orde Baru: Bahasa, Ideologi, Hegemoni*”, dalam *Bahasa dan Kekuasaan*, Latif, Yudi dan Idi Subandy Ibrahim (eds), Mizan, Jakarta.
- Martin Hewitt**, 1992, *Welfare, Ideology and Need, Developing Perspectives on the Welfare State*, Maryland: Harvester Wheatsheaf.
- McCoubrey & Nigel D White**, 1996: *Textbook on Jurisprudence* (second edition), Glasgow, Bell & Bain Ltd.
- Mohammad Noor Syam**, 2007, *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional)*, disertasi edisi III, Malang, Laboratorium Pancasila.
- , 2000: *Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia (Wawasan Sosio-Kultural, Filosofis dan Konstitusional)*, edisi II, Malang Laboratorium Pancasila.
- Murphy, Jeffrie G & Jules L. Coleman**, 1990, *Philosophy of Law An Introduction to Jurisprudence*, San Francisco, Westview Press.
- M Syamsudin (et al)**, 2009, *Pendidikan Pancasila; Menempatkan Pancasila Dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan*. Total Media: Yogyakarta.
- Nawiasky, Hans** 1948, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Zurich/Koln Verlagsanstalt Benziger & Co. AC.
- Notonagoro**, 1984: *Pancasila Dasar Filsafat Negara*, Jakarta, PT Bina Aksara, cetakan ke-6.
- Noor Ms Bakkry**, 2009, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

- Oetojo Oesman dan Alfian (eds)**, 1990, *Pendahuluan*, dalam *Pancasila sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP7 Pusat, Jakarta.
- O. Hood Phillips**, 1987, *Constitutional and Administrative Law*, 7th ed., London: Sweet and Maxwell, 1987
- Pandji Setijo**, 2009, *Pendidikan pancasila: Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*, Grasindo: Jakarta.
- Ramage, Douglas E**, 1995, *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and Ideology of Tolerance*, Routledge, London.
- Rahayu, Minto**. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ruyadi, Yadi, dkk.** 2003. *Pendidikan Pancasila: Buku Tugas Belajar Mandiri*. Bandung: CV Maulana.
- Sartono Kartodirdjo**, *Ideologi dan Teknologi*, Pabelan Jayakarta, Jakarta, 1999
- Schmidt, Thomas M**, *Religious Pluralism and Democratic Society, Political Liberalism and the reasonableness of religious beliefs, Philosophy & Social Criticism*, Vol. 25, No. 4, pp. 43-56.
- Sharma, P.** 2004. *Sistem Demokrasi Yang Hakiki*. Jakarta : Yayasan Menara Ilmu.
- Soekarno**, *Dibawah Bendera Revolusi*, penerbit DBR, 1964
- Soerjanto Poespowardojo**, 1994, 'Mengapa Kita Menentang Komunisme?: Tinjauan Dengan Orientasi Pancasila, dalam *Filsafat Pancasila : Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Gramedia, Jakarta.
- _____, 1991, *Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Steven I. Levine**, 1994, *Perception and Ideology in Chinese Foreign Policy*, in *Chinese Foreign Policy: Theory and Practice*,

Thomas W. Robinson and David Shambaugh (eds), Clarendon Press, Oxford, 1994.

Sudirwo, Daeng. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/KEP/2006.* Bandung: Randu Alas.

Sumarsono (et al), 2001, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT. Gramedia Pustak Utama: Jakarta.

Syamsul Wahidin, *Pokok-Pokok Pendidikan Kewarganegaraan*, 2010, PT. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Tukiran Taniredja, 2009, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhamadiyah*, PT. Alvabeta: Bandung.

UNO 1988: *HUMAN RIGHTS, Universal Declaration of Human Rights*, New York, UNO

Pranoto Mangkusasmito, 1972, *Pancasila dan sejarahnya*, Lembaga Riset Jakarta.

Walton H. Hamilton, 1931, *Constitutionalism, Encyclopedia of Social Sciences*, Edwin R.A., Seligman & Alvin Johnson, eds.